



MANAJEMEN KONFLIK DALAM PENGEMBANGAN WISATA DESA CURUG CIKULUWUNG KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

NIA KURNIATI



**MAGISTER PENGEMBANGAN MASYARAKAT
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPBUniversity

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.



PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “**Manajemen Konflik Dalam Pengembangan Wisata Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor**” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2021

Nia Kurniati
I354180055

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.



RINGKASAN

NIA KURNIATI. Manajemen Konflik dalam Pengembangan Wisata Desa Curug Cikuluwung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Dibimbing oleh DJUARA P. LUBIS dan RILLUS A. KINSENG.

Pariwisata Indonesia sedang menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah, dan menjadi salah satu penyumbang devisa yang besar. Pariwisata merupakan sektor yang strategis dan menjadi media integrasi program antar sektor pembangunan, sehingga pariwisata sangat masuk akal ditetapkan menjadi *leading sector* pembangunan. Namun dalam pengelolaan pariwisata tidaklah mudah, sering adanya konflik yang terjadi di antara para pengelolanya. Konflik pun terjadi dalam pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik dan merumuskan strategi manajemen konflik pada pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada bulan Januari-Juni 2021. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* (sengaja) karena berdasarkan ketertarikan penulis akan pariwisata berbasis komunitas (*Community Based Tourism = CBT*). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*). Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen intansi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga konflik yang telah terjadi dalam pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung yakni; pertama konflik antara Pemerintahan Desa Pamijahan dan tokoh agama serta tokoh masyarakat, yang kedua konflik antara BUMDes dan warga dari desa tetangga (Desa Pamijahan), ketiga konflik antara pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung dan pemerintahan desa. Hal yang melatarbelakangi konflik pertama adalah belum adanya sosialisasi ke tokoh agama setempat dan adanya pemasangan papan nama dan petunjuk arah wisata desa Curug Cikuluwung. Isu yang menjadi inti konflik adalah kekhawatiran tokoh agama ketika Curug Cikuluwung dijadikan tempat wisata akan menimbulkan dampak negatif sehingga ada penolakan dari tokoh agama akan dibukanya akses pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan. Konflik tersebut sudah selesai dimediasi oleh pemerintahan desa dan BUMDes.

Selanjutnya hal-hal yang melatarbelakangi konflik kedua adalah penutupan pintu akses masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari pintu yang tidak resmi oleh BUMDes Cibitung Wetan. Inti dari konflik adalah perebutan akses masuk ke wisata Curug Cikuluwung. Adapun efek dari konflik adalah warga desa tetangga (Desa Pamijahan) beraliansi dengan ormas/LSM Gempar.

Adapun, hal-hal yang melatarbelakangi konflik ketiga adalah adanya penyalahgunaan jabatan oleh ketua BUMDes yang lama, adanya prasangka dari pengelola wisata desa Curug Cikuluwung ke pemerintahan desa, komunikasi yang tidak lancar antara pengurus Curug Cikuluwung dan pemerintahan desa, adanya isu politik yakni ketua pengelola Curug Cikuluwung merupakan pendukung calon kepala desa yang kalah dari kepala desa terpilih, serta sumber daya manusia yang belum mampu mengelola wisata desa Curug Cikuluwung dengan profesional. Isu

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

yang menjadi inti dari konflik pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung adalah ketidaksepahaman antara pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung dan Pemerintahan Desa Cibitung Wetan. Efek dari konflik ini yaitu pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung mengalami keterlambatan, pengurus Curug Cikuluwung tidak mendapatkan akses untuk memperoleh pelatihan, pengelola kesulitan mendapatkan akses untuk memperoleh bantuan dari pemerintah karena telah melepaskan ikatan dari pemerintahan desa.

Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung yang pertama adalah Pemerintahan Desa Pamijahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Pamijahan serta paguyuban. Pada konflik kedua, aktor-aktor yang terlibat dalam konflik adalah BUMDes, pengelola wisata desa Curug Cikuluwung, warga Desa Pamijahan (Mami), ormas/LSM Gempar. Selanjutnya aktor yang terlibat dalam konflik ketiga adalah pengelola wisata desa Curug Cikuluwung, Pemerintahan Desa Cibitung Wetan, BUMDes, PT Indonesia Power dan mantan kandidat kepala desa.

Selanjutnya tahapan konflik yang terjadi pada pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung pada konflik pertama dan kedua berada pada tahap emerging dan paskakonflik yang situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua pihak, sedangkan untuk konflik ketiga berada pada tahap emerging dan krisis, aktor-aktor yang berkonflik masing-masing teguh dengan pendirian mereka. Adapun konflik yang terjadi dalam pengelolaan wisata desa Curug Cikuluwung untuk konflik pertama dan kedua merupakan konflik konstruktif, kedua hubungan yang berkonflik menjadi lebih baik, sedangkan konflik yang ketiga merupakan konflik destruktif, karena lebih banyak menimbulkan efek negatif.

Upaya-upaya untuk mengelola konflik sudah dilakukan oleh komunitas berupa manajemen konflik berbasis komunitas (*Community Based Conflict Management*) namun belum menjadi solusi. Perlu adanya mediasi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas wisata desa untuk memediasi pihak-pihak yang berkonflik seperti Pemerintahan Kecamatan Pamijahan, Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan atau dari PT Indonesia Power.

Kata kunci: Analisis Konflik, Analisis Stakeholders, Pariwisata Berbasis Komunitas, Manajemen Konflik

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.



SUMMARY

NIA KURNIATI. Conflict Management in Developing Curug Cikuluwung Village Tourism, Pamijahan District, Bogor Regency. Supervised by DJUARA P. LUBIS dan RILLUS A. KINSENG.

Indonesian tourism is currently one of the sectors prioritized by the government and is one of the biggest foreign exchange-earners. Tourism is a strategic sector and is a medium for program integration between development sectors, so that tourism is very reasonable for becoming the leading sector of development. But the management of tourism is not easy. There are often conflicts between the managers. Conflicts also occurred in the development of Curug Cikuluwung village tourism. This study aims to analyze conflict and formulate conflict management strategies in developing tourism in Curug Cikuluwung village.

This study used a qualitative approach with a case study method and the location of the research was Cibitung Wetan Village, Pamijahan District, Bogor Regency in January-June 2021. The author's interest in community-based tourism is as the consideration of the location selection. The data used are primary and secondary. Primary data were obtained through observation, in-depth interviews, and focus group discussions (FGD). Secondary data is from related agency documents.

The study results indicate that three conflicts have occurred in the tourism development of Curug Cikuluwung village. The first conflict is between the government of Pamijahan village and religious leaders and community leaders; the second is a conflict between BUMDes and residents from a neighboring village (Pamijahan Village); the third is a conflict between the core manager of Curug Cikuluwung village tourism and the village government. The reason behind the first conflict is that there has been no socialization to local religious leaders and the installation of signboards and directions for tourism in Curug Cikuluwung village. The core issue of the conflict is the concern of religious leaders. When Curug Cikuluwung acts as a tourist spot, it will have a negative impact. Therefore, there is a rejection from religious leaders for open access the entrance to Curug Cikuluwung village tourism from Pamijahan Village. The district government and BPD of Pamijahan Village have mediated the conflict.

Furthermore, the second conflict was closing the entrance to the Cikuluwung Curug village tourism from another unofficial entrance by Cibitung Wetan BUMDes. Thus, the essence of the conflict is the struggle for access to Curug Cikuluwung tourism. The effect of the conflict is that residents of neighboring villages (Pamijahan Village) have alliances with Gempar mass organizations.

Meanwhile, the problems behind the third conflict are the abuse of authority by the old BUMDes Chair, the prejudice from the Curug Cikuluwung village tourism manager to the village government, not smooth communication between the Curug Cikuluwung management and the village government, political issues, namely the chairman of the curug management. Cikuluwung is a supporter of prospective village heads who lost to the elected village head and human resources who have not been able to manage Curug Cikuluwung village tourism professionally. The core issue of the conflict in the development of tourism in Curug Cikuluwung village is the disagreement between the core managers of tourism in



Curug Cikuluwung village and the Cibitung Wetan village government. The effects of this conflict are that the development of Curug Cikuluwung village tourism is experiencing delays, Curug Cikuluwung administrators do not get access to training, managers have difficulty getting assistance from the government because they have separated from the village government.

The actors involved in the first conflict in the development of Curug Cikuluwung village tourism are the government of Pamijahan Village, religious leaders, community leaders, and the association. In the second conflict, the actors involved were BUMDes, tourism managers in Curug Cikuluwung village, residents of Pamijahan Village (Mami), Gempar mass organizations. Furthermore, the actors involved in the third conflict are the Curug Cikuluwung village tourism manager, the Cibitung Wetan Village Government, BUMDes, Indonesia Power Company and former village head candidates.

Furthermore, the conflict in the development of Curug Cikuluwung village tourism in the first and second conflicts was in the emerging and post-conflict stage. Ending violent confrontations, reduced tensions, and relations that led to more normalcy between the two parties become the resolving situation. While the third conflict was at the stage of emerging and crisis, the actors in conflict stand firm with their stance. Therefore, the conflicts that occurred in the management of Curug Cikuluwung village tourism for the first and second conflicts are constructive. The two conflicting relationships are getting better, while the third conflict is a destructive, because it causes more harmful effects.

The community practiced community-based conflict management but has not yet become a solution. Therefore, there is a need for mediation from parties with authority over village tourism to mediate conflict parties from the Pamijahan District Government, the Bogor Tourism office, Village Community Empowerment office, and or Indonesia Power Company.

Keywords: Analysis of conflict, Analysis of stakeholder, Community Based Tourism, Conflict Management

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.



@Hak cipta milik IPBUniversity

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2021
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

**MANAJEMEN KONFLIK DALAM PENGEMBANGAN
WISATA DESA CURUG CIKULUWUNG, KECAMATAN
PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR)**

NIA KURNIATI

Tesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister pada
Program Studi Magister Pengembangan Masyarakat

**MAGISTER PENGEMBANGAN MASYARAKAT
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

Judul Tesis : Manajemen Konflik dalam Pengembangan Wisata Desa
Curug Cikuluwung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten
Bogor

Nama : Nia Kurniati

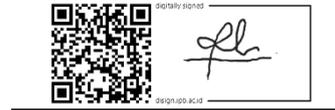
NIM : I354180055

Disetujui oleh

Pembimbing 1:
Dr. Ir. Djuara P. Lubis, MS



Pembimbing 2:
Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, MA



Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS
195808271983031001



Dekan Sekolah Pascasarjana:
Prof. Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, M. Eng
196004191985031002



Tanggal Ujian:
13 Agustus 2021

Tanggal Lulus:
29 Agustus 2021



PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanaahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Manajemen Konflik Dalam Pengembangan Wisata Desa Curug Cikuluwung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor" dengan baik.

Tesis ini dapat selesai atas dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ir. Djuara P Lubis, MS dan Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, MA selaku komisi pembimbing atas masukan, saran dan arahan dalam membimbing penulisan tesis ini hingga selesai. Dr. Ir. Sarwititi Sarwoprasodjo, MS, Dr. Ir. Lala M Kolopaking, MS, Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS selaku tim penguji dan pengajar yang telah memberikan masukan dan saran serta pembelajarannya selama menempuh perkuliahan.

Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih dan hormat kepada orang tua, kakak, kakak ipar dan keponakan atas do'a, dan dukungannya selama menempuh masa perkuliahan ini. Selain itu, penulis juga sampaikan terimakasih untuk Tendik MPM Ibu Hetty dan Ibu Susi atas dukungan, dan perhatiannya dalam menyelesaikan perkuliah, serta sahabat-sahabat MPM 2018 Risca, Selna, Mba Hilmi, Pak Irman dan Mas Casdimin atas kebersamaan, dukungan dan pembelajarannya selama masa perkuliahan, juga untuk sahabat NYC Sri, Awug, Awe, Gita, Anggi dan Nia serta Malvina atas do'a dan dukungannya, juga kepada Komunitas Curug Cikuluwung, Pemerintahan Desa Cibitung Wetan, BUMDes Cikahuripan dan Pemerintahan Kecamatan Pamijahan atas kerjasama selama penelitian.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bogor, Agustus 2021

Nia Kurniati

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
1.5 Ruang Lingkup	4
II TINJAUAN TEORITIS	5
2.1 Tinjauan Pustaka	5
2.2 Penelitian Terdahulu	13
2.3 Kerangka Pemikiran	17
III METODE PENELITIAN	20
3.1 Pendekatan Penelitian	20
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	20
3.3 Teknik Pengumpulan Data	20
3.4 Teknik Analisis Data	21
3.5 Teknik Perancangan Strategi Manajemen Konflik	21
IV GAMBARAN PETA SOSIAL DAN KOMUNITAS DESA CIBITUNG WETAN	23
4.1 Gambaran Umum Lokasi	23
4.2 Demografi dan Kependudukan	24
4.3 Kelembagaan Sosial	26
4.4 Perubahan Ekologis	28
4.5 Masalah-masalah Sosial	30
V HASIL DAN PEMBAHASAN	31
5.1 Deskripsi Konflik	31
5.2 Analisis Stakeholder	51
5.3 Manajemen Konflik	55
VI SIMPULAN DAN SARAN	59
6.1 Simpulan	59
6.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65
RIWAYAT HIDUP	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



DAFTAR TABEL

1	Aspek Penelitian, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Manajemen Konflik dalam pengembangan wisata desa	21
2	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin (RJK) Desa Cibitung Wetan Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017	24
3	Kelembagaan berdasarkan jenis Pengorganisasian Desa Cibitung Wetan tahun 2017	27
4	Tokoh-tokoh di Desa Cibitung Wetan tahun 2020	27
5	Urutan Kejadian Konflik wisata desa Curug Cikuluwung	31
6	Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Curug Cikuluwung pertama	43
7	Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Curug Cikuluwung kedua	45
8	Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Curug Cikuluwung ketiga	47
9	Stakeholder pada pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung	54

DAFTAR GAMBAR

1	Kerangka Pemikiran	19
2	Peta Administrasi Desa Cibitung Wetan	23
3	Penduduk Desa Cibitung Wetan berdasarkan tingkat Pendidikan tahun 2017	24
4	Persentase Penduduk Desa Cibitung Wetan berdasarkan Mata Pencaharian Utama tahun 2017	25
5	Perkembangan Penduduk Desa Cibitung Wetan Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017	25
6	Jumlah Kelahiran, Migrasi Masuk, Kematian, dan Migrasi Keluar Penduduk	26
7	Pola Adaptasi Ekologi Desa Cibitung Wetan	30
8	Pohon konflik antara Pemerintahan Desa Pamijahan dan tokoh agama	39
9	Pohon konflik antara BUMDes dan warga Desa Pamijahan	40
10	Pohon konflik antara pengelola wisata desa Curug Cikuluwung dan pemerintahan desa	41
11	Analisis Antar Kasus Konflik	42
12	Pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik antara pengelola wisata desa Curug Cikuluwung dan tokoh agama	44
13	Pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik antara BUMDes dan warga Desa Pamijahan	46
14	Pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik antara pengelola wisata desa Curug Cikuluwung dan pemerintahan desa	48
15	Tahapan konflik wisata desa Curug Cikuluwung menurut Engel dan Korf	50
16	Tahapan konflik wisata desa Curug Cikuluwung menurut Fisher	50



DAFTAR LAMPIRAN

1 Dokumentasi Photo Pengambilan Data

65

@Hak cipta milik IPBUniversity

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.



@Hak cipta milik IPBUniversity

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata Indonesia sedang menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah, dan menjadi salah satu penyumbang devisa yang besar. Pariwisata merupakan sektor yang strategis dan menjadi media integrasi program antar sektor pembangunan, sehingga pariwisata sangat masuk akal ditetapkan menjadi *leading sector* pembangunan (dapat menggerakkan perekonomian bangsa) (<http://www.kemenparekraf.go.id/post/rencana-strategis-2018-2019-kementerian-pariwisata>).

Penyelenggaraan pariwisata Indonesia pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pertumbuhan pariwisata Indonesia yang melebihi pertumbuhan pariwisata regional dan global menjadikan Indonesia termasuk kedalam 20 negara destinasi pariwisata yang memiliki pertumbuhan tercepat, dengan pertumbuhan 15.5% (The Telegraph, 2017). Pertumbuhan wisatawan mancanegara di Indonesia mencapai 22%, sementara ASEAN hanya mengalami pertumbuhan sebesar 7% dan dunia 6.4% (<http://www.kemenparekraf.go.id/post/rencana-strategis-2018-2019-kementerian-pariwisata>).

Di Indonesia pertumbuhan ekonomi dan pariwisata memiliki hubungan kausalitas timbal balik (*reciprocal causal hypothesis*). Artinya, pertumbuhan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi saling memberikan manfaat satu dengan yang lain. Pertumbuhan pendapatan pariwisata akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan *time lag* 5 – 6 triwulan. Artinya, peningkatan pendapatan pariwisata tahun sebelumnya baru akan terlihat pengaruhnya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama dan kedua tahun yang akan datang. Selain itu, pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan pendapatan pariwisata dengan segera, yaitu pada triwulan berikutnya. Pengaruh ini berlangsung selama 3 triwulan. Artinya, pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya akan mendorong peningkatan pendapatan pariwisata selama 3 triwulan pertama tahun berjalan (Nizar 2015).

Menurut Harssel (1994), berdasarkan atas motivasi perjalanan wisatawan, pariwisata dibagi menjadi sepuluh jenis yaitu; pariwisata alam (*eco-tourism*), pariwisata budaya (*cultural tourism*), pariwisata social (*social tourism*), pariwisata aktif/petualangan (*active/adventure tourism*), pariwisata rekreasi (*recreational tourism*), pariwisata olahraga (*sport tourism*), pariwisata minat khusus (*specialized tourism*), pariwisata keagamaan (*religious tourism*), pariwisata kesehatan (*health tourism*) dan pariwisata etnis (*ethnic tourism*). Ekowisata merupakan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan wisata pedesaan merupakan salah satu wisata berkelanjutan (Pudianti, 2012).

Desa Wisata berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan dari level akar rumput, dengan mengikutsertakan penduduk lokal pada mata rantai wisata dan pembinaan pendidikan, keterampilan dan pengelolaan lokal. Kearifan lokal sebagai dasar pembangunan berkelanjutan dalam pariwisata pedesaan yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam mengemas variasi atraksi seperti wisata edukasi, partisipasi

dalam mengembangkan infrastruktur, keterlibatan masyarakat menjadi penjaga/*marshall*, keterlibatan masyarakat dalam mengolah limbah dari kegiatan pariwisata untuk menghindari pencemaran lingkungan dan untuk menjaga lingkungan yang bersih karenanya mendorong wisatawan tinggal lebih lama (Vitasurya 2016).

Namun dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan ini tidaklah mudah, sering adanya konflik yang terjadi di antara para pengelolanya. Seperti yang terjadi di pengelolaan wisata Goa Pindul, Kabupaten Gunung Kidul konflik melibatkan stakeholder yakni masyarakat lokal, pemerintah dan pokdarwis. Politik perseteruan (*contentious politics*) di sektor pariwisata ini tidak hanya dipahami sebagai masalah tunggal, tapi konflik tersebut merupakan pertautan kompleksitas masalah dari berbagai aktor, sektor, mekanisme dan proses (Afala 2017). Adapun keberhasilan pengelolaan ekowisata tergantung dari sikap positif masyarakat, untuk ikut berpartisipasi aktif di dalam program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh pengelola kawasan. Adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pengelola memicu konflik yang mengakibatkan kesenjangan sosial (Fitriyana 2016).

Konflik pun terjadi pada pengelolaan wisata desa Curug Cikuluwung Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Curug Cikuluwung merupakan wisata desa yang berkonsep CBT (*Community Based Tourism*). Dalam pengelolaan wisata Curug Cikuluwung melibatkan *stakeholder* yang terdiri atas komunitas wisata Curug Cikuluwung dan pemerintahan desa dalam hal ini adalah BUMDes. Konflik terjadi antara pengurus komunitas wisata dan tokoh agama, antara BUMDes dan warga desa tetangga, antara pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung dan pemerintahan desa.

Menurut Fisher et al., (2001), terdapat empat tipe konflik, yakni; 1) Tanpa Konflik, 2) Konflik Laten, 3) Konflik Terbuka, dan 4) Konflik di Permukaan. Selain itu, Fisher et al., (2001), mengemukakan teori-teori yang menyebabkan konflik yakni 1) Teori hubungan masyarakat yang beranggapan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat, 2) Teori negosiasi prinsip menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik, 3) Teori kebutuhan manusia, yang beranggapan bahwa konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental, dan sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi, 4) Teori identitas, beranggapan bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam.

Dalam sebuah konflik melibatkan beberapa *stakeholder*, sehingga perlu dilakukan analisis *stakeholder*. Analisis *stakeholder* adalah suatu pendekatan dan prosedur untuk mencapai pemahaman suatu sistem dan cara mengidentifikasi aktor-aktor kunci atau *stakeholder* kunci di dalam sistem, dan menilai kepentingan masing-masing di dalam sistem tersebut (Grimble dan Chan 1995).

Berdasarkan data empiris di lapangan, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis konflik dan bagaimana pengelolaan konflik tersebut. Manajemen konflik berbasis komunitas perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Jim Ife (2016) ,diantaranya 1) holisme, 2) berkelanjutan, 3) keanekaragaman, 4) perkembangan organik, 5) perkembangan yang seimbang, 6) mengatasi struktur yang merugikan, 7) pemberdayaan, 8) menghargai pengetahuan lokal, 9)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

menghargai budaya lokal, 10) menghargai sumber daya lokal, 11) menghargai keterampilan masyarakat lokal, 12) menghargai proses lokal, 13) partisipasi, 14) proses, hasil, dan visi, 15) integritas proses, 16) menumbuhkan kesadaran, 17) Kerjasama dan consensus, 18) langkah pembangunan (pengembangan masyarakat merupakan proses jangka panjang), 19) perdamaian dan anti kekerasan, 20) inklusivitas (merangkul, tidak memprovokasi, merespons provokasi dengan cara-cara tanpa kekerasan), 21) membangun masyarakat. Sementara itu, Engel dan Korf (2005) menjelaskan ragam pengelolaan konflik berupa kontinum mulai dari mulai dari *avoidance*/menghindar (tindakan yang mencegah atau menghindar terjadinya konflik), *negotiation*/negosiasi (proses tawar-menawar yang dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berkonflik), *mediation*/mediasi (menggunakan pihak ketiga untuk proses mediasi), *arbitration*/arbitrasi (menyerahkan penyelesaian konflik kepada pihak ketiga yang akan membuat keputusan bagi pihak yang berkonflik), *adjudication*/ajudikasi (bersandar pada keputusan hakim). Sejalan dengan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat dari Jim Ife, maka pengelolaan konflik berbasis komunitas menurut Angel dan Korf maksimal sampai tahap mediasi karena tiga tahap pertama merupakan pengelolaan konflik menang-menang (*win-win solution*) sedangkan dua tahap terakhir merupakan pengelolaan konflik yang lebih bersifat menang-kalah (*win-lose solution*).

1.2 Rumusan Masalah

Berkembangnya wisata desa Curug Cikuluwung di Desa Cibitung Wetan, Pamijahan Bogor telah memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Desa Cibitung Wetan, namun dengan adanya konflik yang terjadi hal tersebut berpengaruh terhadap pengembangan wisata desa tersebut. Oleh karena itu, penting untuk **menganalisis konflik dan strategi apa yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik** tersebut sehingga pariwisata di Desa Cibitung Wetan terus berkembang. Terkait dengan hal tersebut, perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana konflik dalam pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung?
2. Bagaimana strategi manajemen konflik di komunitas wisata desa Curug Cikuluwung?

1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konflik yang terjadi dalam pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung yang meliputi; urutan kejadian konflik, isu-isu konflik, aktor yang terlibat dalam konflik, tahapan konflik, dan akibat konflik.
2. Merumuskan strategi manajemen konflik di komunitas wisata Curug Cikuluwung.

1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, yakni:

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dalam memediasi penyelesaian sebuah konflik di komunitas.
- b. Bagi pemerintahan desa dan komunitas wisata desa Curug Cikuluwung diharapkan bisa menjadi alternatif acuan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini fokus terhadap kajian untuk merumuskan manajemen konflik sebagai strategi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di komunitas. Variabel dari penelitian ini adalah konsep konflik, manajemen konflik, analisis *stakeholder*, komunitas, pariwisata berbasis komunitas dan desa wisata. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

II TINJAUAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Konflik dan Manajemen Konflik

Seiring dengan berkembangnya sebuah komunitas, konflik pasti terjadi pada semua komunitas. Konflik yang terjadi di antara *stakeholder* dalam pengelolaan maupun pemanfaatan lahan di Gunung Salak Endah menjadi kawasan wisata berdasarkan wujud konflik termasuk dalam konflik tertutup dan mencuat ditandai dengan adanya perselisihan di antara *stakeholder* namun belum ada proses penyelesaian. Isu konflik yang menjadi masalah inti dari konflik pengelolaan wisata di GSE adalah ketidakjelasan status pengelolaan dan lemahnya koordinasi antar *stakeholder* (Ulfah 2007).

Menurut Fisher et al. (2001), konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Sementara itu, Coser mengatakan bahwa "*Social conflict...to mean a struggle over values and claims to scarce status, power and resources in wich the aims of the proponents are to neutralize, injure or eliminate their rivals*" (Coser, 1964). Berikutnya, Broom dan Selznick dalam Kinseng (2013) menjelaskan bahwa "*When the clash of interest is so keen that groups not merely compete for the same scarce goals but seek to injure or even destroy each other, there is conflict...*".

Adapun menurut Nasdian (2014), konflik adalah benturan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih, karena adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan dan kelangkaan sumberdaya. Sementara itu, menurut Kinseng (2013), konflik adalah relasi sosial antar aktor sosial yang ditandai oleh pertentangan atau perselisihan dan kemarahan, baik dinyatakan secara terbuka ataupun tidak, dalam rangka mencapai keinginan atau tujuan masing-masing.

Dalam sebuah konflik terdapat persaingan di dalamnya, persaingan adalah situasi ketika orang menganggap diri mereka memiliki tujuan atau tujuan yang tidak sesuai, sehingga keberhasilan satu pihak berarti kegagalan pihak lain (Wiggins et al. 1994). Dari pengertian-pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa konflik adalah perselisihan atau persaingan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih dalam mencapai suatu tujuan, baik status, kekuasaan ataupun klaim sumber daya secara terbuka atau tidak.

Konflik acapkali diasosiasikan dengan hal negatif, padahal konflik bukanlah hal yang bisa dihindarkan tetapi harus dikelola dan menjadi bekal untuk perubahan dan pertumbuhan komunitas ke arah yang lebih baik. Sejalan dengan itu, pernyataan Simmel yang dikutip Coser (1964), konflik luar akan memperkuat kohesi internal kelompok dan meningkatkan sentralisasi. Kinseng (2013), menyatakan bahwa konflik juga bisa digolongkan berdasarkan akibat atau dampaknya. Berdasarkan akibat atau dampaknya, ada dua jenis konflik yakni konflik konstruktif dan destruktif.

Untuk memahami konflik yang terjadi, Fisher et al. (2001) mengemukakan empat teori penyebab terjadinya konflik, yakni: 1) Teori Hubungan Masyarakat, yang menganggap konflik terjadi karena polarisasi yang menyebabkan ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu



masyarakat, 2) Teori Negosiasi Prinsip, menganggap bahwa konflik dikarenakan adanya posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak yang sedang berkonflik, 3) Teori Kebutuhan Manusia, yang menganggap bahwa konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental, dan sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi, 4) Teori Identitas, yang menganggap konflik disebabkan identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan, 5) Teori Kesalahpahaman Antarbudaya, yang beranggapan bahwa konflik disebabkan karena ketidakcocokan dalam cara berkomunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda, 6) Teori Transformasi Konflik, beranggapan bahwa konflik disebabkan oleh adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul dalam masalah sosial, budaya, dan ekonomi.

Fisher et al. (2001) memandang bahwa analisis konflik sebagai suatu proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang. Pemahaman ini membentuk dasar untuk mengembangkan strategi dan merencanakan tindakan. Untuk mendalami dan menganalisis konflik yang terjadi, Fisher et al. (2001) memperkenalkan tahapan-tahapan konflik, yakni: 1) Prakonflik: merupakan periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi, 2) Konfrontasi: pada tahap ini konflik semakin terbuka, 3) Krisis: merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan atau kekerasan terjadi, 4) Akibat: kedua belah pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. 5) Pasca Konflik: akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal di antara kedua pihak.

Alat bantu untuk menganalisis konflik dalam penelitian ini akan menggunakan pohon konflik. Pohon konflik menyajikan suatu metode bagi suatu tim, organisasi, kelompok, atau masyarakat untuk mengidentifikasi isu-isu yang masing-masing dipandang penting dan selanjutnya dipisahkan ke dalam tiga kategori yakni: 1) masalah-masalah inti, 2) penyebabnya dan 3) berbagai efeknya (Fisher et al., 2001). Selain pohon konflik, dalam menganalisis konflik pada penelitian ini akan dilakukan pemetaan konflik. Pemetaan konflik merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Pemetaan konflik dilakukan 1) untuk lebih memahami situasi dengan baik, 2) untuk melihat hubungan di antara berbagai pihak secara lebih jelas, 3) untuk menjelaskan di mana letak kekuasaan, 4) untuk memeriksa keseimbangan masing-masing kegiatan atau reaksi, 5) untuk melihat para sekutu atau sekutu yang potensial berada di mana, 6) untuk mengidentifikasi mulainya intervensi atau tindakan, 7) untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan.

Setelah menganalisis konflik, maka diperlukan pengelolaan konflik. Istilah pengelolaan konflik (*conflict management*) dengan resolusi atau penyelesaian konflik (*conflict resolution*) mempunyai arti yang berbeda. Engel dan Korf (2005) menyatakan bahwa “*Conflict management is the practice of identifying and handling conflicts in a sensible, fair and efficient manner that prevents them from escalating out of control and becoming violent*”. Tokoh Teori konflik, Ralf Dahrendorf, menolak penggunaan istilah “resolusi konflik”, karena istilah itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

memberi pengertian bahwa seolah-olah konflik itu bisa dihilangkan secara menyeluruh (tuntas). Dahrendorf menawarkan istilah “*regulation*” atau “pengaturan” konflik sosial. Engel dan Korf menjelaskan ragam pengelolaan konflik berupa kontinum mulai dari *avoidance* (menghindar) pada ekstrim yang satu hingga *physical violence* (kekerasan fisik) pada ekstrim yang lain. Adapun beragam pemilihan pengelolaan konflik tersebut sebagai berikut;

- *Avoidance* (menghindar): tindakan yang mencegah atau menghindari terjadinya konflik.
- *Negotiation* (negosiasi): proses tawar-menawar yang dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan melalui consensus (keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak).
- *Mediation* (mediasi): menggunakan pihak ketiga untuk memfasilitasi proses negosiasi. Pihak mediator tidak memiliki otoritas untuk memaksakan keputusan.
- *Arbitration* (arbitrasi): menyerahkan penyelesaian konflik kepada pihak ketiga, yang akan membuat keputusan bagi pihak yang berkonflik, meski seringkali tidak bersifat mengikat.
- *Adjudication* (adjudikasi): bersandar pada keputusan hakim atau administrator untuk membuat keputusan yang mengikat.
- Pengelolaan konflik bergerak keluar hukum (*extralegal*) ketika ia tidak bersandar pada proses yang disyaratkan atau diterima secara sosial. Pendekatan *extralegal* mencakup proses koersif (pemaksaan) untuk membujuk atau memaksa pihak lawan untuk taat atau menyerah.
- *Non-violent directive action* (tindakan “pemaksaan” tanpa kekerasan) terjadi ketika satu pihak memaksa pihak lain untuk memberi konsesi dengan cara menolak bekerjasama atau dengan melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Hal ini mungkin dilakukan ketika pihak-pihak yang berkonflik saling tergantung satu sama lain bagi kesejahteraan dan penghidupannya.
- *Violence or physical coercion* (kekerasan fisik) artinya satu pihak mengancam atau menggunakan kekuatan untuk memaksa keinginannya kepada pihak lain. *Coercion* (koersi) berarti satu pihak dipaksa untuk menerima hasil yang dipaksakan oleh pihak lain.

Selain pendekatan pengelolaan konflik di atas, Engel dan Korf (2005) menyatakan bahwa ada sistem pengelolaan konflik lain yang melibatkan pihak ketiga, antara lain sistem adat, sistem hukum nasional dan metode kolaboratif pengelolaan konflik alternatif (*Alternative Conflict Management/ACM*). Metode pengelolaan konflik ini berbeda dalam pendekatan yang diterapkan dan kapasitas pemaksaan (*enforcement*) yang dimiliki oleh pihak ketiga untuk membuat pihak-pihak yang berkonflik mematuhi penyelesaian yang dibuat (Engel dan Korf 2005).

2.1.2 Konsep *Stakeholder* dan *Analisis Stakeholder*

Dalam pengelolaan pariwisata ini melibatkan banyak pihak yang berkepentingan yang dikenal dengan istilah *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Menurut Freeman (1984), *stakeholder* merupakan kelompok dan individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program. Sementara menurut Groenandijk (2003) *stakeholder* adalah keseluruhan aktor atau kelompok yang mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan, dan penerapan sebuah proyek (Groenendijk 2003).

Sementara itu, menurut Donaldson et al. (1995), *stakeholder* adalah suatu kelompok atau perorangan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian suatu tujuan perusahaan.

Clarkson (1995) menyebutkan bahwa *stakeholder* terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder, yang didalamnya juga terdapat *stakeholder* kunci. *Stakeholder* primer atau *stakeholder* utama merupakan pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung, dimana tanpa keterlibatannya maka organisasi atau kegiatan yang dilaksanakan akan terganggu. *Stakeholder* sekunder merupakan pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi tetapi tidak terlibat langsung dalam organisasi atau kegiatan (Clarkson 1995).

Adapun analisis *stakeholder* merujuk pada Grimble dan Chan (2005) adalah pendekatan dan prosedur untuk memahami suatu sistem dan cara mengidentifikasi aktor-aktor kunci atau *stakeholder* kunci di dalam sistem, dan untuk menilai kepentingan masing-masing di dalam sistem tersebut. Merujuk pada teori *stakeholder salience* (Mitchell, 1997) atribut-atribut yang membedakan satu *stakeholder* dengan yang lainnya ada tiga atribut, yaitu: 1) Power, 2) Legitimasi, dan 3) Urgensi.

Menurut Wiryawan (2013), analisis *stakeholder* bermanfaat untuk menilai para pemangku kepentingan, jenis, tingkatan, atribut, tipologi dan tingkat partisipasinya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keberadaan tingkat pemangku kepentingan dan program yang akan dijalankan. Analisis *stakeholder* juga dapat menyusun rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan untuk menentukan strategi yang berhubungan dengan *stakeholder*; misalnya strategi komunikasi, strategi peningkatan partisipasi dan lain sebagainya.

2.1.3 Konsep Komunitas dan Pariwisata Berbasis Komunitas

Menurut Soekanto (1982), masyarakat setempat (komunitas) adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu. Adapun, menurut Christenson et al. (1989), *community is defined as people that live within a geographically bounded area who are involved in social interaction and have one or more psychological ties with each other and with the place in which they live*". Sementara menurut Korten (1988), komunitas adalah kumpulan individu manusia yang terhimpun dalam sistem-sistem swaorganisasi yang dikembangkan di sekitar satuan-satuan organisasi berskala manusia dan komunitas-komunitas swadaya.

Adapun menurut Jim Ife (2016), komunitas adalah warga setempat yang dapat dibedakan dari masyarakat lebih luas (*society*) melalui kepentingan bersama (*a community of interest*) atau tingkat interaksi yang tinggi, para anggota komunitas mempunyai kebutuhan bersama (*common needs*). Selanjutnya, menurut Ronda Philips (2009), komunitas didasarkan pada tempat tinggal (*communities of place*) atau kumpulan individu (*a collection of individuals*) dengan kepentingan bersama baik dalam jarak dekat atau terpisah (*communities of interest*).

Menurut Nasdian (2014), komunitas adalah suatu kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (*communities of common interest*), baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial.

Konsep wisata yang sesuai dikembangkan saat ini adalah pariwisata yang berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*), yakni wisata yang

dikembangkan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keselarasan antar kepentingan *stakeholder* pembangunan pariwisata termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sederhananya konsep wisata ini menekankan pembangunan pariwisata “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”.

Suansri (2003), *Community Based Tourism* adalah pariwisata yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan, sosial dan budaya, yang dikelola dan dimiliki oleh komunitas, untuk komunitas, dengan tujuan memungkinkan pengunjung meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang komunitas dan cara hidup lokal. Suansri (2003) menyebutkan beberapa prinsip dari CBT yang harus dilakukan yaitu: 1) mengenali, mendukung dan mempromosikan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata, 2) melibatkan anggota masyarakat dari setiap tahap pengembangan pariwisata dalam berbagai aspeknya, 3) mempromosikan kebanggaan terhadap komunitas bersangkutan, 4) meningkatkan kualitas kehidupan, 5) menjamin keberlanjutan lingkungan, 6) melindungi ciri khas (keunikan) dan budaya masyarakat lokal, 7) mengembangkan pembelajaran lintas budaya, 8) menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia, 9) mendistribusikan keuntungan dan manfaat yang diperoleh secara proporsional kepada anggota masyarakat, 10) memberikan kontribusi dengan persentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh untuk pengembangan masyarakat, dan 11) menonjolkan keaslian hubungan masyarakat dengan lingkungannya.

Community Based Tourism dapat membantu masyarakat lokal dalam menghasilkan pendapatan, mendiversifikasi ekonomi lokal, melestarikan budaya, melestarikan lingkungan dan menyediakan peluang pendidikan. CBT di pahami untuk dikelola dan dimiliki oleh masyarakat dan untuk masyarakat (Purbasari dan Manaf 2018).

Desa Wisata Bangun merupakan desa wisata rintisan yang masuk dalam kategori desa wisata berpotensi yang masyarakatnya memiliki antusias tinggi dalam mengelola daya tarik wisata yang ada di dalamnya. Konsep CBT (*Community Based Tourism*) yang diterapkan untuk mencapai pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan diaplikasikan dalam bentuk partisipasi masyarakat lokal, pembentukan kelembagaan desa wisata, pengelolaan daya tarik wisata berwawasan lingkungan dan terciptanya kegiatan usaha masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun muncul dari inisiatif masyarakat lokal, masyarakat menyepakati pembentukan lembaga desa wisata, pembuatan program prioritas pengelolaan Air Terjun Wonoasri sebagai daya tarik utama dan munculnya kegiatan usaha masyarakat sebagai dampak dari pengelolaan daya tarik wisata (Rizkianto dan Topowijono 2018).

Wisata Goa Pindul merupakan ikon Desa Bejiharjo yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk hadir dan merasakan atraksi wisata Goa Pindul. Peningkatan wisatawan Goa Pindul memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan wisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sesuai dengan konsep *Community Based Tourism* (CBT). Pengelolaan Goa Pindul sepenuhnya dikelola oleh masyarakat yang membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis). Banyaknya pokdarwis yang terlibat dalam pemanfaatan menjadikan objek wisata Goa Pindul rawan terjadi konflik kepentingan dan berpotensi merusak kelestarian akibat penumpukan pengunjung sehingga pengelolaan yang baik diperlukan agar wisata Goa Pindul dapat berkelanjutan (Hanifah 2018).



Potensi pariwisata yang dikembangkan sebagai model pengembangan CBT di Kabupaten Kulonprogo dapat dikelompokkan dalam: (1) Wisata sosial-budaya; untuk pengembangan wilayah Kulonprogo Tengah dan Selatan; (2) Wisata pertanian; untuk pengembangan wilayah Kulonprogo Utara dan Tengah; dan (3) Wisata alam dan lingkungan; untuk pengembangan wilayah Kulonprogo Utara khususnya di perbukitan Menoreh dan pantai selatan. Jenis pariwisata tersebut akan melibatkan partisipasi masyarakat baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pendukung pariwisata. Kegiatan pariwisata di atas juga dapat membangun jiwa kewirausahaan dan kreativitas masyarakat sehingga akan terjadi *multiplier effects* yang dapat menyejahterakan masyarakat apabila dikelola dengan baik.

Namun demikian, dalam pengembangan pariwisata dan khususnya CBT, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu: (1) sumber dana yang tidak mencukupi, (2) kurangnya jumlah sumber daya manusia di bidang pengembangan pariwisata, (3) kekurangsiapan masyarakat dalam menyikapi pentingnya pengembangan pariwisata disebabkan mayoritas masyarakat yang hidup sebagai petani cenderung apatis dan kurang sadar akan hal tersebut. Akibatnya, inovasi dan kreasi dari pihak masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata tidak dapat optimal, (4) dukungan dari pihak swasta atau pengusaha wisata juga masih minim, khususnya investor yang mau untuk turut mengembangkan potensi CBT.

Pengembangan CBT di Kabupaten Kulon Progo akan bermanfaat dalam menciptakan kesempatan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, pelestarian lingkungan dan budaya setempat sehingga akan dapat memberdayakan ekonomi masyarakat. Model pengembangan CBT sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Kulonprogo dirumuskan dengan berdasarkan pertimbangan potensi dan permasalahan yang ada.

Model pengembangan CBT tersebut akan berhasil apabila semua komponen tersedia dan mendapat dukungan dari *stakeholder*. Dukungan tersebut berupa keberpihakan dalam bentuk program dan regulasi, modal usaha, kemitraan, maupun keterlibatan masyarakat dan infrastruktur. Dalam pengembangan CBT terdapat beberapa saran yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yaitu: (1) Peningkatan partisipasi seluruh *stakeholder* termasuk masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata di Kulon Progo. (2) Peningkatan anggaran guna pengembangan pariwisata melalui kegiatan-kegiatan kreatif dan inovatif dengan tetap memperhatikan karakteristik wilayah. (3) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pendukung sektor pariwisata. (4) Peningkatan upaya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan pariwisata melalui pelatihan dan *workshop*. (5) Model pengembangan CBT yang telah dirumuskan perlu segera diimplementasikan dan didesiminasikan, mengingat saat ini Kabupaten Kulon Progo sudah memetakan pengembangan wilayah pariwisata mulai dari perbukitan Menoreh sampai dengan pantai selatan. Jenis pariwisata tersebut akan melibatkan partisipasi masyarakat baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pendukung pariwisata (Rahayu *et al.* 2016).

2.1.4 Konsep Wisata Desa

Lane (1994) mendefinisikan pariwisata pedesaan sebagai pariwisata yang terjadi di daerah pedesaan, yang ditandai dengan kepadatan populasi rendah dan ruang terbuka; pemukiman skala kecil dengan umumnya kurang dari 10.000 penduduk dan penggunaan lahan didominasi oleh pertanian, kehutanan dan area

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

alami. Menurut Lane (1994) daerah pedesaan yang dekat dengan daerah perkotaan kemungkinan besar akan menampilkan beberapa tren perkotaan, sedangkan daerah pedesaan pinggiran sambil menarik wisatawan tingkat bawah dapat menawarkan lebih banyak peluang untuk kegiatan pariwisata yang lebih spesifik di pedesaan (Lane 1994).

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan mendefinisikan pariwisata pedesaan sebagai "pariwisata yang terjadi di pedesaan" (Situmorang *et al.* 2019). Begitu pula pariwisata pedesaan telah diberikan kesempatan untuk mempromosikan kewirausahaan sosial dengan menciptakan penggabungan sumber daya yang ada untuk dikembangkan produk baru dan untuk melayani pelanggan baru dan pasar yang berbeda (Sutiarani dan Rahmafritria 2016). Wisata pedesaan dianggap sebagai daya tarik dalam destinasi yang secara signifikan merangsang pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk komunitas lokal (Situmorang *et al.* 2019).

Komunitas lokal adalah *stakeholder* penting dalam pariwisata pedesaan. Namun strategi *positioning* pariwisata pedesaan telah dikembangkan dari perspektif tunggal *stakeholder* wisatawan, dan telah mengabaikan perspektif masyarakat setempat. Penting untuk memasukkan perspektif masyarakat karena pariwisata pedesaan tidak dapat berhasil tanpa dukungan masyarakat (Falak *et al.* 2014).

Desa wisata berfungsi sebagai model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Sebagai tambahannya mengembangkan masyarakat secara umum, ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata daerah pedesaan adalah dampak dari perubahan minat wisatawan ke daerah turis tujuan. Tren yang berkembang dan motivasi perjalanan wisata khusus untuk kembali ke alam untuk berinteraksi dengan komunitas lokal dan minat untuk mempelajari keunikan budaya lokal mendorong pengembangan pariwisata di daerah pedesaan (Asmaniati *et al.* 2017).

Pariwisata pernah dipromosikan sebagai kegiatan ekonomi yang bersih dan tidak berbahaya, bebas dampak lingkungan yang dikaitkan dengan pembuatan, penambangan, penebangan dan agribisnis intensif. Sejak tahun 1970-an, pandangan pariwisata yang ramah ini telah semakin dipertanyakan. Karena permasalahan tersebut lahirlah konsep pariwisata berkelanjutan (Lane, 1994).

Topik pembangunan berkelanjutan telah menjadi bidang penelitian yang semakin populer sejak akhir 1980-an, sebagai hasil dari laporan *Our Common Future* (1987), yang menunjukkan kepuasan kebutuhan generasi saat ini tanpa mempengaruhi generasi masa depan. Pariwisata pedesaan telah diidentifikasi berpotensi berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan, menjamin kepuasan semua pemangku kepentingan, baik dari sisi permintaan dan penawaran, tanpa membahayakan sumber daya alam, budaya dan sosial (Eusébio *et al.* 2014).

Pariwisata dapat dianggap sebagai alat pembangunan di mana prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan harus digunakan. Saat ini, setelah publikasi Komisi Brundtland "*Report Our Common Future*" pada tahun 1987 (WCED, 1987), gagasan keberlanjutan tersebar luas, juga sedang dipindahkan ke pariwisata (Saarinen 2006).

2.1.5 Dampak Pariwisata terhadap Aspek Ekonomi Komunitas

Adapun kajian di tingkat komunitas tentang pengaruh ekowisata terhadap kehidupan ekonomi komunitas yakni pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Kampung Batusuhunan memberikan perubahan berupa pengaruh



yang positif bagi masyarakat Batusuhunan khususnya pada aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Pada aspek ekologi, perubahan masyarakat semenjak adanya ekowisata adalah kesadaran untuk menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempat sampah khusus dan mulai melakukan gaya hidup ramah lingkungan. Pada aspek ekonomi, peluang pekerjaan yang diperoleh dari sektor ekowisata dapat menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga. Peningkatan pendapatan digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan (Hijriati dan Mardiana 2015).

Pengembangan Desa Wisata Wonolopo cukup memberi manfaat di bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan. Di bidang sosial, potensi kesenian semakin dilestarikan dan menjadi kekhasan lokal, adanya peningkatan keterampilan yang dimiliki masyarakat dan partisipasi masyarakat meningkat. Di bidang ekonomi, potensi lokal yang awalnya tidak dimanfaatkan kini dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat dan peluang usaha bagi masyarakat semakin tinggi. Di bidang lingkungan, keberadaan desa wisata mendorong peningkatan kondisi infrastruktur dan aksesibilitas (Fitari dan Ma'rif 2017).

Konsep pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk mempertahankan keberadaan kehidupan pedesaan dalam kegiatan pariwisata. Pendekatannya memandang berbagai aspek, seperti lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Faktor kunci harus dipertimbangkan dalam membuat keterlibatan antara pemerintah daerah, investor, dan masyarakat di Pancasari dalam mengembangkan tujuan wisata pedesaan yang berkelanjutan. Kearifan lokal adalah faktor kunci yang secara dominan terpengaruh dalam mempertahankan keberadaan kehidupan pedesaan dalam kehidupan pariwisata di Pancasari (Dewi 2014).

Adanya hubungan jangka panjang antara pendapatan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi antara tahun 1997 dan 2012 dianalisis untuk 34 negara OECD menggunakan tes kointegrasi panel. Tes kointegrasi Pedroni dan Kao digunakan untuk tujuan ini. Berdasarkan hasil analisis kointegrasi panel, ditemukan bahwa peningkatan pendapatan pariwisata memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (GOVDELI dan DIREKCI 2017).

Hubungan antara pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di India dengan mempertimbangkan kepentingan relatif dari perkembangan keuangan selama periode 1960-2014. Hasil tes pendekatan pemodelan ARDL bersama Bayer dan Hanck (2013) yang baru dikembangkan menunjukkan bahwa pariwisata, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan keuangan terintegrasi. Terlihat bahwa pariwisata pasti akan memacu pertumbuhan ekonomi di India baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Selain itu, analisis menunjukkan keberadaan jangka panjang, arah satu arah aliran Granger dari pariwisata ke pertumbuhan ekonomi. Disarankan bahwa kebijakan untuk menarik lebih banyak wisatawan internasional harus dipromosikan (Ohlan 2017).

Pertumbuhan pariwisata yang fenomenal merupakan salah satu penggerak sosio-ekonomi di seluruh dunia. Selain itu, pariwisata juga memberi dampak pada pembangunan dunia, kemakmuran dan kesejahteraan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pariwisata perlu dijaga keberlangungannya. Pariwisata berkelanjutan merupakan pariwisata yang menghormati penduduk setempat dan wisatawan lain, warisan budaya dan lingkungan. Terdapat 3 (tiga) pilar yang harus diseimbangkan agar pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat berlangsung dalam jangka panjang yaitu pilar sosial (*community*), pilar lingkungan (*environment*) dan pilar ekonomi (*economy*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

Pilar pertama yaitu keberlanjutan sosial mengacu pada isu kesejahteraan masyarakat, aset budaya, partisipasi masyarakat dan kepuasan wisatawan. Pembangunan pariwisata harus memperhatikan kelestarian situs budaya, situs sejarah dan bangunan warisan sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat sekitar. Serbuan wisatawan dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan sosial di sekitar destinasi. Pembangunan berlebihan dapat menyebabkan antipati atau penolakan penduduk setempat terhadap pariwisata. Pilar kedua yaitu lingkungan sebagai atraksi utama bagi wisatawan. Tidak dapat dipungkiri fakta bahwa aktivitas pariwisata berkontribusi terhadap produksi CO₂. Misalnya, kapal pesiar setidaknya menghasilkan 17% dari total emisi nitrogen oksida, belum termasuk aliran limbah yang dihasilkan. Pilar ketiga yaitu ekonomi berkelanjutan dimana pariwisata memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat, pendistribusian yang adil, kesempatan kerja dan peluang penghasilan. Faktor kunci keberlanjutan ekonomi antara lain peningkatan standar hidup, ketersediaan waktu rekreasi, pembangunan dan kemakmuran ekonomi, serta stabilitas politik (<http://www.kememparekraf.go.id/post/rencana-strategis-2018-2019-kementerian-pariwisata>).

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Ulfah (2007) tentang Identifikasi Konflik Dalam Pengelolaan Wisata Di Kawasan Gunung Salak Endah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di antara *stakeholder* dalam pengelolaan maupun pemanfaatan lahan di GSE menjadi kawasan wisata berdasarkan wujud konflik termasuk dalam konflik tertutup dan mencuat ditandai dengan adanya perselisihan di antara *stakeholder* namun belum ada proses penyelesaian. Isu konflik yang menjadi masalah inti dari konflik pengelolaan wisata di GSE adalah ketidakjelasan status pengelolaan dan lemahnya koordinasi antar *stakeholder*. *Stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang sama tinggi adalah TNGHS, Perum Perhutani, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan Pamijahan, Desa Gunungsari, masyarakat Veteran, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan wisata di GSE.

Adapun hasil penelitian Fitriyana (2016) tentang Konflik Pengelolaan Ekowisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Taman Ir. H. Djuanda Bandung, Jawa Barat, menunjukkan bahwa faktor penyebab konflik adalah perbedaan kebijakan antara pengelola sebelumnya dengan sekarang, seringnya berganti kepemimpinan, kurangnya sosialisasi program pemberdayaan kepada masyarakat, faktor pendidikan masyarakat yang rendah, pola pikir masyarakat untuk jangka pendek, hal tersebut mengakibatkan kesenjangan sosial. Implikasi pemberdayaan bersifat negatif dan positif. Implikasi negatif bagi pengelola meliputi penurunan jumlah wisatawan, penurunan kualitas lingkungan, dan kesenjangan sosial, sedangkan implikasi positif bagi pengelola adalah tumbuhnya kesadaran para pengelola terhadap pelestarian lingkungan. Implikasi bagi masyarakat meliputi penurunan pendapatan masyarakat akibat dari menurunnya jumlah wisatawan. Hal ini terjadi karena masyarakat hanya menggantungkan hidupnya pada Taman Djuanda (Fitriyana 2016).

Penelitian lainnya tentang konflik dilakukan oleh Sari (2017) di Wakatobi, tentang Konflik Kepentingan Dalam Pengembangan Pariwisata: Kasus Pulau Kapota, Wakatobi, Sulawesi Tenggara hasilnya menunjukkan bahwa konflik yang alot dari kedua instansi negara menggambarkan persaingan yang begitu sengit di antara dua kubu karena mereka melihat Kapota sebagai berlian yang belum diasah



keindahannya dan akan memberikan keuntungan yang sangat besar jika mereka berhasil mengelolanya. Selain itu, konflik kedua instansi ini juga bisa dilihat sebagai perebutan ego. Taman Nasional merasa menjadi penguasa sejak awal dan merasa terganggu dengan kehadiran Dinas Pariwisata yang mengganggu kepentingannya. Begitu juga dengan Dinas Pariwisata yang merasa bahwa wilayah pariwisata adalah bagian dari tugas mereka dan tidak suka jika wilayah kerjanya diserobot oleh pihak lain. Konflik kepentingan inilah yang sebenarnya mengganggu desain pariwisata yang akan diterapkan di Pulau Kapota. Pariwisata yang dianggap mampu untuk mensejahterakan masyarakat, telah berubah menjadi arena politik di mana setiap orang ingin memperebutkannya. Tujuan baik membangun pariwisata di pulau Kapota pun gagal diwujudkan (Sari *et al.* 2017).

Selanjutnya penelitian oleh Afala (2017) tentang konflik yang terjadi di wisata Goa Pindul, menunjukkan bahwa Konflik yang terjadi di daerah wisata Goa Pindul merupakan salah satu fenomena politik lokal di sektor pariwisata. Dinamika konflik di daerah wisata Goa Pindul telah menunjukkan adanya eskalasi konflik, fenomena ini bisa dilihat dari keterlibatan banyak aktor-aktor yang berkonflik, seperti para pokdarwis, pemerintah, masyarakat lokal, dan kepentingan personal. Perseteruan ini pada fase pertama berlangsung melalui proses *framing* melalui kehadiran klaim kepemilikan dan klaim pemberdayaan, yaitu antara pihak Damayanti dan Pokdarwis. Fase kedua, klaim meluas tidak hanya dua pihak tersebut, tapi juga melibatkan pemerintah daerah, pokdarwis baru (*beginner*), dan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata Goa Pindul. Pada titik ini, konflik mengalami eskalasi yang meluas dalam upaya mereka untuk memperoleh hak atas pengelolaan. *Gap* sosial yaitu kecemburuan sosial dan mekanisme penyelesaian konflik pengelolaan menjadi faktor lain yang ikut memicu dinamika dan eskalasi konflik. Dengan demikian, dari episode dan dinamika konflik yang terjadi di daerah wisata Goa Pindul tersebut, menjelaskan bahwa politik perseteruan (*contentious politics*) di sektor pariwisata tidak hanya dipahami sebagai masalah tunggal, tapi konflik tersebut merupakan pertautan kompleksitas masalah dari berbagai aktor, sektor, mekanisme dan proses (Afala 2017).

Berikutnya hasil penelitian Yachya (2016) tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis CBT (*Community Based Tourism*) (Studi pada Kawasan Wisata Pantai Clungup Kabupaten Malang) menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan wisata Pantai Clungup di Kabupaten Malang, berdampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilihat dari dimensi ekonomi yang indikatornya adalah adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan kerja baru, adanya penghasilan bagi masyarakat sekitar, dan pembagian keuntungan yang merata kepada setiap anggota kelompok. Keempat indikator berjalan di kawasan wisata Pantai Clungup sehingga masyarakat mendapatkan manfaat secara ekonomi dengan adanya pengelolaan kawasan wisata Pantai Clungup. Dengan pengelolaan kawasan wisata berbasis CBT masyarakat cenderung memperoleh manfaat secara langsung dari segi ekonomi. Terdapat faktor penghambat dalam pengelolaan kawasan wisata Pantai Clungup berbasis CBT. Adapun Faktor penghambat dalam implementasi pengelolaan tersebut dari internal maupun external. Faktor penghambat dari internal adalah minimnya pengetahuan SDM sehingga tidak mudah menerima masukan dan kurang pahamnya kualitas SDM terkait pengelolaan kawasan wisata yang baik dan benar, serta adanya anggota kelompok yang kurang disiplin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

Sedangkan faktor penghambat dari external adalah masih tingginya egoisitas masing-masing sektor, yang lebih mementingkan kepentingan golongan (sektor) dibandingkan kepentingan bersama dalam mengelola kawasan wisata Pantai Clungup. Ikut berperannya perhutani dalam pengelolaan kawasan wisata juga mempengaruhi terhadap berkurangnya pendapatan dari kelompok, hal ini dikarenakan perhutani meminta 70% dari pemasukan tiket, sehingga memaksa pengelola untuk mencari keuntungan diluar tiket (Yachya *et al.* 2016).

Selanjutnya hasil penelitian Ahsani tentang Penerapan Konsep *Community Based Tourism* (CBT) Di Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan Kemandirian Desa, menunjukkan bahwa dampak ekonomi penerapan konsep CBT di Desa Wisata Candirejo memberikan adanya diversifikasi pekerjaan yang meningkatkan penghasilan masyarakat, adanya perbaikan kondisi perumahan dan pengembangan usaha baru yang dilaksanakan masyarakat desa wisata Candirejo. Adapun dampak sosial dapat terlihat dari meningkatnya interaksi sosial dan partisipasi masyarakat, serta adanya perubahan pola pikir masyarakat akan pentingnya pendidikan serta pemberdayaan masyarakat, sedangkan dampak budaya barat dari warga asing ibarat dua keping mata uang namun memiliki sisi yang sama sehingga memberikan dampak positif berupa gaya hidup bersih. Selain itu kesenian tradisional Indonesia tetap terjaga kelestariaannya. Selanjutnya dampak lingkungan yang dapat dirasakan adalah peningkatan kualitas dan pengembangan fasilitas publik dengan bantuan dana dari Koperasi Desa Wisata Candirejo berupa donasi untuk desa. Terpenuhinya Indikator Kemandirian Desa, bukan berarti penyelenggaraan pembangunan yang ada di Desa Candirejo tanpa sentuhan tangan Pemerintah. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terjadi peningkatan pendapatan (*income generating*), kegiatan kemasyarakatan, pembangunan fasilitas publik, dan kegiatan perekonomian yang ada bisa dipenuhi secara mandiri (Ahsani *et al.* 2018).

Penelitian selanjutnya oleh Taryana (2013) tentang Strategi Pengembangan di Desa Wisata Tamansari Kabupaten Bogor, hasilnya menunjukkan bahwa Desa Tamansari mempunyai daya tarik wisata yang baik. Peran masyarakat di Desa Tamansari dilakukan dengan menyediakan *homestay*, pemandu wisata, usaha kerajinan dan pelaku seni. Partisipasi lainnya adalah masyarakat menyediakan makan minum di lokasi daya tarik wisata seperti di Curug Nangka, Bumi perkemahan Sukamantri dan Pura Parahyangan Agug Jagatkarta. Masyarakat juga sudah ada yang mengelola Setu Tamansari menjadi obyek wisata dengan menyediakan rakit bambu, pemancingan, sepeda air. Pada acara budaya juga masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan upacara seren taun yang diselenggarakan di Kampung Budaya Sindang Barang. Adapun hasil analisis SWOT yang diperoleh yaitu faktor internal yakni kekuatan (memiliki daya tarik wisata yang baik, masyarakat terbuka terhadap kegiatan wisata), kelemahan (kurangnya promosi dan pemasaran desa wisata, belum ada koordinasi para pihak, kesadaran SDM untuk melayani wisatawan masih lemah dan sarana prasarana penunjang belum ada). Faktor eksternal peluang (pasar wisatawan yang terbuka, sudah banyak pengunjung yang datang, aksesibilitas yang mudah), ancaman (tidak ada kejelasan kebijakan tata ruang, adanya pengaruh budaya asing terhadap budaya masyarakat dan adanya citra negatif dalam kegiatan wisata). Strategi yang dipilih yaitu Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi Desa Wisata, menyusun paket wisata dan bekerjasama

dengan pihak luar serta pemerintah membuat perencanaan pengembangan Desa Wisata.

Berikutnya hasil penelitian Languha (2011) tentang Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di kawasan wisata pantai Tanjung Karang Pusementasi Donggala, menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki pandangan yang positif tentang kegiatan pariwisata. Hal tersebut diindikasikan oleh sebagian besar masyarakat lokal (61,43 %), yang menyatakan bahwa kegiatan pariwisata dapat memberikan manfaat bagi mereka. Masyarakat lokal berkeinginan untuk terlibat secara penuh dalam kegiatan pariwisata yang mencakup aspek perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi kegiatan pariwisata yang berlangsung di wilayah ini. Masyarakat memiliki kearifan dalam pemanfaatan sumberdaya alam baik untuk kepentingan pertanian maupun perikanan, di antaranya dalam pemilihan lokasi yang tepat untuk usaha tani (*tompepoyu*) dan pemberian waktu jeda terhadap pemanfaatan sumber daya alam (*tombo*). Disamping itu, mereka juga memiliki kegiatan dan produk budaya yang dapat dijadikan sebagai atraksi wisata. Faktor yang mendukung penerapan konsep pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat adalah dukungan kebijakan pemerintah yang menjadikan pariwisata sebagai bagian dari aktifitas masyarakat dan mengembangkannya dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pihak pengusaha wisata berpandangan bahwa selama ini mereka telah melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja, dan mendorong masyarakat untuk melindungi potensi alam dan budaya sebagai daya tarik wisata. Sementara itu, kelompok dan lembaga swadaya masyarakat berpandangan bahwa diperlukan suatu bentuk pengelolaan bersama antar semua pihak yang berkepentingan di kawasan wisata ini.

Selanjutnya hasil penelitian Yustisi (2018) tentang Analisis Stakeholder Dalam Pengelolaan Objek Wisata Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan bahwa stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Kecamatan Pemenang, Pemerintah Desa Gili Indah, Koperasi Karya Bahari, Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan (Hotel, Bungalow, Dive Shop, Restoran), Gili Ecotrust, Karang Taruna, Yayasan Pemerhati Penyu, Kelompok Buruh, dan Koperasi Janur Indah. Hubungan antar stakeholder dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan belum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari empat aspek, pertama dilihat dari komunikasi yang tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan konflik di antara para *stakeholder*. Kedua, Kerjasama tidak dilakukan antar ketiga sektor (pemerintah, swasta, dan masyarakat), selain itu juga kerjasama yang dilakukan hanya dalam bentuk kegiatan semata yang tidak mempunyai kekuatan hukum secara tertulis. Ketiga, dilihat dari aspek koordinasi yang terjadi hanya ketika akan dilakukannya kegiatan atau dijalankannya sebuah kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dan hanya ditentukan oleh para ahli saja (pemerintah). Keempat, kolaborasi yang dilakukan hanya terkait dengan kegiatan atau *event-event* pariwisata dan promosi pariwisata, kolaborasi yang dilakukan ini juga hanya melibatkan dua sektor yakni pemerintah dan swasta (Yustisi 2018).

Penelitian Garsetiasih (2015) menunjukkan bahwa keluarnya banteng dari kawasan Taman Nasional serta adanya *enclave* menyebabkan konflik banteng dan masyarakat serta konflik masyarakat dan pengelola Taman Nasional. Untuk meminimalisir konflik antara banteng dan masyarakat sekitar Kawasan TN diperlukan pengelolaan secara kolaboratif dengan program kegiatan pengembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

peningkatan kualitas habitat, pengembangan penangkaran, pengembangan ekowisata dan pengembangan tanaman obat dan buah. *Stakeholder* kunci dan posisi dalam pemetaan pengaruh dan kepentingan *stakeholder* yang terkait langsung dengan konflik banteng yaitu Balai Taman Nasional Meru Betiri (BTNMB), Balai Taman Nasional Alas Purwo (BTNAP) sebagai *keyplayers*, Perkebunan Bandedalit (*context setter*), Perum Perhutani (*key player*), masyarakat sekitar kawasan (*subyek*), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KAIL di TNAP (*context setter*) sedangkan di TNMB LSM posisinya ada di *keyplayer*. Berdasarkan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) aktor yang paling berperan dalam konservasi banteng yaitu pengelola BTN, karena BTN mengelola TN yang merupakan ekosistem khusus sebagai habitat banteng. *Stakeholder* tidak terkait langsung dengan konflik tetapi dapat berkontribusi dalam kegiatan *co-management* untuk meningkatkan program kegiatan konservasi banteng yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata dan Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB). Prioritas program yang dapat dikolaborasikan dalam pengelolaan banteng di TN secara berurutan yaitu peningkatan kualitas habitat dengan tingkat kolaborasi instruktif (dengan strategi kegiatan pengamanan kawasan, pembinaan habitat, dan penyuluhan); pengembangan penangkaran tingkat kolaborasi kooperatif (dengan strategi kegiatan pemanfaatan sumber daya banteng, teknologi dan pasar, pembuatan demplot, kerjasama para pihak); pengembangan ekowisata tingkat kolaborasi pendampingan/advokatif (dengan strategi kegiatan pembangunan sarana prasarana, peningkatan pendanaan, koordinasi dan penyamaan persepsi); pengembangan tanaman obat dan buah tingkat kolaborasi kooperatif (dengan strategi kegiatan pemanfaatan SDA hayati, diversifikasi jenis tanaman, kerjasama para pihak) (Garsetiasih dan Alikodra 2015).

2.3 Kerangka Pemikiran

Pariwisata ini muncul atas usaha warga setempat, dalam pengelolaannya melibatkan banyak pihak yang berkepentingan dalam memajukan wisata ini dan konflik pun terjadi. Untuk memahami konflik yang terjadi di komunitas wisata Curug Cikuluwung maka akan dilakukan analisis konflik yang meliputi; identifikasi urutan kejadian konflik, identifikasi isu-isu konflik, pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik, identifikasi tahapan konflik yang terjadi, dan identifikasi akibat konflik serta merumuskan manajemen konflik secara partisipatif sebagai strategi penyelesaian konflik.

Identifikasi isu-isu konflik yang terjadi akan menggunakan alat analisis pohon konflik dari Fisher et al. (2001), yakni suatu alat bantu menggunakan gambar sebuah pohon untuk mengurutkan isu-isu pokok konflik. Dalam banyak konflik, ada banyak pendapat mengenai; apa masalah intinya? apa sebab-sebab awalnya? efek-efek apa yang muncul sebagai akibat masalah ini? isu apa yang paling penting diatasi? Analisis pohon konflik dipilih karena menyajikan suatu metode bagi suatu tim, organisasi, kelompok, atau masyarakat untuk mengidentifikasi isu-isu yang masing-masing dipandang penting dan selanjutnya dipisahkan ke dalam tiga kategori berikut: 1) masalah-masalah inti, 2) penyebabnya, 3) berbagai efeknya. Untuk menyusun pohon konflik ini diperlukan data-data penyebab konflik, masalah inti serta efek dari konflik tersebut.

Berikutnya pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik akan menggunakan analisis pemetaan konflik (*fish bone*) dari Fisher et al. (2001).

Pemetaan konflik merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Pemetaan konflik dilakukan 1) untuk lebih memahami situasi dengan baik, 2) untuk melihat hubungan di antara berbagai pihak secara lebih jelas, 3) untuk menjelaskan di mana letak kekuasaan, 4) untuk memeriksa keseimbangan masing-masing kegiatan atau reaksi, 5) untuk melihat para sekutu atau sekutu yang potensial berada di mana, 6) untuk mengidentifikasi mulainya intervensi atau tindakan, 7) untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan.

Sementara itu, untuk identifikasi tahapan konflik akan menggunakan alat analisis penahapan konflik dari Fisher et al. (2001). Menurut Fisher, konflik berubah setiap saat, melalui berbagai tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap ini penting sekali untuk diketahui dan digunakan bersama alat bantu lain untuk menganalisis berbagai dinamika dan kejadian yang berkaitan dengan masing-masing tahapan konflik. Analisis dasar terdiri dari lima tahap, yang pada umumnya disajikan secara berurutan (meskipun mungkin ada variasi-variasi dalam situasi khusus) dan mungkin berulang dalam siklus yang sama. Tahap-tahap ini meliputi: 1) Prakonflik, 2) Konfrontasi, 3) Krisis, 4) Akibat, serta 5) Pascakonflik.

Selanjutnya untuk identifikasi akibat konflik, akan menggunakan alat bantu analisis dari Lewis Coser yakni konflik konstruktif dan konflik destruktif. Konflik konstruktif adalah konflik yang “berfungsi positif”, sebaliknya konflik destruktif adalah konflik yang mengakibatkan kerusakan bahkan kehancuran, baik harta benda maupun jiwa manusia (Kinseng, 2013).

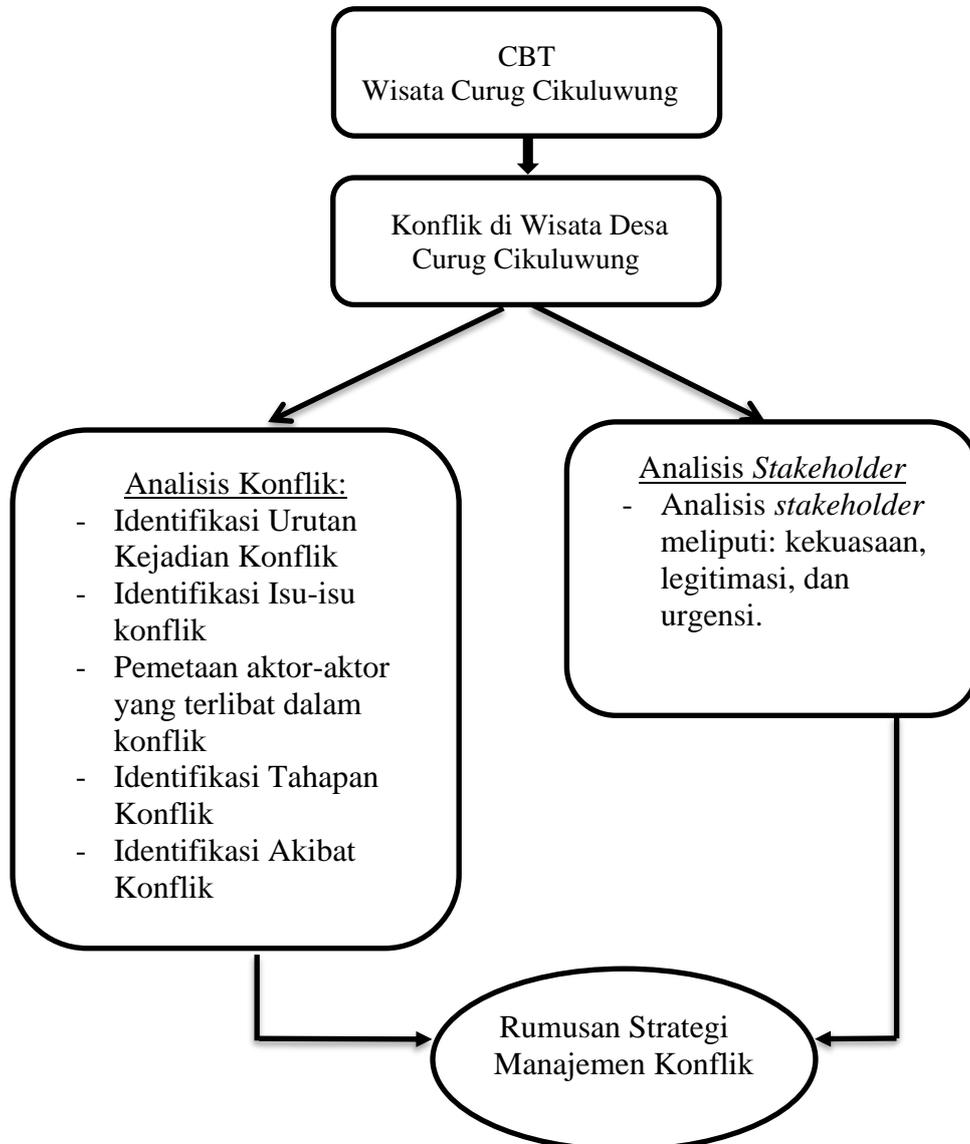
Sedangkan untuk analisis *stakeholder* yang terlibat dalam konflik akan menggunakan metode atau teori *stakeholder salience* (Mitchell et al. 1997) berdasarkan tiga atribut yakni: kekuasaan, legitimasi, dan urgensinya.

Dari analisis-analisis tersebut selanjutnya adalah merumuskan manajemen konflik sebagai strategi penyelesaian konflik. Menurut Fisher et al. (2001) analisis dapat mengungkapkan berbagai kemungkinan tindakan yang dapat dilakukan. Alat bantu untuk melakukan analisis mengungkapkan aspek-aspek masalah yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi. Untuk merumuskan strategi manajemen konflik akan menggunakan alat analisis dari Engel dan Korf (2005).

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

Kerangka pemikiran tersaji dalam bagan berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis konflik dan *stakeholder*. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses menyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, untuk memperoleh gambaran *holistic* lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah (Creswell, 2002).

Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial (Mulyana, 2004). Dalam pendekatan kualitatif peneliti berusaha untuk “mengerti” suatu realitas atau fakta sosial dalam pengembangan masyarakat. Dalam hal ini, studi kasus yang diteliti adalah manajemen konflik dalam pengembangan wisata Desa Cibitung Wetan.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* (sengaja) karena berdasarkan ketertarikan penulis akan pariwisata berbasis komunitas (*Community Based Tourism = CBT*) di mana lokasi wisata ini baru di temukan oleh komunitas. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari–Juni 2021 sedangkan pengumpulan data untuk pemetaan sosial sudah dilakukan pada tahun 2019.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik sebagai berikut:

1. **Studi Dokumentasi**, yaitu untuk mengumpulkan data sekunder khususnya data Monografi Desa Cibitung Wetan (2018), Kecamatan Pamijahan Dalam Angka (2014-2018), telaah laporan penelitian sebelumnya yang relevan.
2. **Pengamatan (Observasi)**, di mana pengkaji melakukan observasi langsung di lokasi kajian untuk melihat kondisi komunitas wisata desa dan aspek terkait lainnya.
3. **Wawancara mendalam (*in-depth interview*)**, yaitu untuk mengumpulkan data primer dengan informan Kepala Desa Cibitung Wetan, pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung (sekretaris dan bendahara), ketua BUMDes, pelopor/yang pertama melihat potensi wisata desa/mantan sekretaris BUMDes, mantan ketua pengelola wisata desa Curug Cikuluwung, pemilik warung di wisata desa Curug Cikuluwung.
4. **Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion/FGD*)**, yang melibatkan pemerintahan desa, pengurus BUMDes, PKK, dan komunitas wisata desa Cibitung Wetan.

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif secara kualitatif, secara rinci dijelaskan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Aspek Penelitian, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Manajemen konflik dalam pengembangan wisata desa

No	Aspek yang dikaji	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Data yang diperlukan
1	Analisis konflik	Wawancara mendalam, Observasi	Analisis Deskriptif Kualitatif	Isu-isu konflik, pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik, tahapan konflik, akibat konflik
2	Analisis <i>Stakeholder</i>	Wawancara Mendalam	Analisis Deskriptif Kualitatif	Pemetaan aktor-aktor yang terlibat
3	Merumuskan manajemen konflik	Wawancara mendalam, FGD	Analisis Deskriptif Kualitatif	Analisis konflik, pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik

Data yang telah diperoleh dari penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis melalui tahapan sebagai berikut:

1. **Reduksi data**, yaitu melakukan katagorisasi data. Kegiatan dalam reduksi data ini meliputi pemilihan data hasil wawancara, pengamatan yang memiliki arti melalui catatan harian penelitian.
2. **Penyajian Data**, yaitu mengkonstruksi data dalam bentuk narasi dan grafik atau bagan, sehingga mempermudah dalam analisis masalah.
3. **Analisis**, yaitu langkah yang sepenuhnya dilakukan oleh pengkaji untuk konseptualisasi informasi yang telah dikategorikan, termasuk dilakukan juga analisa data secara induktif.

3.5 Teknik Perancangan Strategi Manajemen Konflik

Metode perancangan rencana aksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode partisipatif melalui proses FGD dengan menggunakan Teknik ORID (*objective, reflective, interpretative dan decisional making*). FGD dilakukan dengan

Komunitas Wisata Curug Cikuluwung, Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan.

Strategi partisipan perancangan terdiri dari:

1. Komunitas Curug Cikuluwung yang terdiri dari pengurus Curug Cikuluwung dan pemandu wisata desa Curug Cikuluwung.
2. Pemerintahan Desa Cibitung Wetan, yang terdiri dari Kepala Desa.
3. Pemerintahan Kecamatan Pamijahan
4. Mahasiswa MPM yang bertindak sebagai fasilitator dan pendamping dalam mengidentifikasi konflik di komunitas Curug Cikuluwung.

Adapun proses perancangan manajemen konflik dalam pengembangan wisata Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor melalui FGD tidak tercapai karena salah satu pihak yang berkonflik tidak hadir. Namun dalam diskusi kelompok terarah ini, pemerintahan desa siap untuk bekerjasama lagi asalkan komunitas wisata desa Curug Cikuluwung sudah bersepakat, dan dari pemerintahan kecamatan meminta pemerintahan desa untuk menyelesaikan konflik tersebut dan jangan menyerah dengan keadaan sekarang.

@Hak cipta milik IPB University.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

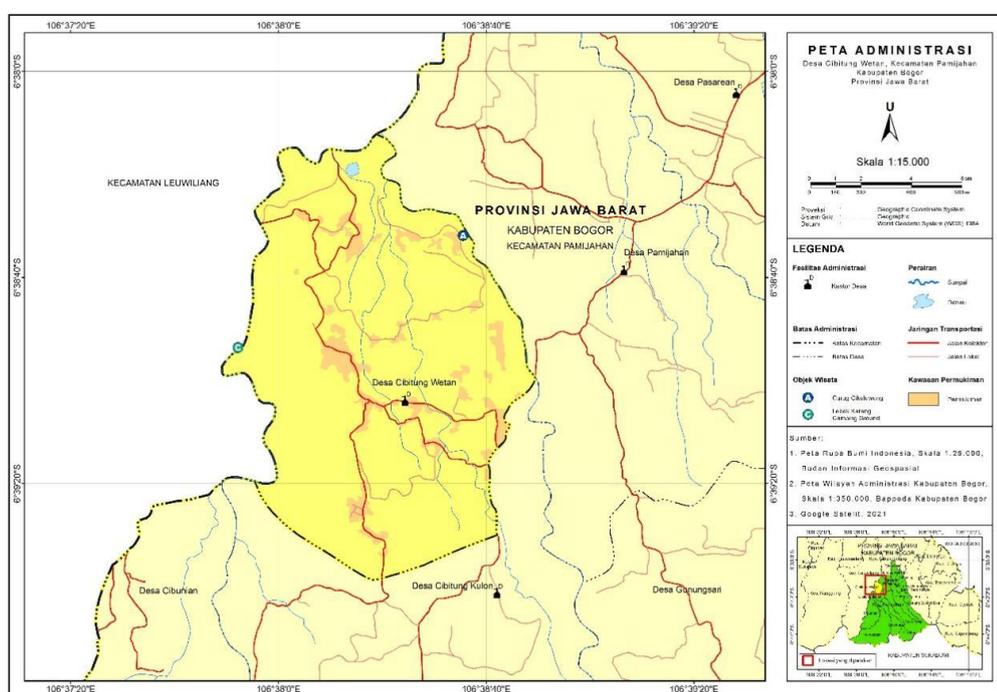
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

IV GAMBARAN PETA SOSIAL DAN KOMUNITAS DESA CIBITUNG WETAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada komunitas wisata di Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Desa Cibitung Wetan merupakan desa pemekaran dari desa Cibitung Kulon yang dimekarkan Pada tahun 1984. Adapun batas-batas wilayah desa Cibitung Wetan:

Sebelah utara	: Sungai Cianten / Desa Karyasari
Sebelah timur	: Desa Cibitung Kulon/ Desa Pamijahan
Sebelah selatan	: Desa Cibitung Kulon
Sebelah barat	: Sungai Cianten / Desa Purasari



Gambar 4.1 Peta Administrasi Desa Cibitung Wetan

Kondisi wilayah Desa Cibitung Wetan berada pada ketinggian 300-400m dari permukaan laut dengan suhu berkisar antara 22-28 C, dengan luas wilayah 243 Ha. Berdasarkan kondisinya lahan yang ada terbagi dalam dua ekosistem yaitu ekosistem lahan persawahan/basah dan lahan darat/kering. Luas lahan sawah 180 ha sedangkan lahan kering/darat 63 ha. Secara geografis, letak Desa Cibitung Wetan adalah 106.649849 BT/ -6.65763 LS.

Desa Cibitung Wetan terdiri dari 2 Dusun, 8 RW dan 24 RT, dengan luas wilayah desa ±243 Ha. Jarak kantor Desa Cibitung Wetan dengan:

a. Ibu Kota Kecamatan Pamijahan	: 5 Km
b. Ibu Kota Kabupaten Bogor	: 45 Km

- c. Ibu Kota Provinsi Jawa Barat : 184 Km
- d. Ibu Kota Negara : 100 Km

4.2 Demografi dan Kependudukan

@Hak Cipta milik IPB University

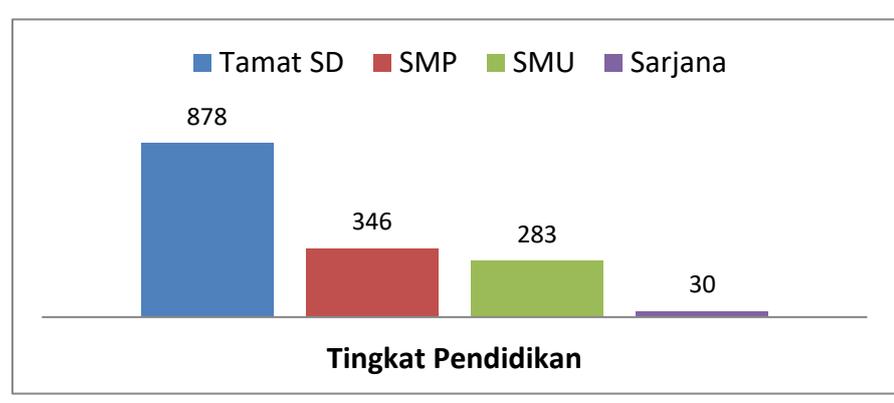
Berdasarkan data Kecamatan Pamijahan Dalam Angka Tahun 2018, jumlah penduduk dalam lima tahun (2013 -2017) terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin (RJK) Desa Cibitung Wetan Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017

Tahun	Laki-laki		Perempuan		Total	RJK
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase		
2013	3.512	52.9	3.117	47.1	6.629	112,7
2014	3.585	50.8	3.478	49.2	7.063	103,1
2015	3.593	50.6	3.512	49.4	7.105	102,3
2016	3.034	51.0	2.913	49.0	5.947	104,1
2017	3.014	51.0	2.890	49.0	5.904	104,3

Sumber: Kecamatan Pamijahan dalam angka tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018

Adapun penduduk Desa Cibitung Wetan berdasarkan tingkat pendidikan, digambarkan dalam grafik berikut:

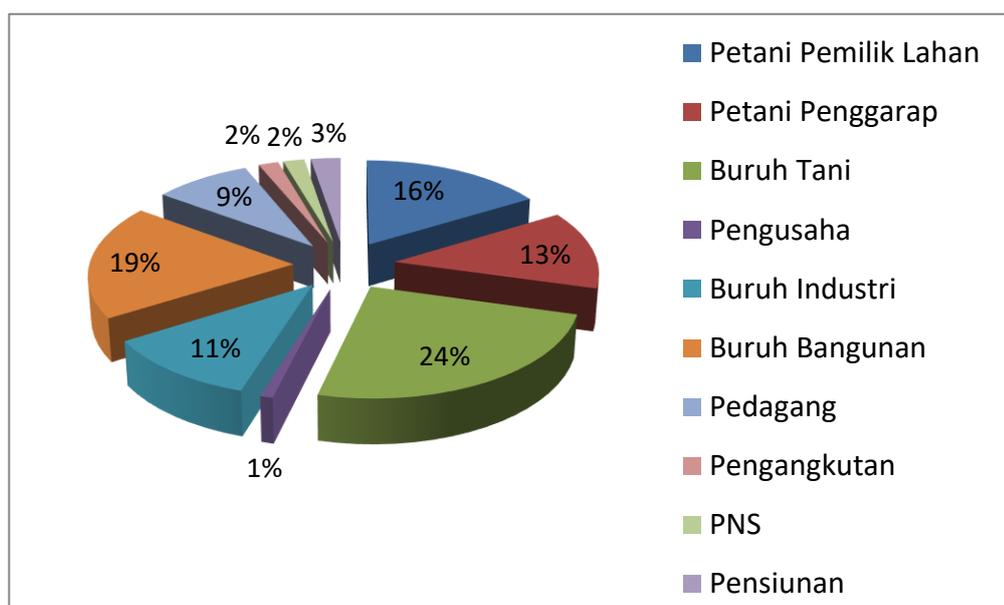


Gambar 4.2 Penduduk Desa Cibitung Wetan berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2017

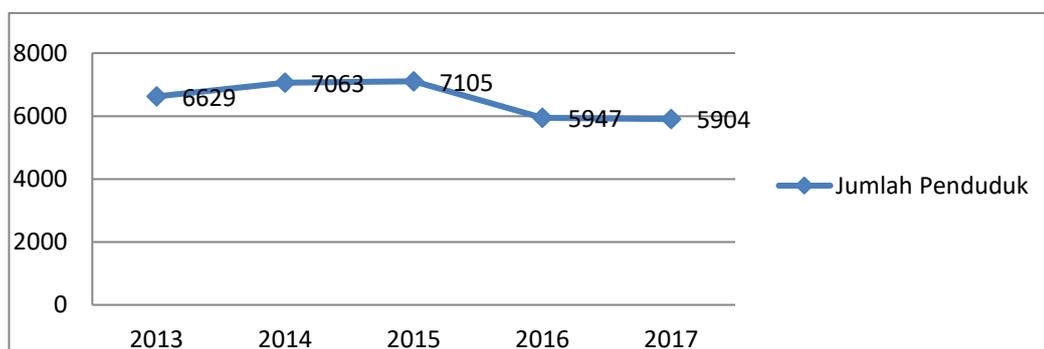
Salah satu indikator kualitas SDM suatu masyarakat adalah pendidikan, berdasarkan data pendidikan dari Monografi Kecamatan Pamijahan tahun 2017 sebagian besar tingkat pendidikan penduduk Desa Cibitung Wetan adalah lulus SD, tetapi yang berada di tingkat pendidikan rendah ini adalah masyarakat dengan usia yang sudah tidak produktif lagi, sedangkan untuk penduduk yang masih produktif tingkat pendidikannya berada di tingkat yang sedang yakni Lulus SMP/SMU.

Berikutnya adalah Penduduk Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan berdasarkan mata pencahariannya, sebagaimana yang di gambarkan dalam gambar berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

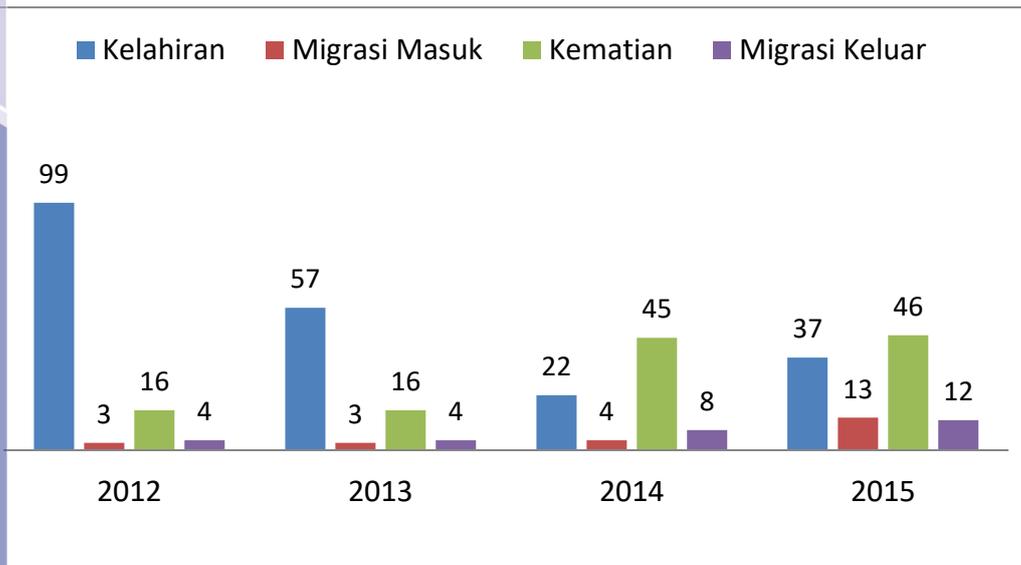


Gambar 4.3 Persentase Penduduk Desa Cibitung Wetan berdasarkan mata pencaharian utama tahun 2017



Gambar 4.4 Perkembangan Penduduk Desa Cibitung Wetan Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017

Berdasarkan gambar di atas, digambarkan bahwa proyeksi jumlah penduduk Desa Cibitung Wetan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan laju pertumbuhan positif atau dapat dinyatakan mengalami penambahan jumlah penduduk. Namun, di dua tahun terakhir yakni tahun 2016-2017 proyeksi jumlah penduduk Desa Cibitung Wetan menunjukkan laju pertumbuhan negatif atau mengalami penurunan jumlah penduduk. Adapun penambahan atau penurunan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh faktor demografi berupa kelahiran, kematian, migrasi masuk dan keluar Desa Cibitung Wetan, yang dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.5 Jumlah Kelahiran, Migrasi Masuk, Kematian, dan Migrasi Keluar Penduduk Desa Cibitung Wetan Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015

Berdasarkan data kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar yang dilaporkan di atas, faktor kelahiran dari tahun 2012 hingga 2014 mengalami penurunan, namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan. Adapun, pengurangan jumlah penduduk juga dikarenakan faktor kematian yang cukup tinggi pada tahun 2014 dan tahun 2015. Walaupun angka kematian yang cukup tinggi pada tahun 2014 dan 2015 tersebut bukan dikarenakan ada wabah penyakit tetapi hanya faktor usia yang sudah lanjut usia.

Meskipun ada migrasi masuk ke Desa Cibitung Wetan, tetapi kultur dan masyarakatnya masih asli karena penduduk pendatang tersebut adalah pasangan (suami/istri) dari penduduk Desa Cibitung Wetan.

Dilihat dari data perkembangan penduduk lima tahun terakhir, jumlah penduduk Desa Cibitung Wetan tiga tahun pertama cenderung naik dan dua tahun terakhir mengalami penurunan. Adapun Nilai Rasio Jenis Kelamin penduduk Desa Cibitung Wetan tahun 2017 adalah 104.3, ini artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 104.3 penduduk laki-laki.

Berdasarkan hasil perhitungan Reit Kelahiran Kasar (*CBR*) Desa Cibitung Wetan tahun 2015 diperoleh hasil 5.20 atau setara 5 per 1000. Hal ini dipahami bahwa terjadi 5 kelahiran dalam setiap 1000 penduduk di Desa Cibitung Wetan.

Laju Pertumbuhan Penduduk geometrik Desa Cibitung Wetan 2.8%, nilai laju pertumbuhan ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan data laju pertumbuhan penduduk nasional pada tahun 2017 yang hanya 1.1% (sumber Bank Dunia). Jika diprediksi dengan rumus laju pertumbuhan penduduk geometrik 10 tahun yang akan datang, maka tahun 2027 penduduk Desa Cibitung Wetan diperkirakan akan mencapai jumlah 7.781 jiwa.

4.3 Kelembagaan Sosial

Kelembagaan sosial dalam komunitas baik yang formal dan informal, tradisional dan modern, berupa identifikasi kelompok-kelompok sosial, organisasi sosial, dan lembaga-lembaga sosial (tradisi), serta pola-pola relasi antar kelompok,

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

organisasi, dan lembaga. Adapun kelembagaan sosial yang terdapat di Desa Cibitung Wetan tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Kelembagaan Berdasarkan jenis pengorganisasian Desa Cibitung Wetan tahun 2017

No.	Kebutuhan Komunitas Desa	Kelompok	Organisasi
1	Pemuda		Karang Taruna
2	Keamanan		Linmas
3	Administrasi Pemerintahan	Dusun	BPD LPM RT RW
4	Pendidikan		PAUD Madrasah Ibtidaiyah MI) Sekolah (SD, SMP, SMK)
5	Wisata		Curug Cikuluwung
6	Wisata	Dasawisma	PKK
7	Seni Budaya	Kelompok Seni Singa Waro	
8	Ekonomi	UMKM	

Sumber: Kecamatan Pamijahan Dalam Angka Tahun 2018 (*Setelah diolah*)

Tabel 4.3 Tokoh-tokoh di Desa Cibitung Wetan Tahun 2020

No	Nama	Tokoh
1	Urip Iskandar	Kepala Desa
2	Lili	Tokoh agama dan pendidikan
3	M. Dzajuli	Tokoh Agama
4	Didin	Tokoh UMKM
5	Wahyu	Direktur BUMDes
6	Dede	Tengkulak
7	Awang	Tokoh Tani
8	Hendar	Ketua Pengelola Wisata Desa Curug Cikuluwung

Pak Urip Iskandar sebagai Kepala Desa, beliau kharismanya tidak hanya di kenal di Desa Cibitung Wetan tetapi sampai ke tingkat kabupaten. Untuk tokoh-tokoh lainnya hanya dikenal di desanya saja, sedangkan untuk tokoh UMKM dia sudah bisa mengakses ke dinas-dinas tingkat kabupaten. Untuk tengkulak dia sebagai patron klien dari sebagian petani yang ada di Desa Cibitung Wetan, dia memiliki modal dan akses pasar untuk palawija.

Desa Cibitung Wetan memiliki Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terdiri atas 7 Kelompok dengan anggota sebanyak 291 orang. Pembinaan Gapoktan



Desa Cibitung Wetan berada di bawah dampingan Dinas Peternakan dan Pertanian Kecamatan Pamijahan. Adapun, kegiatan penyuluhan Gapoktan meliputi pengetahuan dan pemberian bibit tanaman juga informasi mengenai pupuk.

Mayoritas penduduk Desa Cibitung Wetan adalah pemeluk agama Islam. Hal ini terlihat dari kehidupan sehari-hari seperti kegiatan wajib umat muslim yang dijalankan, aktifnya kegiatan di masjid, mushola dan majlis taklim, sikap saling tolong menolong, gotong royong di antara warga masyarakat dan terciptanya kerukunan dalam kehidupan sehari-hari.

Tenaga kesehatan di Desa Cibitung Wetan pada tahun 2017 terdiri atas 1 orang bidan. Sedangkan untuk sarana pelayanan kesehatan yang terdapat di Cibitung Wetan adalah satu buah puskesmas (Puskesmas Pembantu) dan 8 posyandu, kelompok Dasawisma adalah bentukan PKK.

Selain kelembagaan sosial formal terdapat pula yang informal seperti kelompok arisan dan kelompok berjanji. Kelompok berjanji dibentuk untuk memenuhi persyaratan meminjam ke Bank Keliling atau di sebut juga Bank Emok.

Jejaring sosial terbentuk antara Kepala Dusun dengan RW dan RT, aktivitas dari jejaring ini adalah menyalurkan aspirasi penduduk ke tingkat yang lebih atas lagi dalam hal ini ke pemerintahan desa. Selain itu, jejaring sosial pun terjadi antar kader posyandu dengan bidan, mereka fokus terhadap kesehatan ibu hamil, bayi, balita dan lansia.

Untuk kelembagaan sosial informal jejaring terjadi di antara penduduk perempuan dalam hal ini ibu rumah tangga yang terbentuk dalam kelompok arisan maupun kelompok berjanji, aktivitas mereka adalah di perekonomian. Adapun dari komunitas yang disebut di atas yang membangun relasi dengan orang luar adalah dari komunitas kesehatan dan PKK, ketika dua komunitas ini ada kegiatan pertemuan rutin sebulan sekali antar desa, untuk PKK biasanya dilakukan di kecamatan sedangkan bidan biasanya di puskesmas kecamatan.

4.4 Perubahan Ekologis

Basis ekologi kehidupan masyarakat Desa Cibitung Wetan adalah pertanian padi sawah dan perikanan. Perubahan ekologi di Desa Cibitung Wetan dikarenakan semakin berkurangnya lahan pertanian akibat dari bertambahnya jumlah penduduk yang berdampak pada semakin banyak bangunan rumah yang di bangun. Selain itu, kepemilikan lahan pertanian pun tidak seutuhnya milik warga Desa Cibitung Wetan karena ada sebagian kecil warga yang menjual sawah tersebut setelah di wariskan ke keturunannya.

Perubahan ekologis terjadi di Desa Cibitung Wetan yang awalnya pertanian padi sawah dan perikanan sekarang mulai berubah menjadi yang utama dalah pertanian palawija dan perikanan jauh berkurang. Hal tersebut disebabkan oleh debit air yang semakin berkurang karena adanya PT. JDG pembangkit listrik tenaga uap.

Oleh karena itu, mata pencaharian utama penduduk Desa Cibitung Wetan sedikit bergeser yang pada awalnya adalah pertanian, saat ini banyak penduduk Desa Cibitung Wetan yang mencari nafkah di luar wilayah Desa Cibitung Wetan, hal ini terbukti dari mata pencaharian penduduk Desa Cibitung Wetan kedua terbesar adalah sebagai buruh bangunan sebanyak 19% walaupun yang terbanyak

adalah buruh tani sebanyak 24%, dan mata pencaharian ketiga terbanyak adalah petani pemilik lahan sebesar 13%.

Berdasarkan hasil analisis *community capital*, yang meliputi aset sumber daya manusia, aset sumber daya alam, aset ekonomi produktif dan aset modal sosial, aset ekonomi produktif menjadi prioritas peningkatan aset. Hal ini disebabkan oleh aset ekonomi produktif memiliki nilai yang paling kecil dibandingkan dengan nilai aset yang lainnya. Oleh karena itu, peningkatan aset ekonomi produksi komunitas menjadi prioritas utama untuk mendukung penghidupan berkelanjutan.

Hasil analisa pola kepemilikan aset sumberdaya manusia menunjukkan bahwa masyarakat cukup memiliki keragaman aset bidang sumberdaya manusia. Dari empat indikator terdapat satu indikator yang cukup baik yaitu tingkat kesehatan masyarakat. Dua indikator yang dinilai masyarakat menggambarkan kondisi yang cukup untuk mendukung penghidupan, ketiga indikator itu yakni tingkat pendidikan rata-rata masyarakat, beragamnya mata pencaharian masyarakat desa. Hanya satu indikator yang nilainya paling kecil yaitu tingkat keterampilan masyarakat.

Potensi sumberdaya alam cukup memberi nilai tambah bagi masyarakat. Hasil analisa pola kepemilikan aset sumberdaya alam menunjukkan bahwa dari empat indikator yaitu jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui, jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, penguasaan SDA tersebut/tingkat kepemilikan dan penguasaan SDA, pemanfaatan SDA bagi masyarakat. Hasil penilaian masyarakat, ada tiga indikator menggambarkan kondisi yang cukup untuk mendukung penghidupan yakni keberadaan jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tingkat kepemilikan lahan atau sumberdaya alam, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Masyarakat memiliki kepercayaan antar warga yang baik serta toleran terhadap pendatang. Hasil analisa pola kepemilikan aset sumber daya sosial menunjukkan bahwa dari lima indikator, empat indikator dinilai menggambarkan kondisi yang cukup untuk mendukung penghidupan, keempat indikator itu yakni keberadaan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan di tingkat lokal, kepercayaan antar warga, aksesibilitas terhadap lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, dan toleransi terhadap pendatang.

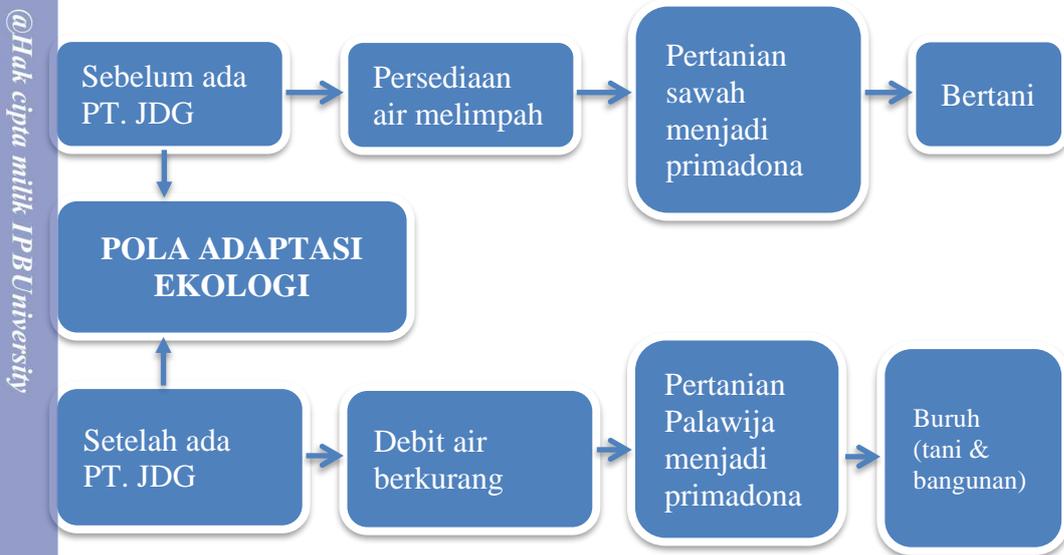
Minimnya dukungan sumberdaya ekonomi produktif, hasil analisa pola kepemilikan aset sumber daya ekonomi produktif menunjukkan bahwa dari empat indikator, satu indikator menggambarkan kondisi yang kurang mendukung, penghidupan masyarakat, yakni kontribusi kiriman uang dari anggota keluarga yang bekerja di luar kota tidak ada atau dengan kata lain minimnya perputaran uang di desa.

Berdasarkan data di komunitas, strategi penghidupan masyarakat Desa Cibitung Wetan saat ini menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada. Untuk lahan sawah yang aliran airnya banyak ditanami padi, namun untuk lahan yang aliran airnya sedikit ditanami palawija, seperti jagung, ubi, singkong, kacang panjang, dan lain-lain.

Penduduk Desa Cibitung Wetan, selain menjadi buruh tani, pada saat tidak ada pekerjaan di sawah mereka bekerja sebagai buruh kasar/buruh harian lepas baik di wilayah Desa Cibitung Wetan maupun ke luar wilayah. Selain itu, tidak hanya suami yang bekerja tetapi istri pun ikut mencari nafkah baik itu berjualan atau menjadi buruh tani juga.



Berdasarkan hal tersebut di atas terjadi perubahan ekologi di Desa Cibitung Wetan, sehingga masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Berikut pola adaptasi ekologi yang terjadi di Desa Cibitung Wetan:



Gambar 4.7 Pola Adaptasi Ekologi Desa Cibitung Wetan (Sumber: diolah dari hasil wawancara dengan informan)

4.5 Masalah-masalah Sosial

Masalah sosial menurut Soekanto (1982) yaitu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Permasalahan utama yang ada di Desa Cibitung Wetan adalah kemiskinan dan pengangguran. Rumah tangga miskin di Desa Cibitung Wetan sebanyak 606 RTM. Selain itu, terdapat konflik di wisata Curug Cikuluwung, hal tersebut dikarenakan ada warga di luar Desa Cibitung Wetan yang merasa keberatan karena penutupan pintu 2 Curug Cikuluwung. Orang tersebut tidak terima pintu 2 Curug Cikuluwung ditutup karena merasa sudah berinvestasi di Curug tersebut. BUMDes Desa Cibitung Wetan menutup pintu tersebut dengan maksud untuk mengintegrasikan pintu masuk wisatawan ke Curug Cikuluwung kaitannya dengan penataan pembangunan pengembangan wisata Curug Cikuluwung. Selain itu, ada konflik kepentingan yang terjadi pada tokoh bisnis sehingga ada akses untuk peningkatan ekonomi yang tidak di serap oleh masyarakat.

Solusi yang dilakukan pemerintahan desa untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran adalah mendirikan BUMDes dengan harapan bisa mengoptimalkan potensi dan perekonomian desa.

Solusi yang dihasilkan dari mediasi antara orang yang berkonflik dengan BUMDes dan pengurus wisata Curug Cikuluwung yang dimediasi oleh Kepala Desa Cibitung Wetan dan Kapolsek Cibungbulang adalah orang tersebut diijinkan untuk membuka pintu curug selama satu tahun sebagai kompensasi dari uang yang dikeluarkan untuk membangun akses pada awal pembukaan curug.

V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Konflik

Seiring berkembangnya wisata desa Curug Cikuluwung konflik pun terjadi. Untuk mengetahui bagaimana konflik tersebut terjadi dilakukan analisis konflik berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan yang meliputi; identifikasi urutan kejadian konflik, identifikasi isu-isu konflik, pemetaan konflik, identifikasi tahapan konflik, dan identifikasi akibat dari konflik.

5.1.1 Identifikasi Urutan Kejadian Konflik

Dalam perjalanannya, pengelolaan wisata desa Curug Cikuluwung menemui beberapa permasalahan yang mengakibatkan terjadinya konflik baik di antara masyarakat maupun dengan pemerintahan desa. Untuk lebih memahami konflik yang terjadi di wisata desa Curug Cikuluwung, akan diidentifikasi urutan kejadian konflik yang terjadi.

Curug Cikuluwung merupakan wisata desa yang baru diketahui oleh masyarakat sekitar lokasi Curug Cikuluwung dan langsung dibuka untuk umum. Lokasi air terjun yang mudah diakses sehingga sudah banyak yang berkunjung ke wisata desa Curug Cikuluwung walaupun baru dibuka. Curug Cikuluwung keberadaannya diketahui oleh masyarakat sekitar Curug Cikuluwung pada akhir tahun 2017, kemudian mereka membuat akses jalan menuju air terjun dan dibuka untuk umum pada pertengahan Januari tahun 2018.

Dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2018 pengelola wisata desa Curug Cikuluwung mengelola wisata desa secara mandiri. Jumlah total pengunjung dari bulan Januari-Mei ada 154 orang dan mengalami lonjakan pengunjung pada saat liburan Hari Raya Idul Fitri di mana jumlah pengunjung dari bulan Mei-Juli 2018 sampai 3.000 pengunjung. Dikarenakan jumlah orang yang masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung sampai ribuan sehingga hal tersebut diketahui oleh preman-preman yang berada disekitar wisata desa Curug Cikuluwung dan mereka mendatangi pengelola dan meminta bagian dari tiket masuk. Hal tersebut membuat pengelola wisata desa Curug Cikuluwung memutuskan bahwa mereka perlu legalitas dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, pengelola wisata desa Curug Cikuluwung mendatangi pemerintahan desa. Pada saat yang sama pemerintahan desa baru membentuk BUMDes dan akhirnya wisata desa Curug Cikuluwung bergabung di unit usaha pariwisata BUMDes Cibitung Wetan pada bulan Agustus 2018. Untuk masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung ini ada beberapa akses, selain bisa di akses dari Desa Cibitung Wetan (gerbang pintu masuk utama dan dari curug 2), ke Curug Cikuluwung pun bisa di akses dari desa tetangga yakni Desa Pamijahan.

Konflik yang pertama terjadi pada bulan Agustus 2018 adalah adanya penolakan dari tokoh agama sekitar lokasi wisata desa Curug Cikuluwung (desa Pamijahan) kalau Curug Cikuluwung dijadikan tempat wisata sampai adanya pemasangan sepondok di sekitar aliran sungai Cikuluwung. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran dari tokoh agama jikalau Curug Cikuluwung menjadi tempat wisata akan menimbulkan dampak negatif seperti adanya tindakan-tindakan asusila, minum-minuman keras karena lokasi Curug Cikuluwung berada di lingkungan pesantren. Sementara itu, ada paguyuban yang membuka pintu masuk

ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan yang belakangan diketahui didukung oleh Kepala Desa Pamijahan, akhirnya terjadi konflik. Warga masyarakat dan tokoh agama Desa Pamijahan marah terhadap keputusan Kepala Desa Pamijahan yang mendukung paguyuban membuka pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan tanpa mengajak musyawarah masyarakat dan belum ada kajian amdal dari wisata desa ini.

Paguyuban yang membuka pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan tersebut masih tetap teguh dengan pendiriannya dengan membuka akses pintu masuk tersebut bahkan sampai memasang petunjuk arah dan papan nama wisata desa Curug Cikuluwung, singkat cerita ada tokoh masyarakat berlatar belakang TNI yang frontal sampai terjadi perebutan cabut paksa papan nama dan arah petunjuk tersebut hingga mau berkelahi yang akhirnya dilerai oleh beberapa orang. Pada saat itu masyarakat Desa Pamijahan menganggap seperti halnya tersebut merupakan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa, yang didukung oleh anggota DPRD yang merupakan suami Kepala Desa Pamijahan. Masyarakat tidak diajak musyawarah ataupun berunding bagaimana prosesnya untuk pemasangan papan nama dan petunjuk arah tersebut sehingga menimbulkan ketersinggungan. Dikawatirkan terjadi penyerangan terhadap pemerintahan dan kantor desa. Akhirnya, tokoh agama dan masyarakat Desa Pamijahan protes dan demo ke kantor Desa Pamijahan. Difasilitasi oleh BPD Desa Pamijahan, dan pemerintahan kecamatan Pamijahan tokoh agama dan masyarakat Desa Pamijahan bermusyawarah dengan pemerintahan Desa Pamijahan dan dihasilkan dua kesepakatan, yakni 1) pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan ditutup; 2) pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan jangan dilegalkan. Masyarakat menganggap itu kekayaan alam yang Tuhan ciptakan tetapi masyarakat keberatan jika pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari desa Pamijahan dilegalkan. Siapapun diperbolehkan berkunjung ke Curug Cikuluwung namun tidak boleh dilegalkan, konflik tersebut sudah selesai di tahun 2019.

Konflik berikutnya terjadi karena ada perebutan akses pintu masuk ke Curug Cikuluwung antara BUMDes Cibitung Wetan dan Mami (warga Desa Pamijahan). Di wisata desa Curug Cikuluwung terdapat dua air terjun, masyarakat sekitar menyebutnya curug 1 dan curug 2. Selain pintu masuk dari gerbang utama yang resmi dikelola oleh pengelola wisata desa Curug Cikuluwung, ke curug 1 dan 2 ini bisa di akses dari pintu masuk lainnya di luar loket resmi Curug Cikuluwung. Dikarenakan wisata desa Curug Cikuluwung memiliki potensi ekonomi yang bagus sehingga ada ormas/LSM (Gempar) yang berada di sekitar wisata desa ini ingin memperoleh bagian dari uang tiket masuk ke Curug Cikuluwung. Konflik akses pintu masuk ke Curug Cikuluwung ini menjadi jalan bagi ormas/LSM untuk terlibat dalam konflik wisata desa Curug Cikuluwung. warga Desa Pamijahan (desa tetangga) yang membuka akses masuk ke Curug Cikuluwung (baca Mami) dari Curug 2 di advokasi oleh ormas/LSM tersebut agar dia tetap bisa membuka pintu masuk ke Curug Cikuluwung dari Curug 2. Konflik ini cukup serius sehingga pemerintahan desa Cibitung Wetan dan Kapolsek Cibungbulang memfasilitasi pengelola Curug Cikuluwung beserta BUMDes membereskan konflik tersebut. Warga Desa Pamijahan (Mami) memberikan uang sebanyak 35 juta rupiah kepada LSM Gempar untuk mengadvokasi agar dia tetap bisa membuka pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Curug 2. Ormas/LSM Gempar tersebut datang

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

ke kantor Desa Cibitung Wetan mengatasnamakan masyarakat untuk menutup wisata desa Curug Cikuluwung. Pada Musyawarah tersebut hadir BUMDes Cibitung Wetan, Ketua Pengelola wisata desa Curug Cikuluwung, Mami (warga Desa Pamijahan), Ormas/LSM Gempar, Kepala Desa Cibitung Wetan dan Kapolsek Cibungbulang. Adanya dialog antara Pemerintahan Desa Cibitung Wetan dan ormas/LSM Gempar yang menyatakan bahwa pemerintahan desa memonopoli wisata desa tersebut dan menanyakan izin membuka wisata desa Curug Cikuluwung, menghasilkan keputusan bahwa warga Desa Pamijahan (Mami) tetap bisa membuka akses masuk ke Curug Cikuluwung dari Curug 2 selama satu tahun sebagai kompensasi atas investasi yang dikeluarkan untuk membangun pintu akses ke wisata Desa Curug Cikuluwung dan ormas/LSM Gempar mendapatkan bagian dari tiket masuk ke Curug Cikuluwung. Konflik ini sudah ada solusinya, hubungan Mami dengan komunitas Curug Cikuluwung dan pemerintahan desa pun saat ini terjalin baik.

Wisata Desa Curug Cikuluwung berada di lahan PLN (PT Indonesia Power), agar wisata desa ini legal, pemerintahan Desa Cibitung Wetan beserta BUMDes Cibitung Wetan mengurus perijinan pembukaan wisata desa Curug Cikuluwung ke PT Indonesia Power Saguling.

Wisata Desa Curug Cikuluwung terus berkembang, pengunjung yang datang ke Curug Cikuluwung pun semakin banyak. Namun dalam masa perkembangannya, ketua pengelola Curug Cikuluwung mengundurkan diri, sehingga ketua pengelola diganti oleh pengurus lain yang merupakan salah seorang pelopor pembuka wisata desa Curug Cikuluwung. Pelopor ini, pada saat pemilihan ketua pengelola wisata desa Curug Cikuluwung pertamakali mencalonkan diri juga namun tidak terpilih, sehingga situasi ini menjadi kesempatan bagi yang bersangkutan untuk menjadi ketua tanpa ada pemilihan lagi. Dalam masa transisi pergantian kepengurusan pengelola wisata desa Curug Cikuluwung, terjadi penyalahgunaan jabatan oleh ketua BUMDes. Wisata desa Curug Cikuluwung merupakan salah satu bagian dari unit usaha BUMDes di bidang pariwisata. Kejadian pada ketua BUMDes tersebut membuat hilangnya kepercayaan pengurus wisata desa Curug Cikuluwung terhadap BUMDes dan pemerintahan desa, walaupun penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh ketua BUMDes di luar sepengetahuan pemerintahan desa. Peristiwa tersebut membuat pengelola wisata desa Curug Cikuluwung memutuskan untuk keluar dari unit usaha BUMDes, meskipun ketua BUMDes sudah diganti.

Keputusan ketua pengelola Curug Cikuluwung keluar dari BUMDes rupanya tidak disetujui oleh semua komunitas Curug Cikuluwung. Oleh karena itu, pengelola Curug Cikuluwung kemudian mengadakan musyawarah dengan pemerintahan desa, namun dalam pertemuan tersebut pengelola inti tidak pernah hadir. Musyawarah dilakukan sebanyak empat kali namun pengelola inti tidak pernah hadir dalam musyawarah tersebut. Dalam musyawarah tersebut disepakati pembagian uang tiket yang masuk ke pengelola wisata desa Curug Cikuluwung dan ke PAD desa, juga adanya pengalokasian dari Dana Desa untuk pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung. Pengurus inti Curug Cikuluwung ternyata tidak setuju dengan kesepakatan pembagian uang tiket dengan pemerintahan desa sehingga menarik kembali kesepakatan tersebut dan memilih untuk tidak terkait dengan pemerintahan desa. Dikarenakan keputusan tersebut, akhirnya pemerintahan desa melalui musyawarah khusus mengalihkan alokasi Dana Desa yang sebelumnya akan dialokasikan untuk pengembangan wisata desa Curug

Cikuluwung ke wisata desa lainnya, walaupun akhirnya dana tersebut dipergunakan untuk bantuan sosial pada masa pandemik ini. Adapun urutan kejadian konflik tersebut diringkas dalam Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1 Urutan Kejadian Konflik Wisata Desa Curug Cikuluwung

Waktu	Kejadian
Januari 2018	Wisata desa Curug Cikuluwung dibuka
Januari – April 2018	Pengelola melakukan promosi
Juni 2018	Pengelola menghubungi pemerintahan Desa
Juli 2018	BUMDes menghubungi pengelola wisata desa Curug Cikuluwung
Agustus 2018	Curug Cikuluwung bergabung di unit wisata desa BUMDes Cibitung Wetan
Agustus 2018	Ada tokoh agama Desa Pamijahan yang merasa keberatan kalau ada pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan
Oktober 2018	BUMDes menutup pintu akses ke Curug Cikuluwung dari desa tetangga dan terjadilah konflik antara warga dari desa lain dengan pengurus Curug Cikuluwung
Oktober 2018	Pemerintahan Desa, Kapolsek, dan BUMDes menyelesaikan konflik pengelola Curug Cikuluwung dengan warga dari desa lain yang membuka akses masuk ke curug dari desanya dan LSM
Desember 2018	Pemerintahan Desa dan BUMDes mengurus perijinan ke PT Indonesia Power Jawa Barat di Saguling
April 2019	Ketua Pengelola mengundurkan diri dari kepengurusan karena merasa tidak bisa merubah pola pikir komunitasnya dan tidak adanya transparansi dari BUMDes terkait permasalahan keuangan
April 2019	Otomatis ada pergantian pengelola yang baru yang saat ini menjabat
Agustus 2019	Terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Ketua BUMDes
September 2019	Pengelola Curug Cikuluwung keluar dari Unit Bisnis BUMDes

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tabel 5.1 Urutan Kejadian Konflik Wisata Desa Curug Cikuluwung (*lanjutan*)

Oktober 2019	Pengelola membuat kesepakatan dengan pemerintahan Desa
Desember 2019	Pengelola menarik kesepakatan tersebut

5.1.2 Identifikasi Isu-isu Konflik

Wisata desa Curug Cikuluwung merupakan pariwisata berbasis komunitas (CBT). Curug Cikuluwung baru diketahui keberadaannya oleh warga sekitar akhir tahun 2017. Lokasi Curug Cikuluwung selama ini tidak terlihat karena tertutup oleh pohon yang rindang dan warga tidak berani untuk memangkas pohon-pohon tersebut. Konon, di lokasi Curug Cikuluwung ini ada sejarahnya dari jaman kependudukan Belanda. Singkat cerita, leluhur yang berada di lokasi Curug Cikuluwung ini mendapatkan *privilege* dari PLN dengan diperbolehkan untuk tinggal di lokasi sekitar Curug Cikuluwung dan keturunannya bekerja di PLN.

Warga yang melihat air terjun ini merupakan penduduk asli sekitar Curug Cikuluwung, dia penasaran akan keberadaan air terjun tersebut, sehingga besok harinya dia mengajak saudaranya untuk menebang pohon-pohon yang menutupi Curug Cikuluwung tersebut. Warga yang tinggal di sekitar Curug Cikuluwung merupakan satu keturunan. Mereka swadaya untuk membuka akses ke lokasi Curug Cikuluwung dengan menebang pohon-pohon yang ada dan membuat jalan masuk ke Curug Cikuluwung. Setelah akses jalan terbuka, akhirnya warga membuka wisata desa Curug Cikuluwung ini untuk umum. Mereka menginformasikan pembukaan wisata desa Curug Cikuluwung melalui media sosial sehingga informasi cepat tersebar. Untuk mengelola wisata desa ini, pada awalnya hanya membentuk pemandu dan penjaga tiket, setelah bergabung dengan BUMDes mereka membuat kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, pemandu, dan bagian loket, pemilihan kepengurusan dilakukan melalui musyawarah. Dalam perjalanan mengembangkan wisata desa ini, pengurus memerlukan legalitas untuk membuka wisata desa secara resmi. Akhirnya pengurus mendatangi pemerintahan desa dan pada saat yang sama pemerintahan desa baru membentuk BUMDes. Kemudian, wisata desa Curug Cikuluwung bergabung di unit usaha pariwisata BUMDes. Pembukaan Curug Cikuluwung menjadi wisata desa memberikan dampak yang positif untuk komunitas Curug Cikuluwung, anak-anak muda menjadi produktif dengan menjadi pemandu di wisata desa Curug Cikuluwung, ibu-ibu yang awalnya merupakan nasabah bank emok sekarang memiliki penghasilan dengan berjualan di lokasi wisata desa Curug Cikuluwung sehingga bisa membayar cicilannya ke bank emok bahkan sampai bisa menabung, bapak-bapaknya pun terlibat dalam aktivitas di wisata desa ini. Dengan bergabung bersama BUMDes, pemandu wisata desa Curug Cikuluwung berkesempatan mengikuti pelatihan *hospitality* yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor.

Wisata desa Curug Cikuluwung bergabung dengan BUMDes sekitar bulan Agustus 2018. Wisata desa Curug Cikuluwung berlokasi di aliran sungai Cikuluwung yang merupakan batas antar desa, yakni berbatasan dengan Desa Pamijahan sehingga ke lokasi wisata desa ini bisa di akses melalui desa tersebut. Melihat potensi ekonomi dari wisata desa ini, paguyuban dari desa tetangga yakni



dari Desa Pamijahan membuka pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan, namun ada penolakan dari tokoh agama dan masyarakat Desa Pamijahan.

Selain paguyuban dari Desa Pamijahan yang membuka pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung, ada warga Desa Pamijahan (yang dikenal dengan sebutan Mami) membuka akses pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Curug 2 yang bukan pintu masuk resmi yang dikelola oleh pengelola wisata desa Curug Cikuluwung. Setelah berjalan beberapa waktu, BUMDes menutup akses masuk ke lokasi wisata desa Curug Cikuluwung dari pintu masuk Curug 2 tersebut dengan tujuan untuk mengintegrasikan pintu masuk wisatawan dari pintu utama yang resmi dikelola oleh pengurus wisata desa Curug Cikuluwung. Namun keputusan BUMDes tersebut tidak diterima oleh Mami. Akhirnya, masalah tersebut sampai ke Ormas/LSM Gempar yang berada di sekitar wisata desa Curug Cikuluwung tersebut yang memang ingin mendapatkan bagian dari tiket masuk ke Curug Cikuluwung. Ormas/LSM Gempar masuk ke permasalahan ini dengan mengadvokasi warga Desa Pamijahan (Mami) agar tetap bisa membuka akses pintu masuk ke Curug Cikuluwung. Permasalahan ini tidak berlangsung lama karena pemerintahan desa cepat mengambil tindakan, bekerjasama dengan Kapolsek Cibungbulang memediasi BUMDes, pengelola wisata desa Curug Cikuluwung, ormas/LSM Gempar serta Mami untuk bersepakat. Akhirnya disepakati kalau akses masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Curug 2 (pintu tidak resmi) tetap dibuka, Mami diberikan kesempatan untuk membuka pintu masuk ke wisata Curug Cikuluwung selama satu tahun sebagai kompensasi atas investasi yang dikeluarkan untuk membuka akses ke wisata desa Curug Cikuluwung dan ormas/LSM Gempar mendapatkan bagian dari tiket masuk ke Curug Cikuluwung sebesar 1500 rupiah per tiket.

Adapun, lokasi wisata desa Curug Cikuluwung berada di lahan PT Indonesia Power sehingga BUMDes dan pemerintahan desa memfasilitasi pengurus wisata desa Curug Cikuluwung mengajukan permohonan ijin ke PT Indonesia Power Saguling di Rajamandala Bandung Barat untuk membuka Curug Cikuluwung sebagai wisata desa yang dibuka untuk umum. Namun, ijin tersebut sampai sekarang belum ada karena ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh BUMDes.

Pada Bulan April 2019 Ketua Pengelola wisata desa Curug Cikuluwung mengundurkan diri dari kepengurusan. Kemudian kepengurusan berubah, ketua dan sekretaris digantikan oleh anggota lain, yang menamakan dirinya pelopor. Pelopor adalah orang yang ikut membangun akses masuk ke lokasi Curug Cikuluwung. Ketua pengelola wisata desa Curug Cikuluwung merupakan tim sukses mantan kandidat kepala desa yang kalah dari kepala desa yang menjabat saat ini. Beberapa bulan kemudian, sekitar Bulan Juli 2019 terjadi penyalahgunaan jabatan oleh Ketua BUMDes. Namun penyalahgunaannya ini ada dua kemungkinan yakni Ketua BUMDes menandatangani perjanjian investasi dengan pihak swasta tanpa memberitahukan ke pengelola wisata desa Curug Cikuluwung dan pemerintahan desa serta uangnya tidak masuk ke BUMDes maupun ke pengelola wisata desa, kemungkinan kedua menyatakan bahwa ketua BUMDes meminjam sejumlah uang kepada investor dengan menjaminkan jabatan dia sebagai ketua BUMDes yang mengelola wisata desa Curug Cikuluwung. Hal tersebut tidak bisa dikonfirmasi langsung ke yang bersangkutan karena tidak bisa dihubungi dan sudah tidak tinggal di Desa Cibitung Wetan. Setelah kejadian tersebut, pengelola wisata desa Curug

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

Cikuluwung memutuskan untuk keluar dari BUMDes tapi masih berada dalam pengawasan pemerintahan desa. Selama bergabung dengan BUMDes, pemasukan dari tiket masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung ada alokasi dana untuk pengembangan usaha BUMDes dan PAD desa. Pada saat kejadian ketua BUMDes menyalahgunakan jabatannya tersebut, uang kas BUMDes dari tiket wisata desa Curug Cikuluwung sebesar Rp 20.000.000 untuk pengembangan usaha BUMDes dan PAD desa. Pada awalnya uang tersebut diserahkan oleh bendahara BUMDes ke pemerintahan desa. Namun, pengelola seolah-olah mengusik uang tersebut padahal dari peruntukannya uang tersebut merupakan dana untuk pengembangan usaha BUMDes dan PAD desa, untuk menghindari polemik pada akhirnya uang tersebut oleh pemerintahan desa diberikan ke pengelola wisata desa Curug Cikuluwung. Uang tersebut oleh pengelola dipergunakan untuk membayar biaya yang dikeluarkan pada saat membuka akses jalan masuk ke lokasi Curug Cikuluwung.

Pemerintahan desa bermusyawarah dengan pengelola untuk keberlanjutan pengelolaan wisata desa, musyawarah dilakukan sebanyak empat kali namun pengelola inti tidak pernah hadir. Dalam musyawarah tersebut dihasilkan keputusan akan ada pengalokasian dana dari Dana Desa sebesar 400 juta untuk pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung dan dari tiket masuk ke wisata desa akan dialokasikan sebesar Rp 6000 untuk PAD desa yang akan diatur pembagiannya untuk dana sosial, pengembangan usaha dan PAD desa. Namun dari hasil wawancara dengan pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung ada perbedaan jumlah alokasi dari penjualan tiket untuk PAD desa, menurutnya pemerintahan desa meminta Rp 10.000 per tiket. Setelah dikonfirmasi ke informan lainnya ternyata hanya Rp 6000 yang masuk PAD desa. Kesepakatan ini hanya berlangsung selama tiga bulan karena pada bulan Desember 2019 pengelola inti membatalkan kesepakatan yang sudah dibuat dan mengelola wisata desa Curug Cikuluwung secara mandiri. Pengelola inti inginnya pemerintahan desa tetap mengalokasikan dana untuk pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung walaupun tanpa adanya PAD yang masuk ke pemerintahan desa dan BUMDes dari wisata desa Curug Cikuluwung. Hal tersebut pun tidak dapat diterima oleh BUMDes, walaupun keuntungan yang diambil oleh BUMDes tidak banyak tetapi karena ini BUMDes sehingga harus ada keuntungan dan dari PAD yang masuk ke desa atau BUMDes tersebut akan dikembalikan lagi ke wisata desa Curug Cikuluwung dan masyarakat Desa Cibitung Wetan berupa dana pengembangan usaha dan dana sosial. Hal senada disampaikan oleh Kepala Desa, ormas/LSM bisa memperoleh bagian dari tiket masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung sebesar 1500/tiket, pemerintahan desa memiliki regulator dan aturan yang sah tentang PAD ini. Selain itu, pemerintahan desa menyatakan bahwa desa sudah membangun jalan ke lokasi wisata desa Curug Cikuluwung beserta gapura dan loket di wisata desa Curug Cikuluwung.

Dengan sikap yang diambil oleh pengelola wisata desa Curug Cikuluwung untuk berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintahan desa, pemerintahan desa melakukan musyawarah lagi untuk mengalihkan dana yang asalnya dialokasikan untuk pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung ke wisata desa lainnya. Kepala Desa Cibitung Wetan sudah berusaha mengundang pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung namun tidak pernah hadir. Komunitas Curug Cikuluwung ini merupakan satu keturunan atau memiliki leluhur yang sama. Dari



informan yang diwawancarai, diperoleh informasi bahwa ketua pengelola merupakan tim sukses mantan kandidat kepala desa yang kalah dari kepala desa saat ini. Informasi yang disampaikan oleh sekretaris wisata desa Curug Cikuluwung banyak yang berbeda dengan informan lainnya, yang disampaikan oleh sekretaris ada yang bertolakbelakang dengan realitas yang terjadi atau seperti memutarbalikkan fakta. Pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung masih enggan untuk bergabung dengan pemerintahan desa walaupun mereka kesulitan mendapatkan akses bantuan dari pemerintah karena memperoleh informasi bahwa orang kabupaten dan kecamatan akan membantu wisata desa memperoleh bantuan dari pemerintah walaupun tanpa sepengetahuan kepala desa asalkan ada ijin membuka wisata desa Curug Cikuluwung dari PT Indonesia Power. Saat ini, mantan kandidat kepala desa tersebut yang membantu pengajuan perijinan ke PT Indonesia Power. Kedekatan hubungan antara mantan kandidat kepala desa dengan ketua pengelola wisata desa Curug Cikuluwung ini juga dinilai oleh komunitas Curug Cikuluwung lainnya sebagai provokator yang memperburuk hubungan antara kepala desa dengan ketua pengelola dan sudah menjadi rahasia umum. Walaupun kepala desa menyatakan tidak ada permasalahan dengan mantan rivalnya tersebut, yang bermasalah dengan kepala desa hanya ketua pengelola saja, namun faktanya di komunitas Curug Cikuluwung sudah diketahui oleh komunitas bahwa mantan rival kepala desa terpilih mempengaruhi ketua pengelola wisata desa Curug Cikuluwung sehingga sampai saat ini kesepakatan belum tercapai.

Setelah dikonfirmasi ke pemerintahan kecamatan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor, tidak ada pernyataan tersebut bahkan mereka belum mengetahui adanya konflik dalam pengelolaan wisata desa tersebut dan setelah dikonfirmasi ke PT Indonesia Power yang mengajukan perijinan pengelolaan saat ini adalah PT Akaraya bukan atas nama pengelola wisata desa Curug Cikuluwung. Saat ini, wisata desa Curug Cikuluwung belum memperoleh ijin yang resmi dari PT Indonesia Power karena dari pengajuan perijinan sebelumnya yang difasilitasi BUMDes dan pemerintahan desa masih dalam proses peninjauan dan belum dilanjutkan karena permasalahan yang terjadi pada Ketua BUMDes yang lama.

a) Identifikasi isu-isu konflik pada konflik pertama

Dalam memetakan isu-isu konflik, peneliti menggunakan pohon konflik yang berdasarkan pada penyebab (berupa akar), masalah inti (berupa batang pohon), dan efek dari konflik (berupa ranting-ranting) tersebut.

Berdasarkan penjelasan identifikasi isu-isu konflik di atas, pemetaan isu-isu konflik pertama sebagai berikut; hal yang melatarbelakangi konflik pertama adalah tidak adanya sosialisasi ke tokoh agama tentang rencana Pemerintahan Desa Pamijahan membuka pintu masuk ke lokasi wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan, Paguyuban yang didukung oleh Kepala Desa Pamijahan dan anggota DPRD (suami Kepala Desa Pamijahan) memasang papan nama dan petunjuk arah ke wisata desa ke Curug Cikuluwung di Desa Pamijahan sedangkan isu yang menjadi inti konflik adalah kekhawatiran tokoh agama ketika membuka pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan akan menimbulkan dampak negatif yakni banyaknya tindakan asusila dan meminum minuman keras di lingkungan pesantren, paguyuban tetap membuka pintu masuk ke wisata desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

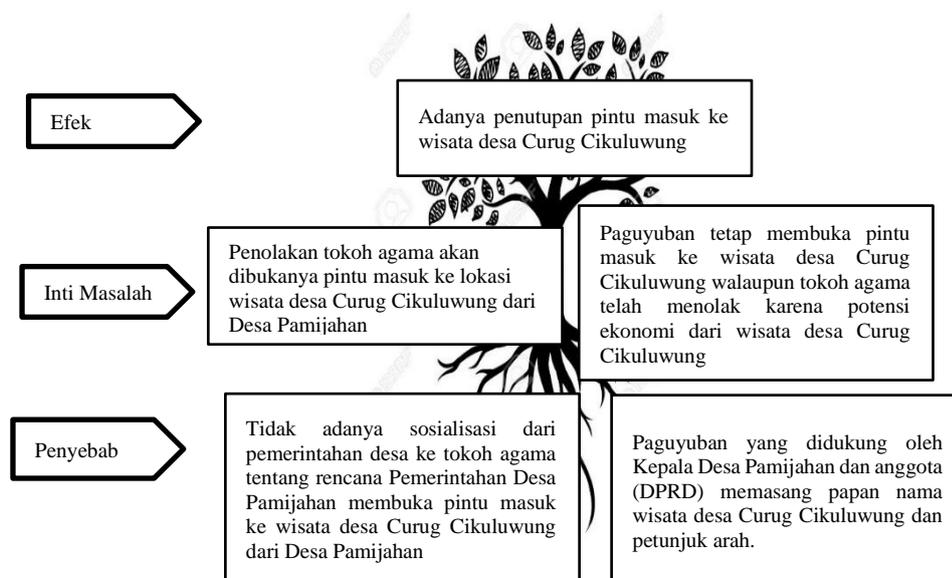
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

Curug Cikuluwung walaupun tokoh agama telah menolak karena potensi ekonomi dari wisata desa Curug Cikuluwung.

sehingga efek dari konflik ini adalah adanya penutupan pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan atau tidak dilegalkannya pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan. Konflik tersebut selesai dimediasi oleh pemerintahan Kecamatan Pamijahan dan BPD Desa Pamijahan, seperti tergambar dalam pohon konflik Gambar 5.1 berikut.

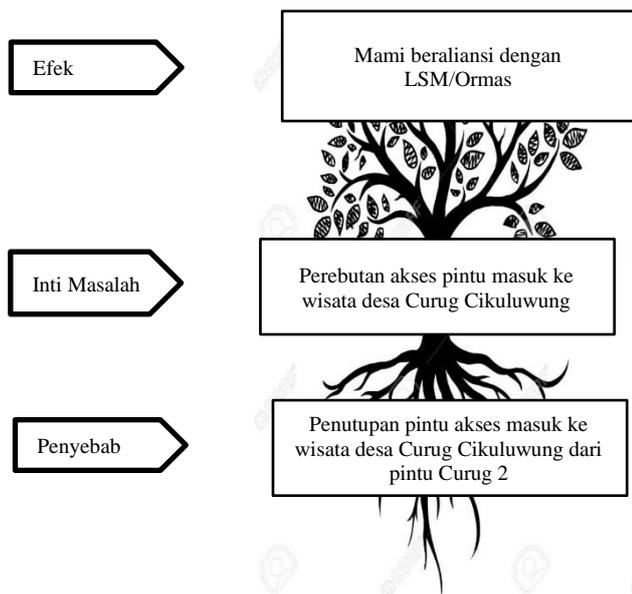


Gambar 5.1 Pohon Konflik antara Pemerintahan Desa Pamijahan dan tokoh agama

b) Identifikasi Isu-isu konflik pada konflik kedua

Dari hasil identifikasi isu-isu konflik, hal-hal yang melatarbelakangi konflik kedua pada pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung ini adalah penutupan pintu akses masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Curug 2 oleh BUMDes Cibitung Wetan. Inti dari konflik ini adalah perebutan akses masuk ke wisata Curug Cikuluwung. Adapun efek dari konflik ini adalah Mami beraliansi dengan Ormas/LSM Gempar yang ada di sekitar wisata desa Curug Cikuluwung, sebagaimana digambarkan pada Gambar 5.2.

Konflik ini sudah selesai dengan proses mediasi oleh Pemerintahan Desa Cibitung Wetan dan Kapolsek Cibungbulang dengan kesepakatan Mami diijinkan tetap membuka pintu masuk ke wisata Desa Curug Cikuluwung selama satu tahun, sedangkan ormas/LSM memperoleh bagian dari tiket masuk ke wisata desa seperti yang selama ini diinginkan oleh mereka.



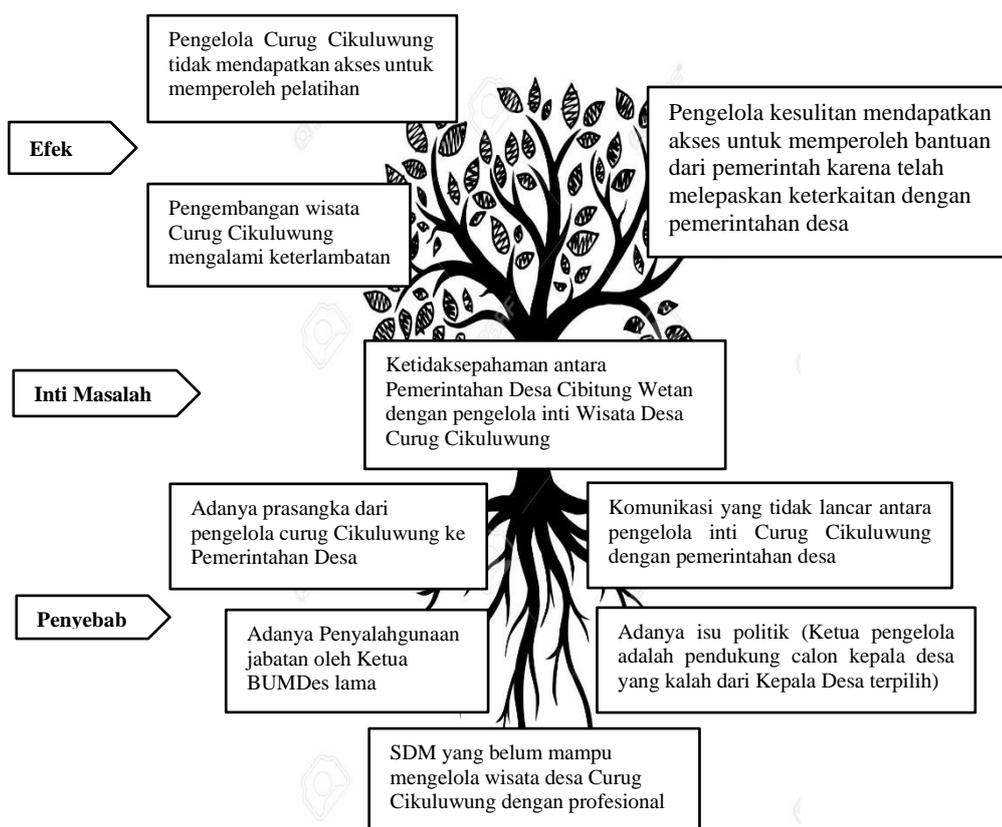
Gambar 5.2 Pohon konflik antara BUMDes dan warga Desa Pamijahan

c) Identifikasi Isu-isu konflik pada konflik ketiga

Berdasarkan hasil identifikasi, hal-hal yang melatarbelakangi konflik ketiga pada pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung adalah adanya penyalahgunaan jabatan oleh Ketua BUMDes yang lama sehingga menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap lembaga BUMDes, adanya prasangka dari pengelola wisata Desa Curug Cikuluwung kepada pemerintahan desa, adanya komunikasi yang tidak lancar antara pengurus Curug Cikuluwung dengan pemerintahan desa sehingga tidak adanya titik temu antara pengelola Curug Cikuluwung dengan pemerintahan desa, adanya isu politik yakni ketua pengelola Curug Cikuluwung merupakan pendukung calon kepala desa yang kalah dari kepala desa terpilih sehingga adanya provokasi dari mantan kandidat kepala desa tersebut, sumber daya manusia yang belum mampu mengelola wisata desa Curug Cikuluwung dengan profesional. Isu yang menjadi inti dari konflik pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung adalah ketidaksepahaman antara pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung dengan Pemerintahan Desa Cibitung Wetan. Adapun efek dari konflik ini yaitu pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung mengalami keterlambatan, pengurus Curug Cikuluwung tidak mendapatkan akses untuk memperoleh pelatihan, pengelola kesulitan mendapatkan akses untuk memperoleh bantuan dari pemerintah karena telah melepaskan keterikatan dari pemerintahan desa sebagaimana tergambar dalam Gambar 5.3.

Penyelesaian isu-isu konflik yang ada penting untuk dilakukan oleh komunitas Curug Cikuluwung dan Pemerintahan Desa Cibitung Wetan karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap keberlangsungan wisata desa ini juga terhadap kemajuan masyarakat sekitar Curug Cikuluwung bahkan terhadap kemajuan Desa Cibitung Wetan. Karenanya perlu dianalisis kepentingan dan pengaruh dari berbagai aktor yang terlibat sehingga dapat ditemukan penyelesaian yang komprehensif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Gambar 5.3 Pohon Konflik antara pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung dan pemerintahan Desa Cibitung Wetan

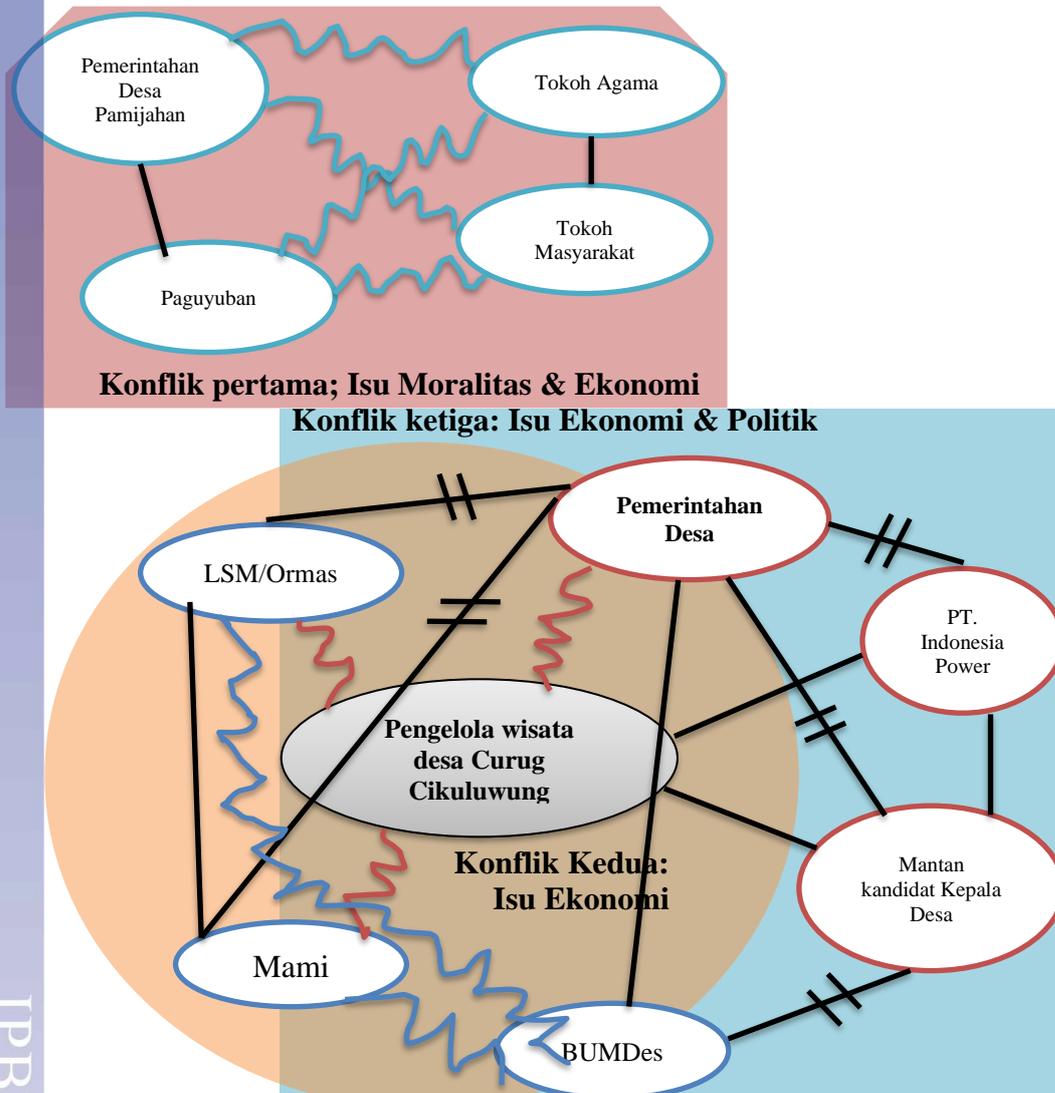
d) Keterkaitan Isu antar Konflik

Dari ketiga konflik yang terjadi dalam pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung terdapat isu-isu konflik yang saling terkait yakni isu ekonomi sebagaimana tergambar pada Gambar 5.4. Konflik pertama terjadi di Desa Pamijahan namun berhubungan dengan wisata desa Curug Cikuluwung. Konflik pertama yakni konflik antara Pemerintahan Desa Pamijahan dan tokoh agama serta tokoh masyarakat Desa Pamijahan berkaitan dengan isu moralitas/keagamaan yang merupakan konflik *non realistic* dan isu ekonomi yang merupakan konflik *realistic*. Konflik kedua antara BUMDes dan Mami (warga Desa Pamijahan) berkaitan dengan isu ekonomi yang termasuk ke dalam konflik *realistic*. Adapun, konflik ketiga antara pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung dan pemerintahan Desa Cibitung Wetan ada dua isu konflik sekaligus yakni isu ekonomi dan politik yang merupakan konflik *realistic* sekaligus konflik *non realistic*.

Menurut Coser (1956) konflik *realistic* akan berhenti jika aktor dapat menemukan alternatif yang sama-sama memuaskan dalam mencapai tujuannya sehingga konflik realistik lebih mudah diselesaikan dibandingkan dengan konflik *non realistic*. Hal ini terbukti dalam penyelesaian konflik pertama dan kedua dimana konflik kedua lebih cepat selesai dibandingkan dengan konflik pertama. Konflik pertama perlu waktu sekitar dua bulan sampai akhirnya pemerintahan desa berhasil memediasi antara tokoh agama dan pengelola wisata desa Curug

Cikuluwung. Pada konflik kedua yang merupakan perebutan akses pintu masuk ke lokasi wisata desa adalah isu ekonomi, konflik berhasil dimediasi dalam waktu yang relatif lebih cepat, diselesaikan melalui mediasi dengan kesepakatan warga desa Pamijahan (Mami) tetap bisa membuka pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung, LSM/Ormas mendapatkan bagian dari tiket masuk dan pengelola wisata desa Curug Cikuluwung bisa membuka tempat wisata tanpa diganggu oleh kegaduhan dari LSM/Ormas yang selama ini menuntut bagian dari biaya tiket masuk.

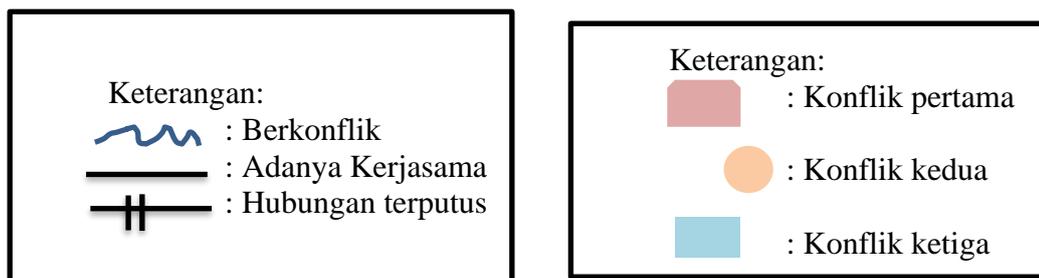
Adapun untuk konflik ketiga yang mana terdapat dua isu yakni isu ekonomi dan isu politik, *realistic* sekaligus *non realistic conflict* ini lebih sulit untuk diselesaikan karena isu politiknya tersebut. Hubungan pemerintahan desa dengan pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung yang merupakan tim sukses dari mantan kandidat kepala desa rival kepala desa saat ini kurang harmonis, terlebih ketika ada penyalahgunaan jabatan oleh ketua BUMDes menjadi kesempatan bagi mantan rival kepala desa tersebut untuk memprovokasi pengelola agar keluar dari BUMDes yang berujung pengelola wisata desa Curug Cikuluwung memutuskan mengelola sendiri tanpa bantuan dari pemerintahan desa.



Gambar 5.4 Analisis antar kasus konflik

Hak Cipta milik IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



5.1.3 Pemetaan Aktor-aktor Yang Terlibat dalam Konflik

Hubungan aktor yang terlibat dalam konflik akan terlihat apabila dilakukan pemetaan konflik. Pemetaan konflik ini dilakukan di antaranya untuk lebih memahami situasi dengan baik, untuk melihat hubungan di antara berbagai pihak secara lebih jelas, untuk menjelaskan di mana letak kekuasaan, untuk memeriksa keseimbangan masing-masing kegiatan atau reaksi, untuk melihat para sekutu atau sekutu yang potensial berada di mana dan untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan.

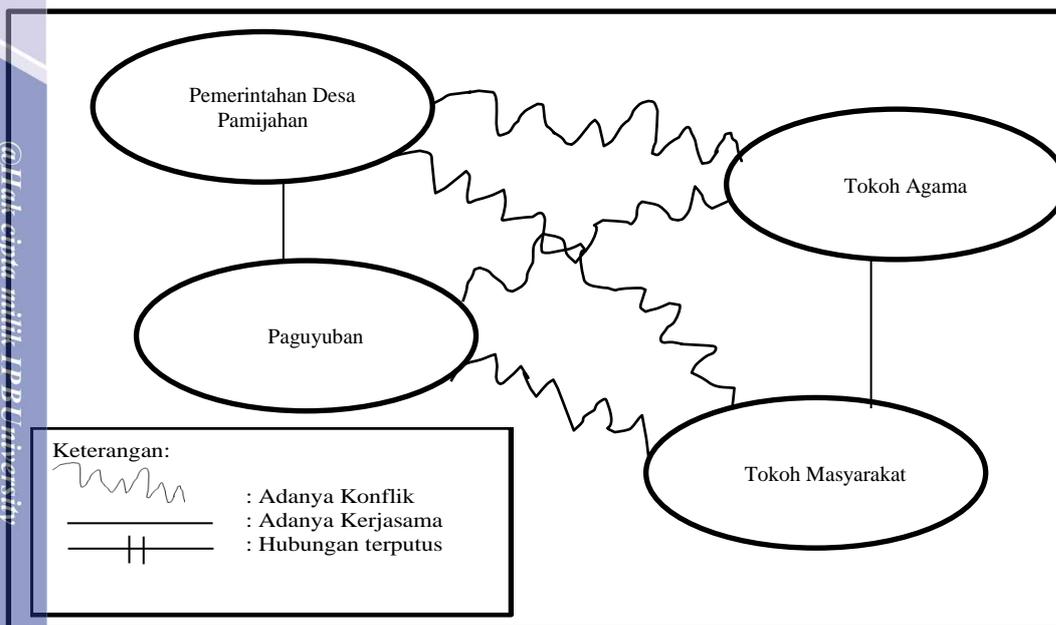
Selanjutnya dari masing-masing aktor yang terlibat dianalisis hubungannya. Hubungan masing-masing aktor tersebut dapat berbentuk kerjasama, konflik, dan hubungan yang terputus. Kerjasama menunjukkan hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan antar *stakeholder*. Konflik menunjukkan hubungan yang tidak harmonis antar *stakeholder*, sedangkan hubungan yang terputus menunjukkan tidak ada kerjasama juga tidak ada konflik.

1. Pemetaan Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik pertama

Berdasarkan identifikasi aktor yang terlibat dalam konflik pertama ditemukan aktor-aktor yang berkonflik yakni tokoh agama Desa Pamijahan, masyarakat Desa Pamijahan, paguyuban, Pemerintahan Desa Pamijahan, anggota DPRD Desa Pamijahan dan mediator pemerintahan Kecamatan Pamijahan dan BPD Desa Pamijahan. Selanjutnya hubungan antar aktor ditunjukkan pada Tabel 5.2 dan Gambar 5.4.

Tabel 5.2 Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Curug Cikuluwung pertama

No	Pihak-pihak yang terlibat Konflik	Kepentingan atas Wisata Desa Curug Cikuluwung
1	Paguyuban	Kelompok masyarakat yang didukung oleh Kepala Desa Pamijahan yang membuka pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung
2	Tokoh agama	<i>Opinion leader</i> di komunitas Curug Cikuluwung
3	Pemerintahan Desa Pamijahan	Merupakan penanggungjawab wilayah Desa Pamijahan,
4	Tokoh Masyarakat	<i>Opinion leader</i> di komunitas Curug Cikuluwung



Gambar 5.5 Pemetaan Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik antara pemerintahan Desa Pamijahan dan tokoh agama

Dari Gambar 5.5 tersebut terlihat ada empat aktor yang terlibat dalam konflik pertama. Pemerintahan Desa Pamijahan berkonflik dengan tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta paguyuban berkonflik dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Pamijahan. Selain itu, dari Gambar 5.5 tersebut terlihat garis lurus yang artinya ada kerjasama di antara aktor-aktor tersebut yakni antara Pemerintahan Desa Pamijahan dan paguyuban, serta antara tokoh agama dan tokoh masyarakat. Konflik ini telah ada kesepakatan dari hasil mediasi BPD Desa Pamijahan dan Pemerintahan Kecamatan Pamijahan berupa penutupan pintu akses ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan dan tidak boleh dilegalkannya akses masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan.

2. Pemetaan Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik kedua

Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik kedua yakni konflik antara BUMDes dan warga desa tetangga yakni Desa Pamijahan (Mami) diperoleh beberapa aktor yang terlibat, yakni: BUMDes, Pengelola wisata desa Curug Cikuluwung, Mami, dan Ormas/LSM Gempar. Konflik ini sudah selesai di mediasi oleh Pemerintahan Desa Cibitung Wetan dan Kapolsek Cibungbulang. Selanjutnya hubungan antar aktor dijelaskan pada Tabel 5.3 dan Gambar 5.5.

Tabel 5.3 Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Curug Cikuluwung kedua

No	Pihak-pihak yang terlibat Konflik	Kepentingan atas Wisata Desa Curug Cikuluwung
1	Pengelola wisata desa Curug Cikuluwung	Mengelola wisata desa Curug Cikuluwung, mengembangkan potensi wisata desa Curug Cikuluwung
2	Mami	Warga Desa Pamijahan (desa tetangga) yang asalnya hanya berjualan sekarang ingin memperoleh keuntungan membuka akses masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung
3	BUMDes Cikahuripan	Mengembangkan potensi wisata desa Curug Cikuluwung
4	Ormas/LSM	Ingin memperoleh bagian dari tiket masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung
5	Pemerintahan Desa	Penanggungjawab wilayah desa Cibitung Wetan, mengembangkan potensi wisata desa Curug Cikuluwung
6	Kapolsek Cibungbulang	Menjaga agar wisata desa Curug Cikuluwung beroperasi dengan aman dan tentram

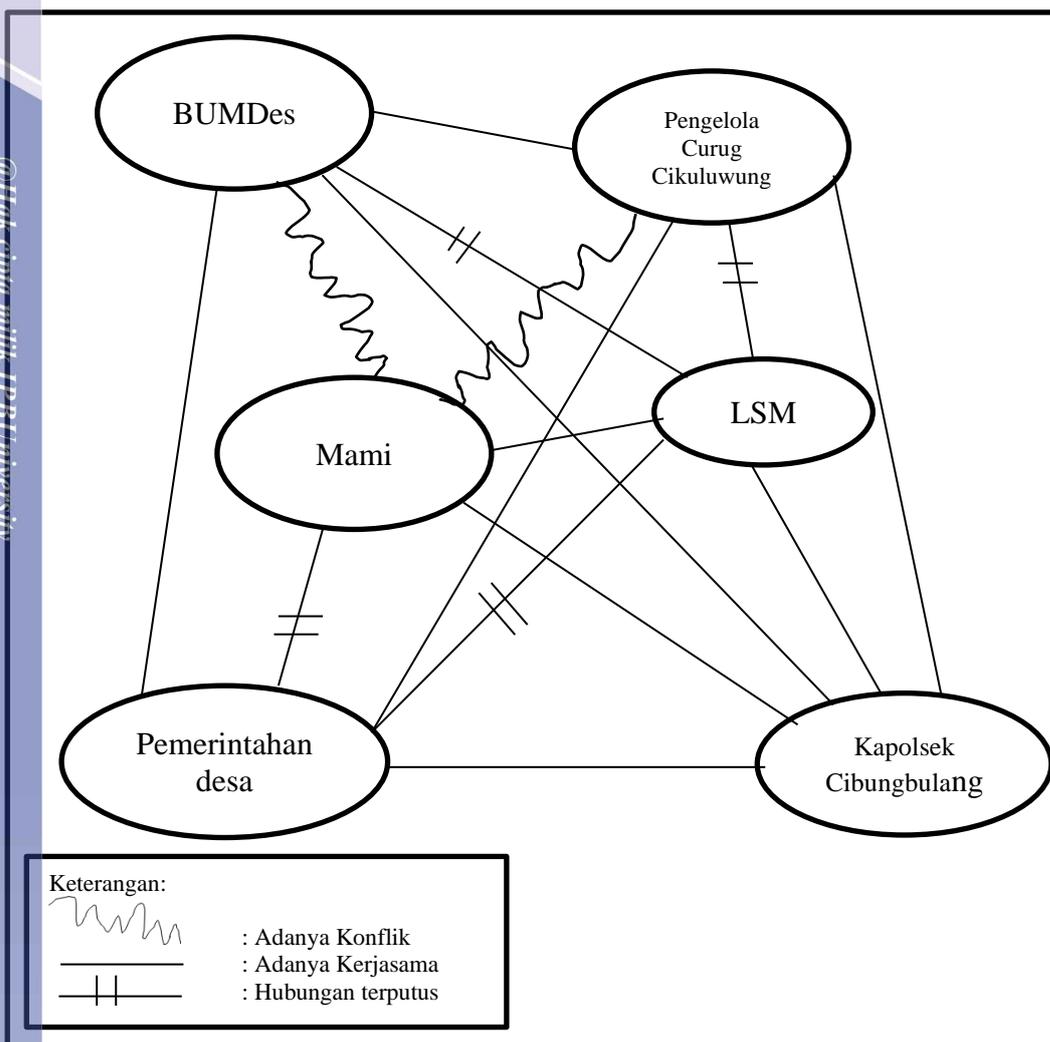
@Hak cipta milik IPBUniversity

IPBUniversity

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.





Gambar 5.6 Pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik BUMDes dengan warga Desa Pamijahan

Berdasarkan Gambar 5.6, garis lurus menunjukkan adanya kerjasama hal ini ditunjukkan oleh BUMDes dengan Pengelola Curug Cikuluwung, pemerintahan desa, Kapolsek Cibungbulang. Selain itu, adanya kerjasama juga ditunjukkan oleh pengelola wisata desa Curug Cikuluwung dengan BUMDes, pemerintahan desa dan Kapolsek Cibungbulang, kemudian antara Mami dan LSM, antara pemerintahan desa dan Kapolsek Cibungbulang, antara LSM dan Kapolsek Cibungbulang serta antara Kapolsek Cibungbulang dan Mami. Hubungan terputus ditunjukkan oleh BUMDes dengan LSM, pengelola wisata desa Curug Cikuluwung dengan LSM, pemerintahan desa dengan Mami serta pemerintahan desa dengan LSM. Adapun yang berkonflik adalah BUMDes dengan Mami dan pengelola wisata desa Curug Cikuluwung dengan Mami.

Konflik ini terjadi karena adanya penutupan akses pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan oleh BUMDes, dengan tujuan untuk mengintegrasikan akses pintu masuk ke lokasi wisata dari satu pintu utama yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

resmi. Namun, konflik tersebut sudah selesai dengan *win-win solution* yang di mediasi oleh Pemerintahan Desa Cibitung Wetan dan Kapolsek Cibungbulang.

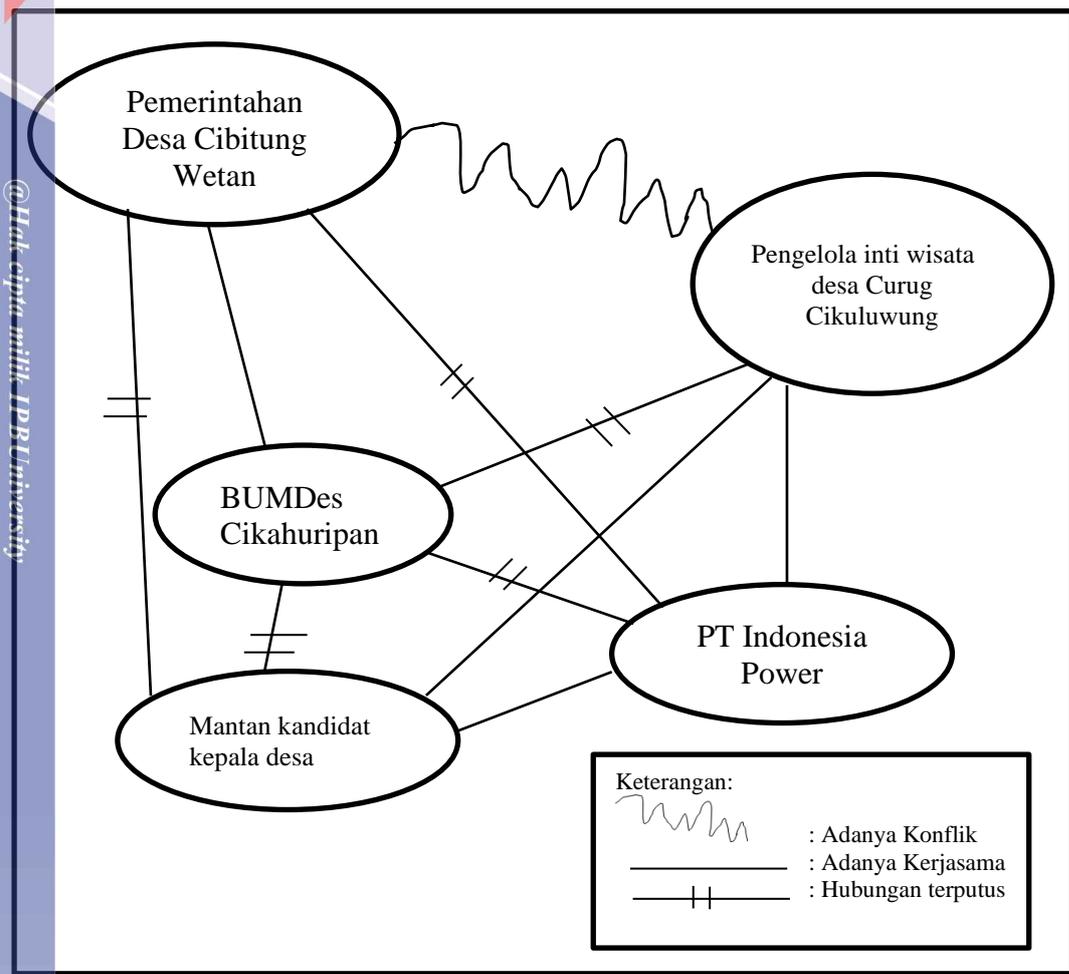
3. Pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik ketiga

Melalui identifikasi aktor yang terlibat dalam konflik pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung antara pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung dan pemerintahan desa, didapatkan beberapa aktor yakni; ketua dan wakil ketua pengelola Curug Cikuluwung (pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung), pemerintahan desa, BUMDes, PT Indonesia Power dan mantan kandidat kepala desa. Selanjutnya mengenai aktor-aktor yang terlibat tersebut lebih jelasnya dalam Tabel 5.4, dan hubungan antar *stakeholder* disajikan secara grafis pada Gambar 5.6.

Tabel 5.4 Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Curug Cikuluwung ketiga

No	Pihak-pihak yang terlibat Konflik	Kepentingan atas Wisata Desa Curug Cikuluwung
1	Pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung	Pengelola wisata desa Curug Cikuluwung saat ini merupakan pengurus baru dari wisata desa curug cikuluwung yang merupakan pelopor wisata desa Curug Cikuluwung
2	Pemerintahan Desa Cibitung Wetan	Penanggungjawab wilayah Desa Cibitung Wetan, mengembangkan potensi wisata desa Curug Cikuluwung
3	BUMDes Cikahuripan	Badan Usaha Milik Desa yang mengelola unit bisnis yang terdapat di Desa Cibitung Wetan, termasuk unit pariwisata, mengembangkan potensi wisata desa Curug Cikuluwung
4	PT Indonesia Power	Pemilik lahan di mana lokasi Curug Cikuluwung berada, memperoleh sewa lahan
5	Mantan kandidat kepala desa	Membantu pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung yang merupakan tim sukses Ketika pemilihan kepala desa





Gambar 5.7. Pemetaan Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik wisata desa Curug Cikuluwung antara pengelola inti dan pemerintahan desa

Berdasarkan Gambar 5.7 tersebut, garis lurus menunjukkan adanya kerjasama. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kerjasama antara Pemerintahan Desa Cibitung Wetan dan BUMDes Cikahuripan, kemudian antara pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung dan mantan kandidat kepala desa, antara pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung dan PT Indonesia Power serta antara mantan kandidat kepala desa dan PT Indonesia Power. Pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung berkonflik dengan Pemerintahan Desa Cibitung Wetan, sedangkan pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung memiliki hubungan yang terputus dengan BUMDes Cikahuripan. Kemudian Pemerintahan Desa Cibitung Wetan hubungannya terputus dengan PT Indonesia Power dan dengan mantan kandidat kepala desa, BUMDes Cikahuripan memiliki hubungan yang terputus dengan PT Indonesia Power dan mantan kandidat kepala desa.

Konflik yang terjadi antara Pemerintahan Desa Cibitung Wetan dan pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung muncul awalnya dari adanya penyalahgunaan wewenang oleh Ketua BUMDes Cikahuripan lama. Karena BUMDes berada di bawah pemerintahan desa, sehingga pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung beranggapan kalau pemerintahan desa mengetahui apa yang dilakukan oleh Ketua BUMDes sebelumnya. Pemerintahan Desa sudah meluruskan hal tersebut dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

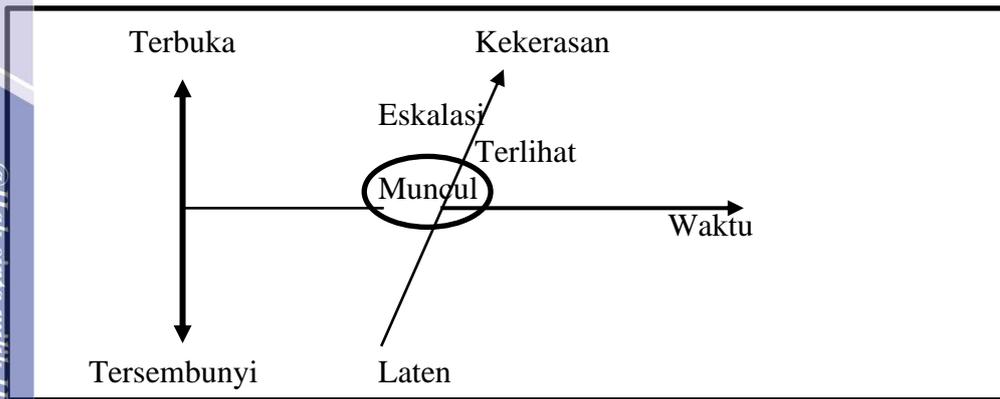
mengumpulkan pengelola wisata desa Curug Cikuluwung bersama komunitasnya juga BUMDes di kantor desa. Dari pertemuan tersebut disepakati mengenai usulan untuk pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung dan alokasi dari tiket masuk wisata desa Curug Cikuluwung sebagai PAD Desa. Dalam musyawarah tersebut, pemerintahan desa akan mengalokasikan dana untuk pengembangan wisata Desa Curug Cikuluwung sebesar Rp 400.000.000 dari Dana Desa TA 2020. Namun dalam perjalanannya, pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung menarik keterkaitannya dari pemerintahan desa dengan alasan keberatan memberikan PAD dari tiket masuk. Tiket masuk ke Curug Cikuluwung sebesar Rp 20.000, menurut pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung, Desa meminta Rp 10.000 yang akan dialokasikan untuk PAD, asuransi, pengembangan usaha dan dana sosial, sedangkan Rp 10.000 yang masuk ke pengelola akan dialokasikan untuk pekerja, sewa lahan, dan LSM. Namun, jumlah pembagian tiket masuk ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Ketua BUMDes yang baru, bahwa alokasi dari tiket masuk wisata desa Curug Cikuluwung ini hanya Rp 6.000 yang masuk ke PAD desa. Melalui musyawarah desa khusus, pemerintahan desa memindahkan alokasi yang asalnya untuk pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung ke pengembangan wisata desa yang lainnya meskipun pada akhirnya dana tersebut dialokasikan untuk BLT karena pandemi.

Pada saat awal bergabungnya wisata desa Curug Cikuluwung dengan BUMDes Cikahuripan, Pemerintahan Desa Cibitung Wetan bersama BUMDes memfasilitasi perijinan dibukanya wisata desa ke PT Indonesia Power di Saguling. Namun saat ini, semenjak kepengurusan BUMDes diganti, pemerintahan desa begitu pun dengan BUMDes tidak ada komunikasi dengan pihak PT Indonesia Power. Saat ini, pengelola Curug Cikuluwung dalam proses mengurus perijinan ke PT Indonesia Power dibantu oleh mantan kandidat kepala desa. Pengelola wisata desa Curug Cikuluwung memerlukan ijin dibukanya wisata desa Curug Cikuluwung karena Curug Cikuluwung berada di lahan PT Indonesia Power. Namun, dengan keluarnya dari keterikatan dengan pemerintahan desa, pengelola wisata desa Curug Cikuluwung mengakui kesulitan mendapatkan akses bantuan, karena pengajuan proposal harus sepengetahuan pemerintahan desa dalam hal ini Kepala Desa. Selain itu, pengelola Curug Cikuluwung sudah berkomunikasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten bahwa mereka akan membantu akses memperoleh bantuan asalkan memiliki surat ijin diperbolehkannya membuka wisata desa Curug Cikuluwung dari PT Indonesia Power. Setelah dikonfirmasi kepada kedua instansi tersebut, hal itu tidaklah benar karena pemerintah pun tidak bisa memfasilitasi tempat wisata yang berkonflik.

5.1.4 Identifikasi Tahapan Konflik

Pada umumnya konflik berubah setiap saat, melalui berbagai tahap aktivitas, tahap-tahap ini penting untuk diketahui. Dari hasil pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik dan wawancara dengan informan bisa dikatakan konflik yang terjadi pada wisata desa Curug Cikuluwung adalah konflik terbuka karena sudah muncul ke permukaan atau terlihat dan beberapa orang di komunitas sudah mengetahuinya walaupun mereka ada yang tidak secara jelas menyatakan ada konflik antara pemerintahan desa dan pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung seperti yang tergambar pada Gambar 5.8. Engel dan Korf (2005) menggambarkan tahapan konflik mulai dari laten, muncul ke permukaan hingga kekerasan (*violent*).

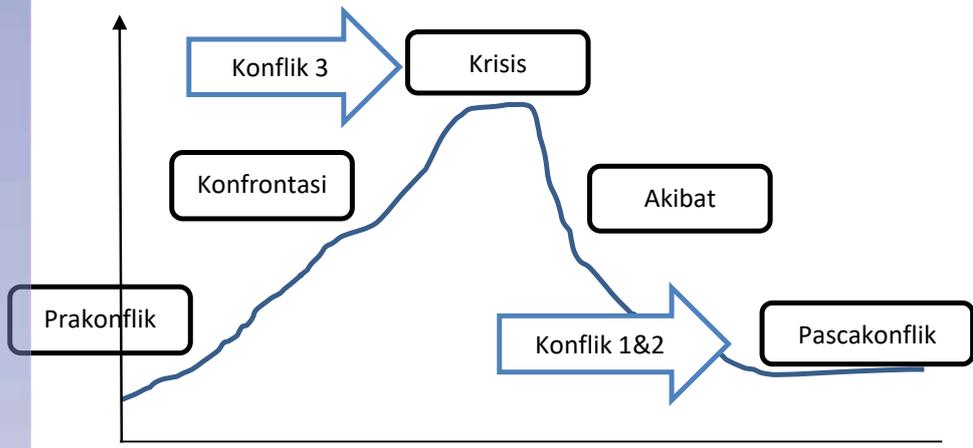




Gambar 5.8 Tahapan Konflik Wisata Desa Curug Cikuluwung menurut Engel dan Korf

Sementara itu, Fisher et al. (2001) membagi tahapan konflik menjadi lima tahap, yakni: Prakonflik, Konfrontasi, Krisis, Akibat, dan Pascakonflik. Tahapan konflik pertama dan kedua di wisata desa Curug Cikuluwung merujuk ke tahapan konflik menurut Fisher seperti yang tergambar pada Gambar 5.8 berada pada tahap pascakonflik karena situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua pihak.

Berbeda dengan kedua konflik sebelumnya, tahapan konflik ketiga dalam pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung ini berada pada tahap krisis, karena aktor-aktor yang berkonflik masing-masing teguh dengan pendirian mereka. Konflik saat ini terjadi berawal dari adanya penyalahgunaan wewenang oleh ketua BUMDes yang lama, sehingga muncul rasa tidak percaya dari pengelola ke pemerintahan desa. Meskipun musyawarah sudah dilakukan dengan komunitas Curug Cikuluwung, namun pengurus inti tidak pernah bertemu secara langsung dengan pemerintahan desa.



Gambar 5.8 Tahapan Konflik Wisata Desa Curug Cikuluwung menurut Fisher

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

5.1.5 Identifikasi Akibat Konflik

Selanjutnya untuk identifikasi akibat konflik, akan menggunakan alat bantu analisis dari Lewis Coser yakni konflik konstruktif dan konflik destruktif. Konflik konstruktif adalah konflik yang “berfungsi positif”, sebaliknya konflik destruktif adalah konflik yang mengakibatkan kerusakan bahkan kehancuran, baik harta benda maupun jiwa manusia (Kinseng, 2013).

Menurut Lewis Coser (1964) konflik memiliki dua fungsi yakni konflik konstruktif dan konflik destruktif. Konflik yang pertama dan kedua merupakan konflik konstruktif karena setelah terjadi konflik hubungan kedua pihak yang berkonflik menjadi lebih baik. Pada konflik pertama hubungan komunikasi antara pengelola dengan tokoh agama menjadi lebih baik begitupun dengan konflik kedua hubungan pihak yang berkonflik menjadi lebih baik, walaupun untuk pengelola wisata desa Curug Cikuluwung menjadi memiliki kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah uang dari tiket masuk untuk bagian LSM/ormas, tetapi wisata desa tetap bisa berjalan tanpa kisruh diantara dua belah pihak.

Adapun akibat konflik ketiga yang terjadi di wisata desa Curug Cikuluwung merupakan konflik destruktif karena mengakibatkan terlambatnya pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung, pengurus Curug Cikuluwung tidak mendapatkan akses untuk mengikuti pelatihan, pengelola tidak mendapatkan akses memperoleh bantuan dari pemerintah. Berdasarkan identifikasi akibat konflik diatas maka konflik yang terjadi di Curug Cikuluwung termasuk ke dalam konflik destruktif karena membuat wisata desa Curug Cikuluwung tidak berkembang bahkan cenderung mengalami kemunduran. Hal ini terlihat dari akses yang pengelola tidak peroleh baik pembiayaan maupun peningkatan kapasitas pengelola.

5.2 Analisis Stakeholder

Dalam menganalisis stakeholder ini menggunakan teori *stakeholder salience* dari Mitchell (1997), merujuk pada teori ini atribut-atribut yang membedakan satu *stakeholder* dengan yang lainnya ada tiga atribut, yaitu: 1) Power, 2) Legitimasi, dan 3) Urgensi.

5.2.1 Analisis Stakeholder pada Konflik antara Pemerintahan Desa Pamijahan dan Tokoh Agama

Stakeholder yang terlibat dalam konflik ini ada empat pihak. Pihak yang berkonflik adalah sebagai berikut;

a. Pemerintahan Desa Pamijahan

Pemerintahan Desa Pamijahan merupakan penanggungjawab wilayah Desa Pamijahan diduga berada di belakang paguyuban yang membuka pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan walaupun tokoh agama dan tokoh masyarakat sudah menolak pembukuan pintu akses masuk tersebut. Untuk atribut kekuasaan, legitimasi dan urgensi memiliki nilai tinggi semua.

b. Tokoh Agama

Tokoh agama ini merupakan pemuka agama di Desa Pamijahan yang lokasinya berada di sekitar wisata desa Curug Cikuluwung, juga *opinion leader* yang memiliki jamaah yang cukup banyak karena memiliki pesantren. Untuk atribut

kekuasaan tokoh agama memiliki nilai yang tinggi, sedangkan atribut legitimasi dan urgensi tokoh agama memiliki nilai yang rendah.

c. Tokoh Masyarakat

Merupakan opinion leader selain tokoh agama, memiliki pengaruh yang cukup besar di masyarakat Desa Pamijahan. Memiliki nilai yang tinggi untuk atribut kekuasaan dan memiliki nilai yang rendah untuk atribut legitimasi dan urgensi.

d. Paguyuban

Merupakan kelompok yang membuka akses pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung yang diduga didukung oleh Pemerintahan Desa Pamijahan. Memiliki nilai yang rendah untuk atribut yakni kekuasaan, legitimasi, dan urgensi.

5.2.2 Analisis Stakeholder pada Konflik antara BUMDes dengan warga dari Desa Pamijahan (Mami)

Stakeholder yang terlibat dalam konflik ini adalah BUMDes, pengelola wisata desa Curug Cikuluwung, Mami (warga Desa Pamijahan), dan Ormas/LSM Gempar.

a. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa Cibitung Wetan dibentuk pada tahun 2018 merupakan Lembaga desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan Desa Cibitung wetan secara ekonomi. Salah satu unit usaha yang bentuk oleh BUMDes adalah unit usaha pariwisata dimana wisata desa Curug Cikuluwung bernaung. Nilai atribut BUMDes akan kekuasaan dan legitimasi mempunyai nilai yang rendah sedangkan untuk urgensi memiliki nilai yang sedang.

b. Pengelola wisata desa Curug Cikuluwung

Yang mewakili komunitas Curug Cikuluwung mengelola wisata desa. komunitas ini terbentuk pada tahun 2018 setelah berhasil membuka wisata desa Curug Cikuluwung. Setelah kepengurusan terbentuk, komunitas ini baru bergabung dengan BUMDes. Untuk atribut kekuasaan, pengelola Curug Cikuluwung memiliki nilai yang sedang, sedangkan untuk atribut legitimasi dan urgensi, pengelola Curug Cikuluwung memiliki nilai yang tinggi.

c. Warga Desa Pamijahan (Mami)

Adalah seorang warga dari desa tetangga yang berjualan di dekat lokasi Curug Cikuluwung, dan melihat potensi ekonomi sehingga dia membuka akses pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan. Nilai atribut kekuasaan, legitimasi dan urgensi dari Mami ini rendah.

d. Ormas/LSM Gempar

Merupakan organisasi masyarakat yang mengadvokasi Mami untuk tetap bisa membuka akses pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan dan mereka menginginkan ada bagian dari hasil penjualan tiket masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung. Nilai atribut kekuasaan, legitimasi, dan urgensi untuk LSM ini adalah rendah.

e. Kapolsek Cibungbulang

Kapolsek Cibungbulang sekaligus Kapolsek Pamijahan selaku pengayom masyarakat dalam konflik ini berperan sebagai mediator. Nilai atribut kekuasaan, legitimasi dan urgensi untuk Kapolsek ini tinggi.

f. Pemerintahan Desa Cibitung Wetan

Pemerintahan desa selaku pemangku kebijakan di wilayah desa Cibitung Wetan dalam konflik ini berperan sebagai mediator. Adapun nilai atribut kekuasaan, legitimasi dan urgensi untuk Pemerintahan Desa Cibitung Wetan ini tinggi.

5.2.3 Analisis Stakeholder pada Konflik antara Pengelola Inti Wisata Desa Curug Cikuluwung dengan Pemerintahan Desa Cibitung Wetan

Stakeholder yang terlibat dalam konflik ini terdiri dari Lembaga pemerintah, komunitas dan BUMN. Lembaga pemerintah yang terlibat dalam konflik ini adalah Pemerintahan Desa, BUMDes, sedangkan komunitas atau masyarakat yang terlibat dalam konflik ini adalah Komunitas Curug Cikuluwung dan mantan kandidat kepala desa, serta BUMN adalah PT Indonesia Power. Dalam menganalisis *stakeholders* ini menggunakan teori *stakeholder salience* dari (Mitchell *et al.* 1997) sebagai berikut;

a. Pemerintahan Desa Cibitung Wetan

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa dimana wisata desa Curug Cikuluwung berada. Pemerintahan Desa sangat mendukung pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung, bahkan sudah mempunyai rencana untuk mengembangkan wisata desa Curug Cikuluwung ini menjadi Desa Wisata Cibitung Wetan. Tujuan wisatanya akan berkesinambungan dari Curug Cikuluwung ke tujuan wisata lainnya yang ada dan yang akan dikembangkan oleh Pemerintahan Desa Cibitung Wetan dan BUMDes Cikahuripan. Namun ketika pengelolanya tidak mau terkait dengan pemerintahan desa maka pemerintahan desa pun tidak mau ikut campur dalam pengelolaan wisata desa Curug Cikuluwung. Adapun untuk nilai atribut Pemerintahan Desa Cibitung Wetan memiliki nilai yang tinggi untuk semua atribut, yakni untuk kekuatan, legitimasi dan urgensinya.

b. Komunitas Curug Cikuluwung

Komunitas Curug Cikuluwung terbentuk pada tahun 2018 setelah wisata desa ini dibuka untuk umum. Komunitas ini dibentuk oleh masyarakat sekitar wisata desa Curug Cikuluwung yang terdiri dari pengurus, pemandu, penjaga loket. Sampai saat ini sudah dua orang yang menjadi Ketua pengelola wisata desa Curug Cikuluwung. Komunitas wisata desa Curug Cikuluwung bergabung dengan BUMDes Cikahuripan Desa Cibitung Wetan pada bulan Agustus 2018. Pada saat bergabung dengan BUMDes pemandu wisata desa Curug Cikuluwung mengikuti pelatihan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. Untuk atribut kekuasaan, pengelola Curug Cikuluwung memiliki nilai yang sedang, sedangkan untuk atribut legitimasi dan urgensi, pengelola Curug Cikuluwung memiliki nilai yang tinggi.

c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cikahuripan

BUMDes Cikahuripan merupakan usaha desa yang dikelola oleh pengurus di bawah pemerintahan desa. BUMDes ini dibentuk untuk mengelola kebutuhan dan potensi desa. Dalam BUMDes ini terdiri dari beberapa unit usaha, salahsatunya adalah unit pariwisata dimana wisata desa Curug Cikuluwung berada dalam unit usaha ini. BUMDes Cikahuripan dibentuk pada tahun 2018, pada masa pengembangannya Ketua BUMDes menyalahgunakan wewenang. Namun saat ini ketua BUMDes sudah diganti dan kepengurusannya pun diganti semua. Adapun untuk nilai atribut BUMDes akan kekuasaan dan legitimasi

mempunyai nilai yang rendah sedangkan untuk urgensi memiliki nilai yang sedang.

d. PT Indonesia Power (PLN)

PT Indonesia Power merupakan BUMN pemilik lahan dimana lokasi wisata desa Curug Cikuluwung berada. Lokasi ini berada dalam wilayah kerja PLTA Kracak yang kantornya di Kecamatan Leuwiliang dan pusatnya di Saguling Rajamandala, Bandung Barat, Jawa Barat. Pengurus BUMDes yang lama dan Pemerintahan Desa Cibitung Wetan telah memfasilitasi komunitas wisata Desa Curug Cikuluwung untuk mengurus perijinan ke PT Indonesia Power di Rajamandala Bandung. Proses perijinan tersebut masih dalam proses review dari PT Indonesia Power dan karena ada permasalahan dari Ketua BUMDes yang lama sehingga pengurusan perijinan belum selesai. Saat ini perijinan pembukaan lokasi wisata dilakukan oleh pihak swasta yakni PT Akaraya. PT Indonesia Power memiliki nilai yang tinggi untuk atribut legitimasi sedangkan untuk atribut kekuatan dan urgensi memiliki nilai yang sedang.

e. Mantan Kandidat Kepala Desa

Mantan kandidat kepala desa ini adalah orang di luar komunitas Curug Cikuluwung namun masih penduduk Desa Cibitung Wetan. Dia merupakan salah satu *rival* kepala desa yang saat ini menjabat pada saat pemilihan kepala desa. Mantan kandidat kepala desa ini merupakan relasi dekat dari Ketua Pengelola Komunitas Curug Cikuluwung saat ini yang pada saat pemilihan adalah tim suksesnya. Menurut pengelola mantan kandidat kepala desa ini yang sekarang membantu pengelola wisata desa Curug Cikuluwung untuk memperoleh perijinan ke PT Indonesia Power. Adapun nilai atribut untuk mantan kandidat kepala desa ini memiliki nilai yang rendah untuk kekuasaan, legitimasi, dan urgensinya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan nilai masing-masing stakeholders, secara ringkas dijelaskan pada Tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.5 *Stakeholders* pada pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung

Kelompok	Kekuasaan	Legitimasi	Urgensi
Definitif			
Pemerintahan Desa Cibitung Wetan	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kapolsek Cibungbulang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Pemerintahan Desa Pamijahan	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Expectant/Pengharap Komunitas Curug Cikuluwung	Sedang	Tinggi	Tinggi
Laten			
PT Indonesia Power	Sedang	Tinggi	Sedang
BUMDes Cikahuripan Cibitung Wetan	Sedang	Rendah	Sedang

Tabel 5.5 Stakeholders pada pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung (lanjutan)

Tokoh Agama	Tinggi	Rendah	Rendah
Tokoh Masyarakat	Tinggi	Rendah	Rendah
Paguyuban	Rendah	Rendah	Rendah
Mami (warga Desa Pamijahan)	Rendah	Rendah	Rendah
Ormas/LSM Gempar	Rendah	Rendah	Rendah
Mantan Kandidat Kepala Desa	Rendah	Rendah	Rendah

Dilihat dari tabel di atas, Pemerintahan Desa Cibitung Wetan dan Kapolsek Cibungbulang serta Pemerintahan Desa Pamijahan memiliki nilai yang tinggi pada semua atribut sehingga masuk kelompok definitif, sedangkan komunitas Curug Cikuluwung memiliki kekuasaan yang sedang namun memiliki nilai yang tinggi pada atribut legitimasi dan urgensi sehingga masuk pada kelompok *expectant* (pengharap). Adapun BUMDes dan PT Indonesia Power, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, paguyuban, Mami, ormas/LSM Gempar dan mantan kandidat Kepala Desa masuk kelompok laten.

5.3 Manajemen Konflik

5.3.1 Identifikasi Manajemen Konflik sebelumnya

Dalam pengembangan wisata desa tidak terlepas dari konflik termasuk dalam pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung. Konflik yang terjadi saat ini, bukanlah konflik pertama dalam pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung. Konflik yang terjadi sebelumnya yakni yang pertama adanya penolakan dari tokoh agama terhadap dibukanya akses pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan. Namun permasalahan tersebut sudah selesai dimediasi oleh Pemerintahan Kecamatan Pamijahan dan BPD Desa Pamijahan.

Konflik kedua adalah adanya perebutan akses pintu masuk ke lokasi Curug Cikuluwung. Wisata Desa Curug Cikuluwung ini terdiri dari dua air terjun yang disebut curug 1 dan curug 2. Untuk masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung bisa dari 3 akses pintu masuk sehingga ada masyarakat warga desa tetangga yang membuka akses pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari pintu lainnya yang tidak resmi yakni dari Curug 2.

Dengan tujuan agar pengunjung masuk terintegrasi dari satu pintu resmi maka BUMDes bersama pengurus Curug Cikuluwung menutup pintu akses masuk tersebut. Namun hal tersebut tidak diterima oleh warga yang membuka pintu akses masuk dari pintu lainnya tersebut. Hal ini terdengar oleh ormas/LSM yang ada di sekitar lokasi Curug Cikuluwung sehingga konflik pun terjadi. Warga desa tetangga yang membuka pintu akses masuk ke Curug Cikuluwung dari pintu lainnya “dilindungi” oleh ormas/LSM Gempar.



Untuk menyelesaikan konflik ini, pemerintahan desa Cibitung Wetan bersama dengan Kapolsek Cibungbulang memediasi penyelesaian konflik ini di aula kantor Kecamatan Pamijahan. Dari mediasi ini disepakati beberapa hal, yakni warga tersebut diijinkan untuk membuka pintu masuk selama setahun ke depan sebagai kompensasi atas biaya yang dikeluarkan untuk pintu akses masuk ke Curug Cikuluwung. Setelah proses mediasi ini ormas/LSM pun mendapatkan bagian dari uang masuk tiket ke Curug Cikuluwung sebesar Rp 1500/tiket.

Adapun untuk menyelesaikan konflik ketiga ini, pemerintahan desa sudah melakukan upaya-upaya agar konflik tidak berlanjut dengan mengundang pengelola inti untuk bermusyawarah namun tidak pernah hadir dan selalu diwakilkan oleh pengurus lainnya tetapi pengelola inti tidak setuju dengan kesepakatan yang dihasilkan dari musyawarah tersebut. Selain itu, upaya penyelesaian konflik melalui pendekatan pengelolaan konflik alternatif sistem adat pun sudah dilakukan yang mana komunitas Curug Cikuluwung ini merupakan satu keturunan. Pada proses ini pemerintahan desa dimediasi oleh tokoh yang dituakan di komunitas Curug Cikuluwung namun masih belum berhasil.

5.3.2 Strategi Manajemen Konflik

Dalam pengembangan wisata desa tidak terlepas dari konflik termasuk dalam pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung. Hal yang paling penting dalam pengelolaan sebuah konflik adalah mengakui dan mencari solusi untuk pengelolaan konflik tersebut. Sebagaimana yang disampaikan Dahrendrof dalam Kinseng (2013), ada tiga faktor penting sebagai prasyarat agar pengaturan konflik itu berjalan efektif, yakni; 1) kedua belah pihak harus mengakui realitas dari situasi konflik itu, dan mengakui bahwa pihak “lawan” mempunyai alasan yang sah dalam perjuangannya itu, 2) organisasi kelompok kepentingan terorganisir, 3) kedua belah pihak mesti sepakat atas “aturan main” yang menjadi acuan relasi mereka.

Sampai saat ini, konflik masih berlangsung dan belum ada solusinya. Konflik di wisata desa Curug Cikuluwung ini bukan tidak pernah ada upaya untuk diselesaikan. Telah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk menyelesaikan konflik ini, di antaranya pemerintahan desa sudah mengundang pengelola inti Curug Cikuluwung untuk bermusyawarah, bahkan sudah menghasilkan kesepakatan antara pemerintahan desa dengan komunitas Curug Cikuluwung. Namun, karena pada musyawarah tersebut yang hadir bukan pengelola inti tetapi didelegasikan ke anggota untuk menghadiri musyawarah tersebut sehingga dalam beberapa waktu kemudian pengelola inti menarik kesepakatan tersebut karena mereka tidak sepakat dengan hasil musyawarah.

Strategi manajemen konflik yang sesuai dengan konflik yang terjadi di komunitas wisata desa ini adalah manajemen konflik berbasis komunitas (*Community Based Conflict Management*) agar solusi yang dihasilkan bisa *win-win solution* dan disepakati oleh pihak-pihak yang berkonflik. Peneliti menawarkan kepada pengelola inti dalam hal ini sekretaris dan bendahara karena ketua tidak ditemui untuk memediasi dengan pemerintahan desa, namun hal tersebut tidak dijawab oleh sekretaris. Peneliti berusaha untuk memediasi pemerintahan desa dan pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung melalui diskusi kelompok terarah (FGD). Namun, dalam pelaksanaan FGD perancangan strategi manajemen konflik wisata desa Curug Cikuluwung, hal yang sama dilakukan oleh pengelola inti yakni mereka tidak hadir dalam diskusi dan mendelegasikan anggotanya untuk hadir

dalam diskusi tersebut. FGD dihadiri oleh perwakilan komunitas Curug Cikuluwung, pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Pada awalnya direncanakan akan mengundang Dinas Pariwisata Bogor namun dari dinas ada persyaratan mereka bisa terlibat kalau memang wisata desa Curug Cikuluwung sudah memperoleh izin dari PT Indonesia Power. Adapun PT Indonesia Power tidak hadir karena undangan telat sampai ke orang yang berwenang di Indonesia Power dikarenakan pada saat peneliti memberikan undangan yang bersangkutan tidak di tempat dan satpam tidak memberikan kontak petugas yang berwenang.

FGD dilakukan dengan metode ORID, peneliti mengkonfirmasi temuan-temuan dilapangan ke peserta FGD, dari beberapa pertanyaan ada yang disepakati oleh peserta, ada yang di tolak dan ada yang tidak tahu. Tujuan akhir dari FGD ini adalah adanya rencana aksi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, namun pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung selaku pihak yang berkonflik tidak hadir sehingga rancanganpun tidak bisa disusun. Dari pemerintahan desa, pada dasarnya mereka masih membuka kesempatan untuk tetap bekerjasama tetapi syaratnya komunitas harus bersepakat dulu antara pengelola inti dengan pengurus atau anggota komunitas lainnya. Namun, dari perwakilan pengelola wisata desa Curug Cikuluwung yang hadir mereka tidak bisa memberikan masukan untuk solusi permasalahan yang ada. Pihak yang berkonflik dalam hal ini pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung tidak hadir di diskusi ini sehingga rancangan aksi pun tidak tercapai. Adapun dari pemerintahan kecamatan dalam hal ini diwakili oleh Kasi PMD, memberikan saran agar konflik diselesaikan secara internal dan kepala desa tetap konsisten dan berani.

Dari beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencari solusi pengelolaan konflik, dan belum adanya kesepakatan sebagai solusi untuk konflik tersebut, sehingga perlu melibatkan pihak ketiga. Menurut Engel dan Korf (2005) menjelaskan lima ragam pengelolaan konflik berupa kontinum yakni *avoidance* (menghindar), *negotiation* (negosiasi), *mediation* (mediasi), *arbitration* (arbitrasi), *adjudication* (ajudikasi). Namun untuk manajemen konflik berbasis komunitas, pengelolaan konflik ini maksimal pada tahap mediasi karena sampai tahap ini solusi yang diperoleh *win-win solution*, berbeda dengan yang kedua terakhir solusi yang diperoleh *win-loose solution*.

Berdasarkan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh komunitas yakni *avoidance* dan *negotiation* maka untuk pengelolaan konflik ketiga pada pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung perlu adanya mediasi dari pihak ketiga. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, konflik ketiga ini memiliki dua isu yakni isu ekonomi dan isu politik. Isu politik yang termasuk konflik non realistik memang lebih sulit untuk diselesaikan karena menyangkut identitas, *dignity*, *pride*, namun untuk isu ekonomi yang merupakan konflik realistik cenderung lebih mudah untuk diselesaikan. Isu politik yakni adanya pengaruh dari mantan rival kepala desa terhadap pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung dan isu ekonomi berkaitan dengan retribusi tiket masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung. dikarenakan kedua isu tersebut, pihak berwenang yang perlu memediasi pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung dengan pemerintahan desa Cibitung Wetan adalah pemerintahan Kecamatan Pamijahan dalam hal ini Kasi Ekonomi dan pembangunan dan Kasi PMD serta dari pemerintahan Kabupaten Bogor dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan atau PT Indonesia Power selaku pemilik lahan dimana wisata desa berada.

Sejalan dengan hal ini, Kinseng menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran mediasi yang penting untuk dilakukan dalam konflik antara penduduk lokal pulau Pari dan perusahaan (Kinseng *et al.* 2018). Selain itu, Marina menyatakan bahwa diperlukan proses mediasi dan mediator untuk mengakomodasi keinginan pihak-pihak yang berkonflik di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (Marina *et al.* 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil identifikasi konflik dalam pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung, diperoleh hasil sebagai berikut;

- a. Identifikasi Urutan Kejadian Konflik

Berdasarkan urutan kejadian konflik, konflik yang terjadi dalam pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung ada tiga konflik yang pertama adalah konflik antara Pemerintahan Desa Pamijahan dan tokoh agama serta tokoh masyarakat Desa Pamijahan karena tokoh agama menolak pembukaan akses pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan, konflik sudah ada solusinya berupa kesepakatan menutup dan tidak melegalkan akses pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan. Konflik kedua adalah konflik antara BUMDes dan warga Desa Pamijahan (Mami) yang membuka pintu akses ke wisata desa Curug Cikuluwung dari pintu lainnya yang tidak resmi, konflik ini pun sudah ada solusinya berupa diijinkannya Mami untuk tetap membuka akses pintu masuk tersebut selama satu tahun dan ormas/LSM Gempar memperoleh bagian dari tiket masuk sebesar 1500/tiket. Konflik yang ketiga adalah konflik antara pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung dan Pemerintahan Desa Cibitung Wetan, untuk konflik ketiga ini belum ada solusinya.

- b. Identifikasi Isu-isu Konflik

Berdasarkan hasil identifikasi, hal yang melatarbelakangi konflik pertama adalah belum adanya sosialisasi ke tokoh agama setempat tentang rencana pembukaan akses pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan, Paguyuban yang didukung oleh Kepala Desa Pamijahan dan anggota (DPRD) memasang papan nama wisata desa Curug Cikuluwung dan petunjuk arah, sedangkan isu yang menjadi inti konflik adalah kekhawatiran tokoh agama akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh wisata desa Curug Cikuluwung, Paguyuban tetap memasang papan nama dan petunjuk arah menuju wisata desa Curug Cikuluwung dari Desa Pamijahan walaupun sudah ada penolakan dari tokoh agama, Adapun efek dari konflik ini adalah adanya penolakan tokoh agama akan dibukanya wisata desa Curug Cikuluwung.

Adapun, hal-hal yang melatarbelakangi konflik kedua pada pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung adalah penutupan pintu akses masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari desa tetangga (Desa Pamijahan) oleh BUMDes Cibitung Wetan. Inti dari konflik ini adalah perebutan akses masuk ke wisata Curug Cikuluwung. Adapun efek dari konflik ini adalah warga Desa Pamijahan (Mami) beraliansi dengan ormas/LSM.

Selanjutnya hasil identifikasi pada konflik ketiga, hal-hal yang melatarbelakangi konflik pada pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung ini adalah adanya penyalahgunaan jabatan oleh ketua BUMDes yang lama, adanya prasangka dari pengelola wisata desa Curug Cikuluwung ke pemerintahan desa, adanya komunikasi yang tidak lancar antara pengurus Curug Cikuluwung dan pemerintahan desa, adanya isu politik yakni ketua

pengelola Curug Cikuluwung merupakan pendukung calon kepala desa yang kalah dari kepala desa terpilih, sumber daya manusia yang belum mampu mengelola wisata desa Curug Cikuluwung dengan profesional. Isu yang menjadi inti dari konflik pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung adalah ketidaksepehaman antara pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung dan Pemerintahan Desa Cibitung Wetan. Adapun efek dari konflik ini yaitu pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung mengalami keterlambatan, pengurus Curug Cikuluwung tidak mendapatkan akses untuk memperoleh pelatihan, pengelola kesulitan mendapatkan akses untuk memperoleh bantuan dari pemerintah karena telah melepaskan ikatan dari pemerintahan desa.

- c. Berdasarkan pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung, yakni; Pada konflik pertama yang terlibat konflik adalah Pemerintahan Desa Pamijahan dan tokoh agama serta tokoh masyarakat Desa Pamijahan. Pada konflik kedua, aktor-aktor yang terlibat dalam konflik adalah BUMDes, pengelola wisata desa Curug Cikuluwung, warga Desa Pamijahan (Mami), Ormas/LSM Gempar dan mediatornya Pemerintahan Desa Cibitung Wetan, serta Kapolsek Cibungbulang. Selanjutnya aktor yang terlibat dalam konflik ketiga adalah pengelola wisata desa Curug Cikuluwung, Pemerintahan Desa Cibitung Wetan, BUMDes, PT Indonesia Power dan mantan kandidat kepala desa.
 - d. Merujuk pada pendapat Engel dan Korf (2015) tahapan konflik yang terjadi pada pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung ada pada tahap terbuka yang mana konflik sudah muncul ke publik (*emerging*), sedangkan merujuk pada pendapat Fisher et al., (2001) konflik yang terjadi pada konflik pertama dan kedua berada pada tahap pascakonflik karena situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua pihak, sedangkan untuk konflik yang ketiga berada pada tahap krisis, karena aktor-aktor yang berkonflik masing-masing teguh dengan pendirian mereka.
 - e. Berdasarkan identifikasi akibat konflik menurut analisis Lewis Coser, konflik yang terjadi dalam pengelolaan wisata desa Curug Cikuluwung untuk konflik pertama dan kedua merupakan konflik konstruktif karena kedua hubungan yang berkonflik menjadi lebih baik, sedangkan konflik yang ketiga merupakan konflik destruktif, karena lebih banyak menimbulkan efek negatif.
2. Strategi manajemen konflik dalam pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung untuk konflik pertama dan kedua diselesaikan melalui mediasi pihak ketiga. Adapun upaya-upaya manajemen konflik berbasis komunitas untuk menyelesaikan konflik ketiga sudah dilakukan namun belum ada solusinya. Sehingga untuk menyelesaikan konflik ketiga ini perlu adanya mediasi dari pihak yang berwenang terhadap wisata desa Curug Cikuluwung, karena yang berkonflik adalah pemerintahan desa dan pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung maka perlu mediasi dari Pemerintahan Kecamatan Pamijahan dalam hal ini Kasi Ekonomi dan Pembangunan, serta Kasi PMD, juga dari pemerintahan Kabupaten Bogor dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor dan atau PT Indonesia Power sebagai pemilik lahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

6.2 Saran

- a. Bagi akademisi yang memiliki ketertarikan pada studi mengenai konflik kiranya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang studi manajemen konflik dalam pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung maupun wisata desa lainnya.
- b. Bagi Pemerintahan Desa Cibitung Wetan dan komunitas wisata Curug Cikuluwung perlu fasilitasi dan mediasi dari pemerintahan lebih tinggi yang memiliki wewenang atas wisata desa Curug Cikuluwung untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, dalam hal ini adalah pemerintahan Kecamatan Pamijahan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor dan atau PT Indonesia Power demi keberlanjutan pariwisata di Curug Cikuluwung dan kesejahteraan komunitas Curug Cikuluwung khususnya, umumnya masyarakat Desa Cibitung Wetan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afala LM. 2017. Menalar Dinamika Konflik Wisata Goa Pindul. *J Gov.* 2(1). doi:10.31506/jog.v2i1.2121.
- Ahsani RDP, Suyaningsih O, Ma'rifah N, Aerani E. 2018. Penerapan konsep community based tourism (CBT) di desa wisata candirejo borobudur mewujudkan kemandirian desa. *Publisia J Ilmu Adm Publik.* 3(2). doi:10.26905/pjiap.v3i2.2270.
- Asmaniati F, Hutagalung H, Rosalina Dewi T. 2017. The Role of Higher Education in Tourism Village Capacity Development. Di dalam: *1st International Conference on Tourism Gastronomy and Tourist Destination.* Atlantis Press.
- Clarkson MBE. 1995. A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance Published by: Academy of Management Linked references are available on JSTOR for this article: A STAKEHOLDER FRAMEWORK FOR ANALYZING AND EVALUATING CORPORATE SOCIAL PERFOR. *Acad Manag Rev.* 20(1):92–117.
- Dewi LKY. 2014. Modeling the Relationships between Tourism Sustainable Factor in the Traditional Village of Pancasari. *Procedia - Soc Behav Sci.* 135:57–63. doi:10.1016/j.sbspro.2014.07.325.
- Engel A, Korf B. 2005. Negotiation and mediation techniques for natural resource management. *Negot Mediat Tech Nat Resour Manag.*
- Eusebio C, Kastenholz E, Breda Z. 2014. Tourism and sustainable development of rural destinations: A stakeholders' view. *Rev Port Estud Reg.* 36(1):13–21.
- Falak S, Chiun LM, Wee AY. 2014. A Repositioning Strategy for Rural Tourism in Malaysia - Community's Perspective. *Procedia - Soc Behav Sci.* 144:412–415. doi:10.1016/j.sbspro.2014.07.310.
- Fitari Y, Ma'rif S. 2017. Manfaat Pengembangan Desa Wisata Wonolopo terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Lokal. *J Wil dan Lingkungan.* 5(1):29. doi:10.14710/jwl.5.1.29-44.
- Fitriyana D. 2016. Konflik Manajemen Antara Pengelola Dan Masyarakat Di Tahura Djuanda, Bandung, Jawa Barat. *J Master Pariwisata.* 2:111–123. doi:10.24843/jumpa.2016.v02.i02.p07.
- Garsetiasih R, Alikodra HS. 2015. Conflict Management of Bulls Conservation in Meru Betiri National Park and Alas Purwo National Park. *J Anal Kebijakan Kehutan.* 12(3):213–234.
- GOVDELI T, DIREKCI TB. 2017. The Relationship between Tourism and Economic Growth: OECD Countries. *Int J Acad Res Econ Manag Sci.* 6(4). doi:10.6007/ijarems/v6-i4/3489.
- Grimble R, Chan M -K. 1995. Stakeholder analysis for natural resource management in developing countries: Some practical guidelines for making management more participatory and effective. *Nat Resour Forum.* 19(2):113–124. doi:10.1111/j.1477-8947.1995.tb00599.x.
- Groenendijk L. 2003. *Planning and Management Tools.* Volume ke-37. The Netherlands: The International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC).
- Hanifah E. 2018. Analisis keberlanjutan dalam penerapan community based

tourism wisata alam goa pindul , kabupaten gunungkidul, yogyakarta erlina hanifah. Institut Pertanian Bogor.

- Hijriati E, Mardiana R. 2015. Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial Dan Ekonomi Di Kampung Batusuhunan, Sukabumi. *Sodality J Sociol Pedesaan*. 2(3):146–159. doi:10.22500/sodality.v2i3.9422.
- Kinseng RA, Nasdian FT, Fatchiya A, Mahmud A, Stanford RJ, Kinseng RA, Nasdian FT, Fatchiya A, Mahmud A, Kinseng RA, *et al.* 2018. Marine-tourism development on a small island in Indonesia: blessing or curse? Marine-tourism development on a small island in Indonesia: blessing or. 1665. doi:10.1080/10941665.2018.1515781.
- Lane B. 1994. What is rural tourism? *J Sustain Tour*. 2(1–2):7–21. doi:10.1080/09669589409510680.
- Mitchell RK, Agle BR, Wood DJ. 1997. Toward a Theory of Stakeholder Identification and Saliency: Defining The Principle of Who and What Really Counts. *Am Psychol*. 28(10):913–925. doi:10.1037/h0035597.
- Nizar MA. 2015. Tourism Effect on Economic Growth in Indonesia. *Munich Pers RePEc Arch*. 7(65628):1–25.
- Ohlan R. 2017. The relationship between tourism, financial development and economic growth in India. *Futur Bus J*. 3(1). doi:10.1016/j.fbj.2017.01.003.
- Purbasari N, Manaf A. 2018. Comparative Study on the Characteristics of Community-Based Tourism between Pentingsari and Nglangeran Tourism Village, Special Region Yogyakarta. Di dalam: *E3S Web of Conferences*. Vol. 31.
- Rahayu S, Dewi U, Fitriana KN. 2016. Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *J Penelit Hum*. 21(1):1–13.
- Rizkiyanto N, Topowijono. 2018. Penerapan Konsep Community Based Tourism dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan (Studi Pada Desa Wisata Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek). *J Adm Bisnis*. 58(2).
- Saarinen J. 2006. Traditions of sustainability in tourism studies. *Ann Tour Res*. 33(4):1121–1140. doi:10.1016/j.annals.2006.06.007.
- Sari IP, Raden J, Pagar F, Bengkulu D, Regency W, Park N. 2017. Konflik kepentingan dalam pengembangan pariwisata: kasus pulau kapota, wakatobi, sulawesi tenggara. *Tsaqofah & Tarikh*. 2(1).
- Situmorang R, Trilaksono T, Japutra A. 2019. Friend or Foe? The complex relationship between indigenous people and policymakers regarding rural tourism in Indonesia. *J Hosp Tour Manag*. 39(March 2018):20–29. doi:10.1016/j.jhtm.2019.02.001.
- Sutiarani H, Rahmafitria F. 2016. Dampak Keberadaan Dusun Bambu Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Kertawang Kecamatan Cisarua. *Tour Sci J*. 1(1):1. doi:10.32659/tsj.v1i1.1.
- Ulfah SM. 2007. Identifikasi Konflik Dalam Pengelolaan Wisata di Kawasan Gunung Salak Endah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Vitasurya VR. 2016. Local Wisdom for Sustainable Development of Rural Tourism, Case on Kalibiru and Lopati Village, Province of Daerah Istimewa Yogyakarta. *Procedia - Soc Behav Sci*. 216:97–108. doi:10.1016/j.sbspro.2015.12.014.

Yachya AN, Wilopo, Mawardi MK. 2016. Pengelolaan Kawasan Wisata Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis CBT (Community Based Tourism) (Studi pada Kawasan Wisata Pantai Clungup Kabupaten Malang). *J Adm Bisnis*. 39(2):107–116.

Yustisi MJ. 2018. Analisis Stakeholders dalam Pengelolaan Objek Wisata Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara. *J Ilm Tata Sejuta STIA Mataram*. 4(1):64–80. doi:10.32666/tatasejuta.v4i1.27.

@Hak cipta milik IPBUniversity

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.

RIWAYAT HIDUP

Nia Kurniati sebagai penulis dilahirkan di Bandung pada tanggal 14 April 1982 dari pasangan Misa Sukarna dan Ibah Habibah. Penulis adalah anak kelima dari lima bersaudara. Menempuh jenjang S1 di jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Penulis menyelesaikan S1 dengan judul karya ilmiah “Bagaimana Cara Pandang Anak Jalanan terhadap Dirinya Sendiri”.

Saat ini penulis merupakan *individual consultant* pada NGOs Mercy Corps Indonesia untuk TA 9391 ADB project. Penulis memiliki pengalaman pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2010-2015 penulis aktif sebagai Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan. Pada tahun 2018-2019 penulis merupakan *Field Officer* Dompok Dhuafa untuk mendampingi CSR PT Star Energy Geothermal Salak.

Atas dasar minat penulis pada bidang pemberdayaan masyarakat, penulis melanjutkan studi di Sekolah Pascasarjana IPB University tahun 2018 pada program studi Magister Pengembangan Masyarakat dan menyelesaikannya pada tahun 2021.

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

IPB University